

DISERTASI

**ANALISIS PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN PADA
PROPINSI PENGHASILTAMBANG DI INDONESIA**

**ANALYSIS OF SUSTAINABILITY DEVELOPMENT
AT MINING PROVINCE IN INDONESIA**

**MARYANTI
P0500315402**



**PROGRAM DOKTOR ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020**

DISERTASI

**ANALISIS PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN PADA
PROPINSI PENGHASILTAMBANG DI INDONESIA**

**ANALYSIS OF SUSTAINABILITY DEVELOPMENT
AT MINING PROVINCE IN INDONESIA**

Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Doktor

Disusun dan Diajukan oleh:

**MARYANTI
P0500315402**



Kepada

**PROGRAM DOKTOR ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020**

DISERTASI

ANALISIS PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN PADA PROPINSI PENGHASIL TAMBANG DI INDONESIA


Disusun dan diajukan oleh

MARYANTI
P0500315402


Telah dipertahankan dalam sidang ujian disertasi
pada tanggal **03 Juni 2020** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

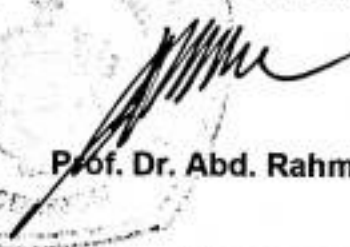
Tim Promotor


Prof. Dr. Hj. Rahmatia, SE, MA
Promotor


Prof. Dr. Nursini, SE, MA
Kopromotor I


Dr. Sanusi Fattah, SE, M.Si.
Kopromotor II


Ketua Program Studi
Doktor Ilmu Ekonomi


Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin

Dr. Anas Iswanto Anwar, SE., MA

Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si.

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maryanti
NIM : P0500315402
Jurusan/Program Studi : Ilmu Ekonomi Konsentrasi Ilmu Ekonomi

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa disertasi berjudul:

ANALISIS PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN PADA PROPINSI PENGHASIL TAMBANG DI INDONESIA

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah disertasi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan/ditulis/diterbitkan sebelumnya, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata di dalam naskah disertasi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, Maret 2020
Yang membuat pernyataan

Maryanti

ABSTRAK

MARYANTI. Analisis Pembangunan Berkelanjutan pada Propinsi Penghasil Tambang di Indonesia (dibimbing oleh **Rahmatia, Nursini, dan Sanusi Fattah**)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan mengukur seberapa besar pengaruh antara investasi swasta, dana bagi hasil sumber daya alam, dan demokrasi terhadap pembangunan berkelanjutan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui ketimpangan pendapatan dan kriminalitas.

Penelitian ini menggunakan model persamaan analisis statistika. Jenis data yang digunakan adalah data panel sepuluh propinsi penghasil tambang terbanyak di Indonesia tahun 2009-2018. Data dianalisis dengan menggunakan estimasi persamaan *simultan equation model (SEM)*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa investasi swasta dan dana bagi hasil sumber daya alam berpengaruh positif dan signifikan secara langsung terhadap pembangunan berkelanjutan. Demokrasi tidak berpengaruh secara langsung terhadap pembangunan berkelanjutan. Investasi swasta, dana bagi hasil sumber daya alam, dan demokrasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan berkelanjutan secara tidak langsung melalui ketimpangan pendapatan. Investasi swasta, dana bagi hasil sumber daya alam, dan demokrasi tidak berpengaruh terhadap pembangunan berkelanjutan secara tidak langsung melalui kriminalitas.

Kata kunci: Investasi Swasta, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Demokrasi, Ketimpangan Pendapatan, Kriminalitas, Pembangunan Berkelanjutan



ABSTRACT

MARYANTI. Analysis of Sustainable Development in Mining Producing Provinces in Indonesia (supervised by **Rahmatia, Nursini, and Sanusi Fattah**)

This study aims to analyze and measure how much influence between private investment, natural resource sharing funds, and democracy on sustainable development both directly and indirectly through income inequality and crime.

This study uses the statistical analysis equation model. The type of data used is panel data of the ten most mining producing provinces in Indonesia in 2009-2018. Data were analyzed using simultaneous equation model estimation (SEM).

The results show that private investment and natural resource revenue sharing have a positive and significant direct effect on sustainable development. Democracy does not directly influence sustainable development. Private investment, natural resource revenue-sharing funds, and democracy have a positive and significant effect on sustainable development indirectly through income inequality. Private investment, natural resource revenue-sharing funds, and democracy do not affect sustainable development indirectly through crime.

Keywords: Private Investment, Revenue Sharing Natural Resources, Democracy, Income Inequality, Crime, Sustainable Development



KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah senantiasa penulis panjatkan ke Hadirat Allah Subhana Wa Ta'la atas limpahan rahmat, taufik, inayah dan hidayah-Nya. Demikian pula shalawat dan salam peneliti haturkan kepada junjungan baginda Nabi Besar Muhammad Sallahu Alaihi Wa Salam, nabi panutan dan sebagai Uswatun Khasanah, Rahmatan Lil Alamin, sehingga penulis dapat menyelesaikan disertasi ini dengan judul: **Analisis Pembangunan Berkelanjutan pada Propinsi Penghasil Tambang di Indonesia**. Disertasi ini merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar Doktor (Dr/S3) pada Program Doktor Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Adapun ide gagasan yang melatarbelakangi tulisan ini karena adanya fenomena pembangunan berkelanjutan yang menurut penulis layak untuk dikaji dan dianalisis. Penulis ingin merekomendasikan dan menyumbangkan konsep, ide dan gagasan dari tulisan ini dengan berbagai harapan, yaitu; investasi yang berpihak pada rakyat, perimbangan dana bagi hasil sumber daya alam antar daerah, stabilnya indeks demokrasi Indonesia, meratanya rasio gini, dan menurunnya indeks kriminalitas serta terjadinya keberlanjutan pembangunan.

Penulis menyadari bahwa tidak sedikit kendala dan permasalahan yang dihadapi selama proses perkuliahan, hingga selesainya disertasi ini, karena atas berkat rahmat dan karunia Allah SWT, serta dorongan motivasi dari keluarga, sahabat dan berbagai pihak, Alhamdulillah penulisan disertasi ini dapat diselesaikan. Berkenaan dengan itu, kiranya tidak berlebihan pada kesempatan ini penulis mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah membantu serta memberi motivasi hingga selesainya disertasi ini.

Penulis menghaturkan hormat dan terima kasih yang tak terhingga kepada Prof. Dr. Hj Rahmatia, SE, MA sebagai promotor, dan Dr. Nursini, SE, MA sebagai kopromotor 1, serta Dr. Sanusi Fattah, SE, M.Si sebagai kopromotor 2, atas perhatian, ketulusan, keramahan, dan motivasinya dalam pembimbingan, baik dari sejak mulai kuliah hingga selesainya perbaikan penulisan disertasi ini.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh tim penguji dan penilai, baik penguji dan penilai eksternal maupun internal yaitu: Bapak Dr. Abd.

Rahim, SP, M.Si sebagai penguji dan penilai eksternal, Bapak Prof. Dr. Basri Hasanuddin, MA selaku penguji dan penilai internal, Bapak Prof. Dr. Muhammad Yunus Zain, MA selaku penguji dan penilai internal, Bapak Dr. Madris, DPS, SE, M.Si selaku penguji dan penilai internal, Bapak Dr. Anas Iswanto Anwar, SE, MA selaku penguji dan penilai internal, dan ibu Dr. Fatmawati, SE, M.Si selaku penguji dan penilai internal atas segala perhatian, pertanyaan, sanggahan, saran, masukan maupun kritikan dengan segala pengetahuan dan motivasinya selama proses ujian berlangsung demi penyempurnaan disertasi ini.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, MA, selaku rector Universitas Hasanuddin dan bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin (FEB-UH) Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE, M.Si beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan akademik.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Ketua Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Dr. Anas Iswanto Anwar, SE, MA dan seluruh dosen pengajar Doktor Ilmu Ekonomi FEB-UNHAS yang telah memberikan bekal ilmu dan menularkan pengalaman-pengalaman akademik yang berharga selama penulis menempuh studi. Tak lupa penulis juga mengucapkan terima kasih kepada staf administrasi baik FEB-UNHAS maupun Program Doktor Ilmu Ekonomi FEB-UNHAS serta Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin.

Terima kasih juga disampaikan kepada Dirjen Dikti yang telah memfasilitasi penulis dengan bantuan beasiswa melalui program BPP-DN dan sehingga penulis bisa melanjutkan studi program doktor (S3) di Universitas Hasanuddin.

Ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya pula penulis sampaikan kepada Rektor Universitas Andalas dan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas yang telah memberikan rekomendasi kepada penulis untuk bisa melanjutkan studi program doktor (S3) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Hasanuddin melalui program beasiswa BPP-DN dan bantuan studi lanjut Universitas Andalas.

Terima kasih kepada rekan-rekan seperjuangan angkatan 2015 pada program doktor ilmu ekonomi FEB-UH, berturut-turut bapak/ibu; Muhammad Toaha, Jimmy Roland Alfius Torar, Sri Sundari, Muhammad Irfai Sohilau, Muh. Kafrawi Yunus, Rosdiana, Nasit Tonna, Nina Fapari Arif, Hasnidar, Nurmadhani Fitri Suyuthi, Muh. Hasbi Abbas, Umar Syarifuddin, Wihalminus Sombolayuk, Andi

Harmoko Arifin, Badirun Basir, Ely Steven Ingratubun, Tasrim, Muh. Aksan Tennisau dan Irawati. Demikian pula kepada seluruh mahasiswa FEB-UH mulai angkatan 2013 sampai dengan angkatan 2018 yang selama ini berinteraksi dengan penulis, dan segenap keluarga, sahabat dan handai taulan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas dukungan moril, spirit dan doanya. Semoga Allah SWT senantiasa membalasnya pula dengan kebaikan-kebaikan. Amin.

Ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya juga penulis sampaikan kepada seluruh guru-guru SDN 29 Muaro Gambok Sijunjung Sumbar, SMPN 7 Sijunjung Sumbar, SMAN 1 Sijunjung Sumbar serta dosen-dosen Fakultas Ekonomi Universitas Andalas yang telah bersusah payah menggali mata air ilmu dan benih-benih kecerdasan untuk disiramkan kepada penulis yang sebelumnya tidak mengetahui apa-apa menjadi seperti ini. Atas perhatian, dukungan dan motivasinya selama penulis sekolah dan kuliah. Semoga Allah SWT senantiasa membalasnya pula dengan kebaikan-kebaikan. Amin.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada saudara kandung berturut-turut: Fitwah Afandi, S.Pd dan Takdir Julianda S.Si dan juga adik ipar penulis Andrinaldi, A.md dan Rika Tri Wahyuni, SE dan seluruh keponakan atas segala bantuan dan dukungan serta doanya. Semoga Allah SWT senantiasa membalasnya pula dengan kebaikan-kebaikan. Amin.

Persembahan sujud dan terimakasih yang tidak terhingga penulis haturkan kepada kedua orang tua tercinta dan tersayang Papa Ir. H. Abdurahman Hamid dan Mama Hj. Darwani, S.Pd yang telah bersusah payah melahirkan, membesarkan, dan mendidik penulis dengan penuh cinta dan kasih sayang sehingga penulis bisa seperti ini, serta papa mertua Syahkiar dan mama mertua Arnis, atas segala nasehat dan semangat serta doanya. Semoga Allah SWT senantiasa membalasnya pula dengan kebaikan-kebaikan. Amin.

Ucapan terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam penulis sampaikan kepada teman tidurku terkasih Andriko, SE yang telah sabar mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, perhatian dan segalanya serta kepada anak cayang bunda Fahri Putra Mayandri yang telah berkorban perasaan sedih dan belajar mandiri ditinggalkan untuk bunda berangkat ke Makassar dalam menyelesaikan sekolah dan disertasi ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kami semua. Amin.

Penulis menyadari bahwa disertasi ini masih jauh dari sempurna meskipun telah menerima banyak bantuan dan masukan dari berbagai pihak. Karena itu, apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam disertasi ini sepenuhnya menjadi kekurangan peneliti, sehingga untuk kesempumaannya kritik dan saran yang sifatnya membangun akan lebih menyempurnakan disertasi ini.

Akhirnya semoga disertasi ini bisa diterima sebagai syarat untuk meraih gelar doktor (Dr) pada Program Doktor Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin dan bermanfaat bagi penulis, sekeluarga, masyarakat, bangsa, negara dan agama. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam disertasi ini semoga Allah SWT senantiasa meridhoi segala aktifitas dan amal usaha kita. Amin.

Makassar, Juni 2020

Maryanti

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Pengesahan	iii
Pernyataan Keaslian Penelitian	iv
Abstrak.....	v
Abstract	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	xi
Daftar Tabel	xiii
Daftar Gambar	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Kegunaan dan Manfaat serta Signifikansi Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Teori dan Konsep Pembangunan Berkelanjutan	12
2.1.1 Konsep Pembangunan Berkelanjutan dalam Dimensi Ekonomi	12
2.1.2 Konsep Pembangunan Berkelanjutan dalam Dimensi Sosial	17
2.1.3 Konsep Pembangunan Berkelanjutan dalam Dimensi Lingkungan	21
2.1.4 Konsep Pembangunan Berkelanjutan dalam Dimensi Politik	23
2.2 Tinjauan Teoritis Hubungan Antar Variabel Eksogen dan Endogen	26
2.2.1 Hubungan Teoritis Investasi Swasta dan Pembangunan Berkelanjutan	26
2.2.2 Hubungan Teoritis Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam dan Pembangunan Berkelanjutan.....	31
2.2.3 Hubungan Teoritis Demokrasi dan Pembangunan Berkelanjutan	34
2.2.4 Hubungan Teoritis Ketimpangan Pendapatan dan Pembangunan Berkelanjutan	38
2.2.5 Hubungan Teoritis Kriminalitas dan Pembangunan Berkelanjutan	41
2.2.6 Hubungan Teoritis Ketimpangan Pendapatan dan Kriminalitas	46
2.3 Beberapa Hasil Penelitian dan Studi Empiris Sebelumnya	49
BAB III KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS	
3.1 Kerangka Konseptual Penelitian.....	65
3.2 Hipotesis Penelitian	68

BAB IV	METODE PENELITIAN	
4.1	Rancangan Penelitian	70
4.2	Teknik Penarikan Sampel	71
4.3	Objek Penelitian	72
4.4	Teknik Analisis Data	73
4.4.1	Uji Koefisien Determinasi (<i>Adjusted R²</i>)	78
4.4.2	Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)	78
4.4.3	Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)	79
4.5	Definisi Operasional	80
BAB V	HASIL PENELITIAN	
5.1	Gambaran Umum Penelitian	85
5.1.1	Perkembangan Investasi Swasta pada Propinsi Penghasil Tambang di Indonesia	85
5.1.2	Perkembangan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam pada Propinsi Penghasil Tambang di Indonesia	87
5.1.3	Perkembangan Indeks Demokrasi pada Propinsi Penghasil Tambang di Indonesia	92
5.1.4	Perkembangan Ketimpangan Pendapatan pada Propinsi Penghasil Tambang di Indonesia	95
5.1.5	Perkembangan Kriminalitas pada Propinsi Penghasil Tambang di Indonesia	97
5.1.6	Perkembangan Indeks PDRB pada Propinsi Penghasil Tambang di Indonesia	99
5.1.7	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia pada Propinsi Penghasil Tambang di Indonesia	101
5.1.8	Perkembangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada Propinsi Penghasil Tambang di Indonesia	104
5.1.9	Perkembangan Indeks Pembangunan Berkelanjutan pada Propinsi Penghasil Tambang di Indonesia	106
5.2	Hasil Estimasi Pengaruh Investasi Swasta terhadap Pembangunan Berkelanjutan Baik Secara Langsung maupun Tidak Langsung Melalui Ketimpangan Pendapatan dan Kriminalitas	110
5.3	Hasil Estimasi Pengaruh Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam terhadap Pembangunan Berkelanjutan Baik Secara Langsung maupun Tidak Langsung Melalui Ketimpangan Pendapatan dan Kriminalitas	113
5.4	Hasil Estimasi Pengaruh Demokrasi terhadap Pembangunan Berkelanjutan Baik Secara Langsung maupun Tidak Langsung Melalui Ketimpangan Pendapatan dan Kriminalitas	116
5.5	Hasil Estimasi Persamaan Struktural	119
5.5.1	Hasil Estimasi Persamaan (3.1)	119
5.5.2	Hasil Estimasi Persamaan (3.2)	121
5.5.3	Hasil Estimasi Persamaan (3.3)	122
BAB VI	PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	
6.1	Analisis dan Implikasi Pengaruh Investasi Swasta terhadap Pembangunan Berkelanjutan melalui Ketimpangan Pendapatan dan Kriminalitas	124

6.2 Analisis dan Implikasi Pengaruh Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam terhadap Pembangunan Berkelanjutan melalui Ketimpangan Pendapatan dan Kriminalitas	132
6.3 Analisis dan Implikasi Pengaruh Demokrasi terhadap Pembangunan Berkelanjutan melalui Ketimpangan Pendapatan dan Kriminalitas	138
6.4 Implikasi Teori dan Empiris Hasil Penelitian	144
6.5 Keterbatasan Penelitian	146
 BAB VII PENUTUP	
7.1 Kesimpulan	148
7.2 Saran	149
 DAFTAR PUSTAKA	151
LAMPIRAN	177

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Matriks Penelitian Terdahulu & Preposisi Penelitian	63
Tabel 4.1	Perkembangan Izin Usaha Tambang di Indonesia Tahun 2015	71
Tabel 5.1	Realisasi Investasi Swasta Dalam Negeri Propinsi Penghasil Tambang di Indonesia Tahun 2009-2018 (Dalam Trilyun Rupiah) ..	85
Tabel 5.2	Perkembangan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA Propinsi Penghasil Tambang di Indonesia Tahun 2009-2018 (Dalam Rupiah)	91
Tabel 5.3	Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia Propinsi Penghasil Tambang di Indonesia Tahun 2009-2018	94
Tabel 5.4	Perkembangan Rasio Gini (Ketimpangan Pendapatan) Propinsi Penghasil Tambang di Indonesia Tahun 2009-2018	95
Tabel 5.5	Perkembangan Indeks Kriminalitas Propinsi Penghasil Tambang di Indonesia Tahun 2009-2018.....	97
Tabel 5.6	Perkembangan Indeks PDRB Propinsi Penghasil Tambang di Indonesia Tahun 2009-2018	100
Tabel 5.7	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Propinsi Penghasil Tambang di Indonesia Tahun 2009-2018	102
Tabel 5.8	Perkembangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Propinsi Penghasil Tambang di Indonesia Tahun 2009-2018	104
Tabel 5.9	Perkembangan Indeks Pembangunan Berkelanjutan Propinsi Penghasil Tambang di Indonesia Tahun 2009-2018	106
Tabel 5.10	Hasil Estimasi Investasi Swasta terhadap Pembangunan Berkelanjutan melalui Ketimpangan Pendapatan dan Kriminalitas ..	111
Tabel 5.11	Hasil Estimasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam terhadap Pembangunan Berkelanjutan melalui Ketimpangan Pendapatan dan Kriminalitas	115
Tabel 5.12	Hasil Estimasi Demokrasi terhadap Pembangunan Berkelanjutan melalui Ketimpangan Pendapatan dan Kriminalitas	118

BAB I

PENDAHULUAN



1.1 Latar Belakang

Pembangunan berkelanjutan merupakan tujuan komitmen bersama baik pada tingkat nasional maupun pada tingkat daerah. Pencapaian keberlanjutan pembangunan bukan sekedar *trade off* antara tujuan ekonomi dan lingkungan (Fauzi, 2004). Karena pembangunan ekonomi yang berbasis sumber daya alam yang tidak memperhatikan aspek kelestarian lingkungan akan menyebabkan permasalahan pembangunan di kemudian hari.

Perhatian terhadap pembangunan berkelanjutan sudah dikenalkan sejak abad ketika Thomas Robert Malthus pada tahun 1798 mengajukan hipotesis antara pertumbuhan penduduk dan keterbatasan lahan. Secara konseptual, teori Malthus merupakan cikal bakal tumbuhnya *trade off* antara pembangunan yang mengandalkan aspek ekonomi dengan daya dukung sumber daya dan lingkungan, sebuah konsep yang sebenarnya telah mengakar sejak masa pemikiran Yunani, yakni pemikiran Aristoteles dengan *Nichomecian Ethics* yang ditulis pada tahun 350 SM. Dalam *Nichomecian Ethics*, misalnya penempatan etika dalam konteks "*virtue*" merupakan landasan penting dalam memahami perilaku manusia dan kaitannya dengan alam dan lingkungan (Malthus, 1798).

Belakangan konsep ini kemudian mengemuka dengan terbitnya buku "*The Limit to Growth*" pada tahun 1972 oleh Meadow, yang memicu

perhatian lebih serius tentang adanya "batas dari pertumbuhan". Dalam buku ini memunculkan teori pertumbuhan yang mengakomodasi keterbatasan sumber daya alam dan dampaknya terhadap lingkungan (Meadow, 1972).

Dua tahun berselang, Stiglitz tepatnya tahun 1974 mengeluarkan konsep pertumbuhan ekonomi dengan optimalisasi ekstraksi sumber daya alam. Hal ini didasari dengan terjadinya teori *asymmetric information* yang dikeluarkan dalam *Washington Concensus*. Ada pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan dalam menjalankan roda pembangunan. Saat perbedaan informasi tersebut diperlukan peran pemerintah dalam menyeimbangkan berjalannya meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Stiglitz, 1974).

Selanjutnya mendorong Solow pada tahun 1974 juga menambahkan teori Stiglitz dengan mengemukakan teori pertumbuhan dalam bukunya *Intergenerational Equity & Exhaustible Resource*. Pada teori Solow, adanya penekanan tabungan, populasi dan teknologi yang mempengaruhi output dan pertumbuhan ekonomi. Seterusnya Solow juga menerangkan harus adanya keadilan dan kesetaraan dalam pemanfaatan input dan sumber daya yang akan dinikmati oleh setiap generasi (Solow, 1974).

Keempat teori di atas yang mengawali berkembangnya konsep pembangunan berkelanjutan di dunia. Satu dekade kemudian kembali konsep ini mengemuka dengan dikeluarkannya buku *Our Common Future* yang dikeluarkan oleh *World Commission on Resources Development*

tahun 1987. Buku ini begitu terkenal dengan mengenalkan tentang pembangunan berkelanjutan. Pada buku ini disebutkan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kebutuhan generasi yang akan datang (WRI, 2000).

Perjalanan perkembangan konsep pembangunan berkelanjutan berakhir pada tahun 2015 setelah terpenuhinya MDGs. Selanjutnya PBB menargetkan konsep *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Konsep ini harus terpenuhi hingga tahun 2030. Dalam SDGs terkandung ada 17 tujuan pembangunan yang harus terpenuhi dengan 169 target program pembangunan yang meliputi dimensi lingkungan, ekonomi dan sosial. Namun dimensi politik belum dibicarakan secara kompleks.

Menindaklanjuti hal tersebut selama tiga dasawarsa terakhir telah banyak upaya yang dilakukan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Namun sifat multi-dimensi dari keberlanjutan tersebut memerlukan pertimbangan yang simultan dari berbagai aspek yang mewakili ukuran-ukuran atau indikator keberlanjutan (Cinelli, 2014). Artinya pengukuran atas indikator dari pembangunan berkelanjutan masih berbentuk abu-abu dimana keragaannya masih dipertimbangkan.

Kompleksitas pencapaian pembangunan berkelanjutan akan dihadapi pula oleh pengambil kebijakan baik tingkat daerah maupun di tingkat pusat. Karena pembangunan berkelanjutan menyangkut aspek multi-dimensi dari sisi ekonomi, sosial, lingkungan bahkan politik dengan masing-masing ukuran atau indikator berbeda yang berbeda. Sehingga

diperlukan identifikasi kriteria, definisi, dan pengukuran untuk berhasilnya implementasi pembangunan berkelanjutan (Poveda, 2011). Adanya konflik antara agenda pertumbuhan, keadilan ekonomi, dan lingkungan sering diartikan sebagai sesuatu yang alamiah. Sehingga, *trade-off* antara ketiganya sering dianggap sebagai sesuatu yang tidak bisa dihindari (Fauzi & Oktavianus, 2014).

Ketika pembangunan berkelanjutan akan dilaksanakan setelah berakhirnya *Millenium Development Goals (MDGs)* setelah tahun 2015, terdapat disparitas antar negara berkembang dan negara sedang berlembang. Karena dihadapkan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi seringkali disertai dengan ketimpangan pendapatan dan diskriminasi sosial. Ketimpangan pendapatan dicerminkan dengan pembangunan sosial tidak merata, akses kepada layanan dan ketidaksetaraan antar generasi menimbulkan tantangan tersendiri dalam pembangunan berkelanjutan (Amekudzi et all, 2015).

Indonesia cukup berhasil mencapai berbagai target dalam tujuan pembangunan millennium (MDG) hingga tahun 2015 yaitu mengurangi kemiskinan, meningkatkan akses terhadap pendidikan dasar, dan mengurangi prevalensi penyakit tertentu. Namun ketimpangan pendapatan masih tinggi, serta kondisi masyarakat pribumi yang tinggal di daerah terpencil masih terus tertinggal. Bauran program sosial yang ada saat ini, termasuk bantuan tunai yang mesyaratkan kehadiran anak di sekolah serta program beras bersubsidi (*raskin*), belum tepat sasaran, meskipun pemanfaatan basis data terpadu sebagai basis data tunggal

yang membuat daftar keluarga kurang mampu seharusnya dapat mengatasi persoalan tersebut (OECD, 2013).

Pasar domestik Indonesia yang besar, prospek pertumbuhan ekonomi, kekayaan sumber daya alam dan melimpahnya tenaga kerja berbiaya murah menjadikan Indonesia sebenarnya menjadi tempat tujuan yang menarik bagi investor (Hornberger, 2011). Di tengah keadaan internasional yang sedang sulit, arus masuk investasi Indonesia meningkat cukup besar dalam beberapa tahun terakhir, meskipun masih lebih rendah bila dibandingkan di sejumlah negara lain (IMF, 2016).

Uni Eropa adalah investor terbesar kedua dalam perekonomian Indonesia sekaligus mitra dagang terbesar ke empat, dengan porsi hampir 10 % dari seluruh perdagangan luar negeri Indonesia. Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa (*IE-CEPA, Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement*) telah tertunda cukup lama, tetapi dengan adanya kemauan politik yang baru dari pemerintah Indonesia diperkirakan dapat membuat kesepakatan ini rampung pada tahun 2019, Indonesia dan Uni Eropa telah menandatangani, tetapi belum meratifikasi *Forest Law Enforcement Governance and Trade (FLEGT)*, yang akan membantu Indonesia memperoleh lisensi untuk mengekspor kayu dan produk hutan lainnya dari sumber yang legal ke Eropa. Pada bulan Maret 2016, Australia dan Indonesia memulai kembali perundingan *Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA)*, yang

mencakup kerjasama di bidang perdagangan, investasi, dan ekonomi (OECD, 2016).

Meskipun kemajuan luar biasa telah dicapai dalam 50 tahun terakhir, termasuk dalam mencapai tujuan pembangunan millennium (MDGs), Indonesia masih tertinggal dari banyak negara berpenghasilan menengah lainnya (seperti 1.4 % di India; 2.1 % di Cina; 2.8 % di Brasil; dan 3.1 % di Afrika Selatan) dari segi indikator pembangunan, termasuk kesehatan (angka kematian dan kekerdilan), kemiskinan, dan capaian pendidikan. Penggunaan dana publik secara lebih baik akan sangat meningkatkan efektifitas kebijakan pemerintah dan memberikan ruang fiskal untuk mengembangkan lebih lanjut bidang pengeluaran yang saat ini kurang mendapat pendanaan; misalnya anggaran layanan kesehatan publik yang hanya mencapai sekitar 1 % PDB di tahun 2015, walaupun pemerintah telah menambah alokasi anggaran kesehatan menjadi 5 % dari keseluruhan pengeluaran publik di tahun 2016 dalam konteks adanya keterbatasan penerimaan pemerintah (OECD, 2016).

Desentralisasi secara drastis (*big-bang decentralization*) yang mengiringi terbentuknya demokratisasi yang terbukti sangat populer dan telah mendekatkan pemerintah dengan rakyat. Dan praktek demokratisasi ini melalui desentralisasi pada tahun 2001 dan tahun 2005 di Indonesia, yang sebagian besar terjadi karena alasan politis, melimpahkan sejumlah besar dana dan wewenang kepada pemerintah daerah, termasuk tanggung jawab penyelenggaraan dan pemberian berbagai layanan publik serta pengaturan dunia usaha dan sumber daya alam. Dasar pemikiran

bagi desentralisasi pemerintah adalah akuntabilitas dan pemberian layanan yang lebih baik melalui peningkatan kecepatan daya tanggap terhadap kebutuhan setempat (Faguet, 2014), yang sering disebut sebagai prinsip subsidiaritas. Selain itu, desentralisasi dapat meningkatkan kinerja dengan jalan mendorong persaingan di antara berbagai daerah untuk menyediakan layanan secara efisien dan untuk menarik dunia usaha daerah dapat belajar satu sama lain dan memperoleh manfaat dari penerapan praktik (OECD, 2013).

Namun demikian, otonomi daerah di Indonesia belum menghasilkan perbaikan yang diharapkan (Resosudarmo et al, 2014; Buehler, 2010); Moeliono et al, 2009; World Bank, 2011). Heterogenitas capaian ekonomi dan sosial masih besar. Hal ini terjadi meskipun transfer dana dari pemerintah pusat terus meningkat. Sehingga nilai transfer tersebut kini mencapai setengah dari APBN (dikurang subsidi dan pembayaran bunga utang sekitar 1% PDB (OECD, 2016).

Walaupun Indonesia kaya akan berbagai macam sumber daya alam, yang menghasilkan setengah dari pendapatan ekspor dan seperempat PDB sebelum terjadinya penurunan harga komoditas. Namun, eksploitasi sumber daya alam, tersebut memunculkan sejumlah kosekuensi yang penting. Misalnya upaya mengatasi perubahan iklim berarti bahwa sejumlah cadangan bahan bakar fosil Indonesia (terutama bahan bakar fosil) setidaknya sampai teknologi tidak banyak mengakibatkan polusi. Emisi gas rumah kaca per unit keluaran di Indonesia masih relatif rendah. Tetapi perlu turun cukup banyak demi

memenuhi target penurunan emisi sebesar 29 % dari angka proyeksi *business as usual* (tanpa melakukan apapun) pada tahun 2030 (dan sebesar 41 % dengan bantuan internasional) (World Bank, 2015).

Antara Juni dan Oktober 2015, terjadi kebakaran besar di hutan alam dan lahan gambut yang mengancam keanekaragaman hayati luar biasa di Indonesia. Pada tahun itu, sekitar 2 juta hektar lahan terbakar, memakan biaya sebesar US \$ 16.1 milyar bagi pihak Indonesia (diperkirakan oleh Marlier et al, 2013) dan berdampak terhadap 75 juta orang di enam negara (diprediksi oleh Stolle & Tomich, 1999). Pengurangan emisi yang berkaitan dengan kebakaran hutan menjadi bagian yang signifikan dari pengurangan emisi gas rumah kaca Indonesia (World Bank, 2015). Membakar lahan adalah cara yang murah dan sering digunakan untuk membuka lahan agar dapat ditanami tanaman panen, terutama kelapa sawit dan tanaman kayu. Kepemilikan lahan yang tidak jelas juga menjadi menjadi faktor penyumbang masalah, karena daerah yang dibakar tersebut dikuasai secara ilegal. Membuka lahan dengan cara dibakar sudah dilarang tetapi penegakan larangan tersebut sulit dilakukan karena tanggung jawab atas hal tersebut tersebar di berbagai tingkat pemerintah, lemahnya kapasitas di tingkat daerah, dan kecilnya denda yang dikenakan (OECD, 2015).

Melihat argumentasi di atas, maka penelitian ini mengkomodasikan dimensi pembangunan berkelanjutan dalam tiga pilar dimensi keberlanjutan yakni dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan terhadap indikator pembangunan nasional dengan menggunakan indeks

pembangunan berkelanjutan pada propinsi yang terpilih di Indonesia. Agar pembangunan berkelanjutan mampu menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan di Indonesia secara kompleks. Oleh karena itu, penulis merangkumnya dalam judul "**Analisis Pembangunan Berkelanjutan pada Propinsi Penghasil Tambang di Indonesia**".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka disusun pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh investasi swasta terhadap pembangunan berkelanjutan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui ketimpangan pendapatan dan kriminalitas pada propinsi penghasil tambang di Indonesia?
2. Apakah terdapat pengaruh dana bagi hasil sumber daya alam terhadap pembangunan berkelanjutan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui ketimpangan pendapatan dan kriminalitas pada propinsi penghasil tambang di Indonesia?
3. Apakah terdapat pengaruh demokrasi terhadap pembangunan berkelanjutan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui ketimpangan pendapatan dan kriminalitas pada propinsi penghasil tambang di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan mengukur seberapa besar pengaruh investasi swasta terhadap pembangunan berkelanjutan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui ketimpangan pendapatan dan kriminalitas pada propinsi penghasil tambang di Indonesia.
2. Untuk menganalisis dan mengukur seberapa besar pengaruh dana bagi hasil sumber daya alam terhadap pembangunan berkelanjutan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui ketimpangan pendapatan dan kriminalitas pada propinsi penghasil tambang di Indonesia.
3. Untuk menganalisis dan mengukur seberapa besar pengaruh demokrasi terhadap pembangunan berkelanjutan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui ketimpangan pendapatan dan kriminalitas pada propinsi penghasil tambang di Indonesia.

1.4 Kegunaan dan Signifikansi Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah penelitian dan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka secara umum kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang analisis pembangunan berkelanjutan pada propinsi penghasil tambang di Indonesia.

Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat, 1) mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan berkelanjutan di propinsi penghasil tambang di Indonesia, 2) mengetahui model persamaan regresi pola analisis pembangunan berkelanjutan di propinsi penghasil tambang

di Indonesia, dan 3) dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pembuatan kebijakan dalam rangka mengambil keputusan kebijakan tentang pembangunan berkelanjutan.

Sebagai karya akademik, hasil kajian pembangunan berkelanjutan ini menjadi bentuk kontribusi nyata dalam pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan khususnya yang terkait dengan konsep dan perkembangan teori dalam ilmu ekonomi, ekonomi pembangunan dan ekonomi regional serta keberlanjutan pembangunan.

Adapun hasil penelitian ini diharapkan menjadi rujukan ataupun referensi pembanding bagi peneliti-peneliti berikutnya yang bermaksud ingin melakukan penelitian yang terkait dengan masalah pembangunan berkelanjutan serta untuk karya ilmiah.

Selain kedua kegunaan yang telah dijelaskan sebelumnya, hasil penelitian ini juga diharapkan menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan-kebijakan dan program-program pembangunan yang terkait dengan keberlanjutan pembangunan.

Penelitian ini membahas mengenai pembangunan berkelanjutan terhadap indikator penyusunnya dalam dimensi ekonomi, sosial, politik dan lingkungan yakni investasi swasta, dana bagi hasil sumber daya alam, demorasi, ketimpangan pendapatan dan kriminalitas. Pendekatan yang digunakan untuk mendukung penelitian ini adalah teori ekonomi, teori ekonomi pembangunan, teori fiskal, teori ekonomi politik dan teori ekonomi sosiologi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori Pembangunan Berkelanjutan

2.1.1 Konsep Pemikiran Pembangunan Berkelanjutan dalam Dimensi Ekonomi

Financial Times Leksikon mendefinisikan keberlanjutan ekonomi merupakan keberlanjutan pertumbuhan tanpa menyebabkan masalah ekonomi dan lingkungan. Karena istilah keberlanjutan ekonomi pertama kali diperkenalkan oleh klub Roma, sebuah asosiasi ilmuwan internasional, eksekutif bisnis, pejabat publik dan sarjana. Dalam laporannya "*the limits to growth*" pada tahun 1972 yang membantah gagasan pertumbuhan yang kontras antara masa kini dengan masa lalu, dan melihat masa depan sebagai kemungkinan berkelanjutan untuk pertumbuhan dan peningkatan lebih lanjut karena diakui adanya kegagalan terhadap keterbatasan sumber daya sehingga pertumbuhan berdasarkan sumber daya tidak dapat terbatas. Berdasarkan laporan ini diperoleh model output yang mewakili sistem di dunia berupa keberlanjutan tanpa mendadak dan tidak terkendali serta kemampuan untuk memuaskan seluruh kebutuhan dasar rakyatnya (Meadows et al, 1972).

Teori berkelanjutan kemudian telah menjadi agenda global sejak diadopsi pada Rio Summit tahun 1992, dan mengemukanya *concern* terhadap perubahan iklim. Implikasi dari keduanya kemudian melahirkan

teori-teori pembangunan baru seperti "*green economy*" atau ekonomi hijau. Teori ekonomi hijau ini lebih menekankan pembangunan yang bersifat rendah karbon dan pertumbuhan yang inklusif. Strategi pembangunan rendah emisi atau sering dikenal juga dengan *Low Emission Development Strategy* (LEDS), bahkan telah diadopsi pada COP (*Conferences of Parties*) ke-15 di Copenhagen, Denmark tahun 2009. Dalam dokumen *Copenhagen Accord*, LEDS diadopsi menjadi bagian yang tidak terpisahkan (*indispensable*) dari pembangunan berkelanjutan. Di sisi lain teori ekonomi hijau juga menghasilkan konsep *inclusive growth* atau pertumbuhan inklusif.

Pertumbuhan inklusif merupakan terjemahan lebih *implementing* dari konsep pembangunan berkelanjutan, di mana pertumbuhan inklusif selain harus bersifat sektor yang lebih luas (*broad base sector*), pertumbuhan ini juga harus bersifat *pro poor* dan berkelanjutan. Konsep pembangunan berkelanjutan selain mengandung kebutuhan dan keterbatasan juga mencakup tujuan (*goals*) dan *value* atau nilai. Untuk mencapai kedua hal tersebut yang menjadi tantangan adalah terkait dengan pengukuran. Walaupun meski konsep pembangunan berkelanjutan sering bersifat ambigu namun yang paling serius adalah mendefinisikan dan mengukur indikator pembangunan berkelanjutan itu sendiri. Saat ini secara global ada berbagai pendekatan yang digunakan untuk mengukur pembangunan berkelanjutan tersebut di antaranya adalah *Wellbeing Index*, *Environmental Sustainability Index*, dan *Ecological Footprint* (Kates et al, 2005).

Di sisi lain ada juga ukuran yang dikaitkan dengan indikator-indikator makro ekonomi seperti *Genuine Progress Indicator*, *Genuine Saving*, dan berbagai indikator makro lainnya. Pengukuran indikator ini juga sering dikaitkan dengan tujuan pembangunan jangka menengah dan jangka panjang. Misalnya saja *Millennium Development Goals* (MDGs) yang dicanangkan PBB terkait jangka waktu 15 tahun dan pengganti MDGs yang sudah berakhir tahun 2015 ini dengan konsep yang disebut *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang merupakan agenda pembangunan sampai dengan tahun 2030 mendatang.

Banyaknya keragaman dalam mengukur pembangunan berkelanjutan tersebut, karena setiap pendekatan mungkin lebih sesuai digunakan untuk tujuan tertentu dengan demikian tidak ada pendekatan yang sesuai untuk semua aspek (Amekudzi, *et al.*, 2015). Namun demikian setiap pendekatan pengukuran pembangunan berkelanjutan yang efektif selayaknya memenuhi beberapa kaidah dari kaidah-kaidah sebagai berikut (1) memenuhi definisi keberlanjutan yang jelas dengan tujuan yang terukur, (2) bersifat interdisiplin (ekonomi, sosial, lingkungan, dan sebagainya), (3) kemampuan membahas aspek jangka panjang atau *concern* antargenerasi, (4) kemampuan untuk mengelola ketidakpastian, (5) kemampuan untuk membahas interaksi lokal-global, (6) kemampuan untuk mengakomodasi partisipasi *stakeholder* (pemangku kepentingan), dan (7) kemampuan untuk mengadopsi, baik *process-based* atau *outcome-based* atau aspek statik dan aspek dinamik dari pembangunan berkelanjutan. Idealnya memang seluruh kaidah tersebut di atas dapat

dipenuhi, namun kendala ruang dan waktu sulit memungkinkan terpenuhinya semua kaidah di atas, sehingga memenuhi beberapa kaidah dari tujuh kaidah di atas sudah mencukupi untuk mengukur pembangunan berkelanjutan.

Dari uraian tersebut, nampak bahwa konsep pembangunan berkelanjutan yang awalnya cenderung abstrak, kemudian dijabarkan dalam beberapa konsep yang lebih operasional. Pertumbuhan inklusif dan pertumbuhan rendah karbon adalah jabaran operasional dari pembangunan berkelanjutan itu sendiri. Pembangunan berkelanjutan yang menempati hierarki tertinggi dalam konsep pembangunan yang berkualitas ini kemudian lebih dipersempit lagi menjadi konsep pertumbuhan inklusif yang menekankan pentingnya proses partisipatif dan keterlibatan pihak yang terpinggirkan dalam proses pembangunan. Semetara pertumbuhan rendah karbon merupakan hierarki yang lebih operasional lagi dengan menekankan pada pentingnya *input* dan *output* pembangunan yang tidak merusak lingkungan.

Pada bulan Agustus 2015, 193 negara menyepakati 17 tujuan yaitu: tujuan pertama adalah tanpa kemiskinan (pengentasan segala bentuk kemiskinan di semua tempat); tujuan kedua adalah tanpa kelaparan (mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan perbaikan nutrisi, serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan); tujuan ketiga adalah kehidupan sehat dan sejahtera (menggalakkan hidup sehat dan mendukung kesejahteraan untuk semua usia); tujuan keempat adalah pendidikan berkualitas (memastikan pendidikan

berkualitas yang layak dan inklusif serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang); tujuan kelima adalah kesetaraan gender (mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan); tujuan keenam adalah air bersih dan sanitasi layak (menjamin akses atas air dan sanitasi untuk semua); tujuan ketujuh adalah energi bersih dan terjangkau (memastikan akses pada energi yang terjangkau, bisa diandalkan, berkelanjutan dan modern untuk semua); tujuan kedelapan adalah pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi (mempromosikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif, lapangan pekerjaan dan pekerjaan yang layak untuk semua); tujuan kesembilan adalah industri, inovasi dan infrastruktur (membangun infrastruktur kuat, mempromosikan industrialisasi berkelanjutan dan mendorong inovasi); tujuan kesepuluh adalah berkurangnya kesenjangan (mengurangi kesenjangan di dalam dan di antara negara-negara); tujuan kesebelas adalah kota dan komunitas berkelanjutan (membuat perkotaan menjadi inklusif, aman, kuat, dan berkelanjutan); tujuan keduabelas adalah konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab (memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan); tujuan ketigabelas adalah penanganan perubahan iklim (mengambil langkah penting untuk melawan perubahan iklim dan dampaknya); tujuan keempatbelas adalah ekosistem laut (perlindungan dan penggunaan samudera, laut dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan); tujuan kelimabelas adalah ekosistem daratan (mengelola hutan secara berkelanjutan, melawan perubahan lahan menjadi gurun,

menghentikan dan merehabilitasi kerusakan lahan, menghentikan kepunahan keanekaragaman hayati); tujuan keenambelas adalah perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh (mendorong masyarakat adil, damai, dan inklusif); tujuan ketujuhbelas adalah kemitraan untuk mencapai tujuan (menghidupkan kembali kemitraan global demi pembangunan berkelanjutan).

2.1.2 Konsep Pemikiran Pembangunan Berkelanjutan dalam Dimensi Sosial

Pada keberlanjutan pembangunan ekonomi dan sosial tidak bisa dipisahkan dari kemiskinan dan ketidaksetaraan yang kemudian mendorong terjadi kriminalitas. Banyak negara berkembang yang terjebak dalam ikatan ganda masalah kemiskinan, ketidaksetaraan dan ketidaknyaman yang mengakar. Kejahatan dan keterbelakangan dibingkai sebagai kejahatan sosial yang terjalin dan saling menguatkan. Para kriminolog diminta untuk memberikan kontribusi pada agenda kebijakan internasional pembangunan berkelanjutan yang muncul melalui pengendalian kejahatan berbasis bukti (Dijk, 2014).

Ada banyak bukti tentang hubungan antara kemiskinan dan ketidaksetaraan dan tingkat kejahatan serius pada skala global. Dalam beberapa studi epidemiologis tingkat kekerasan yang dicatat polisi, termasuk kekerasan dalam rumah tangga mempunyai hubungan statistik dengan ketimpangan pendapatan (Fajnzylber et al, 2002, LaFree & Tseloni, 2006).

Dalam laporan pembangunan manusia UNDP dikatakan bahwa kemiskinan tidak hanya dinyatakan dalam kekurangan makanan, tempat tinggal dan pakaian. Hal ini juga dinyatakan dalam tingkat kejahatan yang tinggi termasuk kekerasan di kalangan orang miskin itu sendiri, terutama terhadap perempuan dan anak-anak, dalam banyak kasus disertai dengan penyalahgunaan obat-obatan. Karena ketidaksetaraan pendapatan cenderung lebih besar di negara-negara miskin, dimana lebih banyak orang menderita kemiskinan ekstrim sehingga dampak kemiskinan dan ketidaksetaraan pada kekerasan sulit untuk diatasi. Ketidaksetaraan pendapatan dan kemiskinan adalah dua sisi mata uang yang sama. (UNDP, 2013).

Di sisi biaya, tingkat kejahatan konvensional pertama-tama menambah biaya langsung terhadap dilakukannya bisnis di suatu negara. Kejahatan meningkatkan biaya bisnis baik melalui kehilangan barang langsung atau biaya mengambil tindakan pencegahan seperti menyewa penjaga keamanan, membangun pagar, atau memasang sistem alarm pencuri. Secara ekstrim perusahaan asing akan menolak untuk berinvestasi dan perusahaan domestik akan meninggalkan negara itu untuk tempat yang lebih damai. Dalam beberapa kasus kejahatan yang terorganisir yang merajalela juga dapat menghalangi wisatawan asing untuk mengunjungi negara tersebut. Masalah keamanan menjadi pertimbangan terpenting untuk memilih tujuan liburan (World Bank, 2011).

Selama dua dekade terakhir beberapa negara non-barat telah memberikan praktik terbaik dalam mengendalikan kejahatan dan korupsi.

Studi kasus masing-masing negara beragam (Jacobs, 1999 untuk New York AS; Orlando, 2001 untuk Palermo) Singapura, Botswana, Hongkong, dan Taiwan, yang mendokumentasikan kapasitas pemerintah lokal atau nasional untuk berhasilnya menangani organisasi yang kejahatan dan korupsi yang terorganisir agar mendorong pertumbuhan ekonomi.

Contoh lain dari negara yang telah meningkatkan ekonominya dengan menghancurkan kejahatan terorganisir adalah Georgia. Administrasi mantan presiden Shaakashvili melancarkan kampanye besar dan berkelanjutan terhadap mafia Georgia dan pejabat korup antara tahun 2005 dan 2011. Meskipun Shaakashvili sejak itu terpilih dan dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia, efek menguntungkan dari inisiatif anti-kejahatannya tentang keselamatan dan pengembangan publik tidak dapat diragukan (World Bank, 2013). Di beberapa negara individu investasi yang ditargetkan dalam mengendalikan kompleks kejahatan-korupsi yang terorganisir tampaknya telah terbayar dalam hal keselamatan publik dan pembangunan berkelanjutan (Dijk & Chanturia, 2012).

Adanya sejarah panjang ketidakpercayaan antara perusahaan tambang dengan komunitas lokal membuat terkendalanya keberlanjutan sosial dalam pembangunan berkelanjutan. Masyarakat menuntut hak mereka secara tegas, dan baik pemerintah maupun perusahaan pertambangan belum sepenuhnya mampu atau siap untuk bereaksi, meskipun ada relevansi tuntutan. Perusahaan pertambangan sering menghadapi tuntutan paling luas di daerah-daerah di mana lembaga

negara lemah. Beberapa perusahaan bahkan dipaksa untuk mengambil tanggung jawab baru untuk melestarikan penerimaan sosial penduduk setempat terhadap penambangan. Asumsi ini oleh perusahaan tanggung jawab pemerintah berubah, dengan gerakan yang dibuat menuju pemahaman tentang pentingnya lembaga lokal. Partisipasi masyarakat dan hak-hak masyarakat juga telah diakui lebih baik, ini telah diklaim telah mengubah hubungan antara masyarakat dan perusahaan. Untuk pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan masyarakat dan menggunakan LSM sebagai konsiliator untuk perselisihan. Distribusi manfaat dari penambangan harus diselesaikan melalui proses kerja sama dan dianggap sebagai kesepakatan antara pemerintah dan perusahaan pertambangan. Sepanjang garis, perencanaan harus sebanding dengan kapasitas untuk mengimplementasikan tindakan yang disarankan, yang harus diputuskan dengan mempertimbangkan karakteristik daerah tertentu, masyarakat, pemerintah, dan layanan. Ini adalah tugas yang sangat sulit dan terutama menuntut sehubungan dengan struktur pemerintah, karena pembangunan berkelanjutan bersifat lintas sektoral, sementara keputusan politik biasanya tidak dapat mengambil bidang sosial, ekonomi, dan ekologi sama-sama menjadi pertimbangan (Von Ciriacy & Wantrup, 1952).

Hak dan keadilan partisipatif saat ini dianggap penting untuk pengembangan masyarakat. Pada saat yang sama, industri pertambangan dunia membutuhkan praktik-praktik baru. Produksi informasi dan akses terhadap informasi terkait erat dengan keadilan sosial

dan kapasitas individu untuk membela hak mereka atas sumber daya. Peningkatan kerjasama dan pemahaman yang lebih dekat antara semua peserta selama proses pengambilan keputusan dapat lebih baik dicapai dengan memperhatikan proses pembuatan informasi. Informasi harus mudah diakses tetapi juga dapat dipahami oleh semua yang terlibat, seharusnya tidak menciptakan ketidaksetaraan, tetapi harus memuluskan perbedaan antara para peserta. Sebagai kesimpulan, komunikasi dan informasi harus sedemikian rupa sehingga semua aktor dapat mengambil bagian dalam diskusi tentang proses pengambilan keputusan sehingga menjadi lebih setara: resolusi yang dihasilkan akan lebih berkelanjutan. Akses yang sama terhadap informasi sebagian besar didasarkan pada peningkatan komunikasi antara perusahaan dan masyarakat (Kitula, 2006)

2.1.3 Konsep Pemikiran Pembangunan Berkelanjutan dalam Dimensi Lingkungan

Selama 50 tahun terakhir telah dapat dibuktikan bahwa pemanasan global yang sekarang ini kita rasakan terjadi terutama karena ulah manusia sendiri. Emisi dari gas-gas rumah kaca seperti CO₂ dan N₂O dari aktivitas manusia adalah penyebabnya. Konsentrasi gas CO₂ di atmosfer naik 30% selama 150 tahun terakhir. Kenaikan jumlah emisi CO₂ ini terutama disebabkan karena pembakaran sumber energi dari bahan fosil (antara lain minyak bumi). Selain itu, perubahan dalam penggunaan sumber daya alam lainnya juga memberikan kontribusi pada kenaikan jumlah CO₂ di atmosfer: 15% oleh penggundulan dan pembakaran hutan

dan lahan untuk diubah fungsinya (misalnya dari hutan lindung menjadi hutan produksi) (WRI, 2000).

Masalah ekologi lainnya adalah degradasi tanah atau hilangnya kesuburan tanah. Ini dapat diakibatkan oleh erosi akibat air dan angin, penggaraman dan pengasaman tanah, dan sebagainya. Penyebab hilangnya kesuburan tanah lainnya adalah hilangnya lapisan humus dan mikro organisme, zat makanan pada tanah, dan kemampuan tanah menguraikan sampah/limbah. Tanah yang tandus (kering) adalah akibat dari degradasi sumber daya tanah seperti yang sudah lama terjadi pada beberapa daerah tandus di Indonesia, seperti di Jawa pada daerah Gunung Kidul, Yogyakarta. Di seluruh dunia, 15% tanah mengalami degradasi. Selain diakibatkan erosi oleh air dan angin, degradasi tanah ini juga disebabkan oleh penggunaan zat-zat kimia (pestisida). Terancamnya kelestarian ekosistem dan keanekaragaman hayati oleh tangan manusia juga menjadi masalah ekologi lainnya. Setiap tahunnya 6000 jenis hewan punah yang terdiri dari 13% unggas, 25% mamalia, dan 34% ikan. Hilang atau punahnya keanekaragaman biologis tidak hanya berarti sumber daya alam yang tidak ternilai yang dapat digunakan untuk obat-obatan dan tempat rekreasi hilang, tapi juga mengancam keberlangsungan ekosistem secara keseluruhan, mengancam kemampuan alam sebagai penyedia sumber daya untuk produksi (fungsi ekonomis) dan dalam melakukan fungsi regulasinya (UNDP, BPS & Bappeda, 2002).

Konsumsi air dari tahun ke tahun juga terus bertambah sejalan dengan pertumbuhan jumlah penduduk, industri dan usaha-usaha di

sektor pertanian. Dari total konsumsi air di seluruh dunia, sekitar 70% digunakan untuk memenuhi kebutuhan sektor pertanian. Pencemaran air dan tanah semakin memperburuk ketersediaan air bersih bagi kelangsungan hidup manusia. Pencemaran air dan tanah ini terutama disebabkan oleh penggunaan pupuk dan pestisida untuk pertanian dan perkebunan (WRI, 2000).

2.1.4 Konsep Pemikiran Pembangunan Berkelanjutan dalam Dimensi Politik

Menurut Miriam Budiardjo (1998), seorang ilmuwan politik Indonesia senior, menyatakan bahwa bahkan meskipun ada banyak definisi politik yang dibentuk oleh banyak sarjana, ada lima konsep utama ilmu politik sebagai berikut: politik sebagai konsep negara, politik sebagai konsep kekuatan, politik sebagai konsep pengambil keputusan, politik sebagai konsep kebijakan, dan politik sebagai konsep distribusi (alokasi).

Politik sebagai negara mempunyai konsep bahwa negara adalah organisasi di tempat tertentu yang memiliki kekuatan sah tertinggi dan dipatuhi oleh rakyatnya. Dalam konsep ini, para cendekiawan menekankan negara sebagai pusat politik dan memberikan perhatian yang kuat kepada institusi resmi negara, oleh karena itu konsep ini juga dikenal sebagai "pendekatan institusional". Roger F. Soltau dalam "Pengantar Politik" menyatakan: "Ilmu politik adalah studi tentang negara, tujuan dan institusi yang melaluinya ini akan direalisasikan, hubungannya dengan anggota individu, dan negara-negara lain "(Budiardjo, 1998).

Politik sebagai konsep kekuatan bermaksud bahwa kekuatan adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi perilaku orang lain atau kelompok untuk mematuhi dan sejalan dengan ide atau tujuannya. Isu sentral dari konsep ini adalah melihat politik sebagai proses bagaimana mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan, atau juga disebut dengan perebutan kekuasaan. Fokus perhatian para ilmuwan politik berpusat pada perjuangan untuk mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan, untuk menjalankan kekuasaan atau pengaruh atas orang lain, atau untuk melawan latihan itu (Budiardjo 1998).

Politik sebagai konsep pengambilan keputusan berarti pengambilan keputusan mengacu pada proses membuat atau memilih dari alternatif. Titik sentral dalam konsep ini adalah melihat politik sebagai proses pengambilan keputusan untuk mencapai satu konsensus yang dipegang oleh masyarakat secara kolektif dan orang-orang dalam masyarakat harus menghormati setiap keputusan yang mereka buat bersama. Joyce Mitchell menulis dalam "Analisis Politik dan Kebijakan Publik," "Politik adalah pengambilan keputusan kolektif atau pembuatan kebijakan publik untuk seluruh masyarakat" (Budiardjo, 1998).

Politik sebagai konsep kebijakan mengandung arti kebijakan adalah kumpulan keputusan yang telah diambil dan disusun oleh seseorang atau kelompok untuk merumuskan dan memutuskan beberapa tujuan / sasaran dan strategi atau langkah untuk mencapai tujuan / sasaran tersebut. Para sarjana di bidang ini percaya bahwa setiap masyarakat memiliki

kepentingan/golnya sendiri. Dan untuk mencapai tujuan ini, masyarakat harus memiliki kerja sama antara anggota yang memiliki otoritas yang sah (dalam konteks ini pemerintah) untuk merumuskan konsensus yang harus ditulis sebagai kebijakan hukum. David Easton memandang bahwa ilmu politik adalah studi tentang pembuatan kebijakan publik. Lebih jauh, Easton menyatakan dalam "Sistem Politik," "Kehidupan politik menyangkut semua jenis kegiatan yang mempengaruhi secara signifikan kebijakan otoritatif yang diadopsi untuk masyarakat dan cara mempraktikkannya. Kami dikatakan berpartisipasi dalam kehidupan politik ketika kegiatan kami terkait dalam beberapa cara untuk pembuatan dan pelaksanaan kebijakan untuk masyarakat." (Budiardjo 1998).

Politik sebagai konsep distribusi/alokasi berarti distribusi/alokasi adalah pemberian atau transfer porsi/bagian nilai dalam masyarakat. Para sarjana yang menekankan politik sebagai masalah bagaimana mencapai pandangan distribusi yang sangat adil bahwa konflik utama yang mungkin terjadi dalam masalah ini adalah ketika distribusi / alokasi telah ditetapkan tidak adil atau ketidakseimbangan. Dan penelitian dan audit pada kekuatan penguasa dan kebijakan pemerintah adalah faktor paling penting untuk menemukan di mana titik lemah dari distribusi yang tidak adil. Harold Laswell memandang politik dalam perspektif yang sangat sederhana seperti dalam sudut pandangnya, politik hanyalah masalah siapa yang mendapat apa, kapan dan bagaimana (Budiardjo 1998).

Keberlanjutan dimensi politik tidak terlepas dari seberapa besar kasus penyelesaian korupsi. Persoalan pemberantasan korupsi

merupakan agenda besar bangsa Indonesia yang belum tuntas dalam beberapa tahun bahkan dekade yang akan datang (Haryadi, 2014). Bahkan korupsi telah menjangkiti berbagai lini kekuasaan baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif (Danil, 2011).

Perencanaan pemberantasan korupsi yang telah dibuat dalam berbagai perundang-undangan merupakan model pembangunan yang bersifat teknokrat yang telah dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya, akan berhadapan dengan model perencanaan pembangunan politik yang dituangkan oleh Presiden Jokowi dalam RPJM 2014-2019 (Risnain, 2014). Jika tidak sinkronisasi akan berdampak negatif bagi upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Program politik pemberantasan korupsi Presiden Jokowi-JK dengan nama Nawacita harus mampu menuangkannya dalam RPJM yang diselaraskan dalam program pembangunan hukum. Untuk menjamin kesinambungan politik hukum pemerintahan maka diperlukan koordinasi antar berbagai instansi pemerintah (Ardiwisastra, 2010).

2.2 Tinjauan Teoritis Hubungan Antar Variabel Eksogen dan Endogen

2.2.1 Hubungan Teoritis Investasi Swasta dan Pembangunan

Berkelanjutan

Ketika menganalisis teori yang mendasari antara investasi swasta dengan pembangunan berkelanjutan tidak terlepas dari teori perdagangan internasional. Hal ini didasari pada model Heckscher-Ohlin dimana investasi swasta dalam bentuk modal asing (*foreign direct investment/FDI*)

harus mengambil keuntungan dari para pekerja yang berketerampilan rendah di negara berkembang yang pada gilirannya mengurangi dispersi upah dan ketidaksetaraan pendapatan dalam perkenomian dalam negeri. Proses sebaliknya terjadi di negara maju yang merupakan sumber FDI memberikan peningkatan ketimpangan pendapatan (Mihaylova, 2015).

Penetrasi investasi asing dapat mengarah pada hasil yang berlawanan dengan yang diprediksi oleh Teorema Stolper-Samuelson, yaitu peningkatan dalam permintaan tenaga kerja terampil dan peningkatan ketimpangan pendapatan (Lee dan Vivarelli, 2006).

Menurut model Feenstra-Hanson (1997), arus masuk investasi meningkatkan ketidaksetaraan pendapatan baik di negara pemberi maupun penerima investasi. Hal ini didasari dalam hal pasar tenaga kerja di negara berkembang tidak memerlukan keterampilan intensif seperti di negara maju sehingga melalui transfer teknologi di negara maju mungkin padat keterampilan dalam hal pasar tenaga kerja di negara penerima.

Di tambah lagi dengan adanya liberalisasi pasar tenaga kerja domestik pada globalisasi yang sering disertai dengan kebijakan yang berorientasi pasar atau privatisasi perusahaan milik negara yang mungkin juga menyebabkan ketimpangan pendapatan yang lebih tinggi di negara tuan rumah (pemberi investasi) (Milanovic, 2003).

Dalam teori modernisasi ekonomi neoklasik yang dikemukakan oleh Rostow (1960), mengasumsikan bahwa negara-negara maju dari tradisionalisme ke modernitas dilakukan secara bertahap. Bahwasanya ekonomi yang kurang berkembang dapat bertemu dengan ekonomi maju

mengalir dengan sendirinya melalui integrasi ke dalam ekonomi dunia. Para pendukung teori modernisasi berpendapat bahwa investasi swasta dalam bentuk modal asing (*foreign direct investment/FDI*) menghasilkan berbagai efek langsung positif bagi ekonomi dalam negeri, transfer teknologi, keahlian dan keterampilan manajerial, penciptaan lapangan kerja, peningkatan kompetisi, produktivitas, dan pertumbuhan. Kaitannya dengan adanya ketimpangan, ini dianggap sebagai prasyarat yang diperlukan untuk peningkatan pendapatan masing-masing individu. Hal ini sejalan dengan hipotesis "Kurva Kuznets Terbalik", yang menyatakan bahwa ketimpangan pendapatan meningkat pada tahap awal pembangunan tetapi kemudian menurun setelah tahap pembangunan tertentu tercapai. Distribusi investasi swasta mendorong pertumbuhan dan manfaatnya akhirnya tersebar ke seluruh aspek ekonomi. Pada awalnya pertumbuhan investasi terbatas pada para pekerja menerima upah yang lebih tinggi, maka dalam jangka panjang pertumbuhan di sektor-sektor utama memiliki potensi dalam penurunan ketimpangan pendapatan (Mihaylova, 2015).

Investasi swasta dalam suatu yang melibatkan investor dapat menjadi kriminal ekonomi karena diduga terjadi sengketa antara investor dengan negara. Dimana kejahatan atau kriminalitas ekonomi merupakan kejahatan tanpa kekerasan yang mengakibatkan kerugian finansial sehingga mengakibatkan investasi swasta memicu kriminalitas (Kryvoi, 2005).

Investigasi dan penuntutan atas kejahatan ekonomi dapat melanggar kewajiban internasional dalam bentuk obligasi internasional sehingga menimbulkan tuntutan hukum terhadap investor. Selain itu, perwakilan negara dapat terlibat dalam kejahatan ekonomi seperti penyuapan atau pencucian uang (Schneider, 1987).

Jenis-jenis kriminalitas atau kejahatan ekonomi yang muncul dalam perselisihan antara investor dengan negara meliputi penyuapan, penggelapan pajak, bank, penipuan akuntansi dan sekuritas (Bosworth & Saltmarsh, 1995). Karena tuduhan pencucian uang terjadi dalam konteks klaim atas hasil kejahatan, penjualan asset palsu, penjualan barang-barang mahal yang disengaja, dan penipuan penggantian biaya (The Rompetrol Group, 2013).

Negara juga dapat memulai proses pidana sebagai tindakan defensif (misalnya untuk menghindari yurisdiksi atau sebagai bentuk pembalasan) dan ilegalitas hanya dapat digali ketika klaim diajukan terhadap negara. Inisiasi investigasi kriminal adalah tindakan berdaulat, tetapi jika proses tersebut melanggar standar hukum internasional, negara dapat bertanggung jawab untuk membayar ganti rugi (Quiborax, 2010).

Adapun antara investor dengan pengadilan negara domestik harus memutuskan pada awal apakah mereka memiliki yurisdiksi dalam kasus-kasus di mana investasi yang mendasarinya diperoleh dengan cara ilegal, seberapa jauh mereka harus memeriksa dugaan kejahatan ekonomi, dan berapa batasan rasa hormat mereka terhadap proses dan keputusan pengadilan domestik (LaFree & Tseloni, 2006)).

Korupsi tetap menjadi perhatian utama hukum bagi investor yang memutuskan di mana akan berinvestasi. Selama dua dekade terakhir, komunitas internasional telah memberikan perhatian yang semakin besar untuk menangani kejahatan ekonomi, termasuk dalam konteks investasi asing di tingkat regional dan global. Selain konvensi internasional multilateral memerangi kejahatan ekonomi, beberapa negara baru-baru ini menyimpulkan perjanjian investasi bilateral dengan ketentuan yang secara tegas ditujukan pada pencegahan kejahatan ekonomi (Godson, 2003).

Kriminal ekonomi, seperti suap, sangat sulit dibuktikan. Konsep hukum tentang beban pembuktian membantu menyelesaikan ketidakpastian dan mendorong banyak pihak untuk menghadirkan bukti untuk mendukung klaim investasi mereka. Dibandingkan dengan pengadilan domestik, antara investor dengan pengadilan negara tidak memiliki alat dan kekuatan untuk menyelidiki kejahatan dengan benar dan mengandalkan pengajuan para pihak yang bersengketa. Beberapa pengadilan menghindari memeriksa secara rinci dugaan kejahatan ekonomi, seperti pencucian uang, karena kurangnya bukti (Yukos Universal, 2009).

Namun ada juga bukti kuat dan substansial dari keterlibatan aktif investor dalam dugaan kejahatan ekonomi, untuk memutuskan apakah klaim tersebut dapat dikalahkan karena 'perlindungan investasi tidak dimaksudkan untuk memberi manfaat kepada penjahat (Vogenauer & Kleinheisterkamp, 2009).

Dalam memfasilitasi kepastian hukum mengenai efek penyusunan, pencucian uang dan kejahatan ekonomi lainnya dalam hukum investasi internasional, perjanjian harus memasukkan ketentuan tentang dampak kejahatan ekonomi. Negara juga dapat mengeluarkan pernyataan interpretatif bersama pada perjanjian yang telah disimpulkan sebelumnya, atau mengganti perjanjian lama dengan perjanjian bilateral modern, baik satu per satu atau melalui perjanjian regional (Hindelang & Kryvoi, 2017).

Menurut Brown et al (1993) berpendapat bahwa investasi sebenarnya dapat membantu mengurangi ketimpangan pendapatan saat diterapkan pemanfaatan tenaga kerja tidak terampil yang berpendapatan rendah. Hal ini mengakibatkan dengan adanya peningkatan investasi menaikkan pendapatan golongan rendah.

Tsai (1995) juga berpendapat bahwasanya investasi merangsang pertumbuhan ekonomi dan manfaat akhirnya menyebar ke seluruh ekonomi. Wood (1995) berpendapat bahwa dengan investasi baru menciptakan tempat kerja baru bagi tenaga kerja berketerampilan rendah. Dan Paolo (2006) terjadinya efek non-linear saat investasi meningkat maka ketimpangan upah meningkat dan efek akan berkurang dengan peningkatan lebih lanjut dalam investasi.

2.2.2 Hubungan Teoritis Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam dan Pembangunan Berkelanjutan

Menurut Musgrave dalam Bratakusumah (2002) penyelenggara pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah, menjalankan paling sedikit

tiga fungsi utama dalam pembiayaan publik yaitu, fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Dalam rangka menjalankan fungsi distribusi, pemerintah umumnya menggunakan instrumen transfer.

Transfer bertujuan untuk pemerataan atau mengurangi ketimpangan baik secara vertikal (antara pusat dan daerah) maupun horisontal (antar daerah), memperbaiki eksternalitas spasial di perbatasan wilayah, mengarahkan prioritas pembangunan, dan mendorong lahirnya ide-ide baru dari daerah (Ulbrich, 2003).

Pelaksanaan transfer di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan menurut Undang-undang tersebut terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Secara umum DBH dan DAU digolongkan ke dalam bentuk transfer tidak bersyarat (*unconditional transfer*), sedangkan DAK digolongkan ke dalam bentuk transfer bersyarat (*conditional transfer*).

Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu dengan memperhatikan potensi daerah penghasil yang bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Nilai yang tinggi serta porsi terbesar diberikan kepada daerah penghasil, kecuali minyak dan gas bumi. Dana

bagi hasil sumber daya alam selama ini menjadi sumber penerimaan utama bagi daerah yang kaya dengan sumber daya alam. Ditambah dengan sifat transfer yang tidak bersyarat, pemerintah daerah dapat menggunakan dana tersebut sesuai dengan prioritas daerah (Wilhelm & Fiestas, 2005).

Penggunaan dana bagi hasil sumber daya alam dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat ditentukan oleh alokasi pengeluaran pemerintah. Prinsip utama dalam mengalokasikan pengeluaran pemerintah adalah didasarkan pada kebutuhan mengatasi kegagalan pasar guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi, serta memperbaiki distribusi pendapatan guna mengurangi kemiskinan. Sehingga pada akhirnya akan membuat hubungan yang tingginya anggaran pengeluaran pemerintah untuk sumber daya alam akan mengurangi ketimpangan pendapatan (Wilhelm & Fiestas, 2005).

Pengeluaran pemerintah dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan melalui dua cara, yaitu meningkatkan kinerja pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, dan meningkatkan kesempatan orang miskin untuk berkontribusi pada proses pertumbuhan ekonomi melalui penguatan sumber daya manusia dan pengurangan biaya transaksi. Namun umumnya yang digunakan selama ini adalah pengeluaran pemerintah yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, dimana pengurangan kemiskinan lebih mengharapkan pada dampak tidak langsungnya melalui pertumbuhan ekonomi. Sehingga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan

pengurangan kemiskinan menjadi tantangan dan permasalahan yang sangat penting bagi pemerintah dalam menentukan pengeluarannya (Wilhelm & Fiestas, 2005).

Menurut Lisna dkk (2014) bahwasanya pemerintah daerah yang memiliki dana bagi hasil lebih besar dapat mencapai pertumbuhan *pro-poor* yang berdampak besar menurunkan kemiskinan terutama di kelompok penduduk miskin pertanian. Jika penerimaan dari transfer DAU dialokasikan lebih besar untuk belanja perindustrian maka akan berdampak besar menurunkan *headcount index* pertanian melalui peran PDRB industri pengolahan berbasis pertanian seperti industri makanan jadi. Dengan demikian, kebijakan peningkatan dana bagi hasil sebagai salah satu komponen kapasitas fiskal yang selanjutnya dialokasikan lebih besar untuk belanja-belanja sektor riil terutama pertanian dan perindustrian berdampak besar menurunkan tingkat kemiskinan pertanian sebagai kantong kemiskinan terbesar di Indonesia sehingga dapat mempercepat laju penurunan kemiskinan nasional. Dengan demikian terjadinya peningkatan dana bagi hasil mempercepat menurunkan ketimpangan pendapatan.

2.2.3 Hubungan Teoritis Demokrasi dan Pembangunan Berkelanjutan

Menurut Lothering & Elkington (2008) bahwa demokrasi liberal tidak mampu mengelola dan memberikan keberlanjutan pembangunan secara memadai karena terjadi inkoherensi kebijakan, kelembaman

struktur demokrasi dan ketidakpercayaan terhadap politik dan proses politik.

Aspinal (2014) menyebutkan bahwa adanya pengaruh yang positif antara demokrasi terhadap menurunnya ketimpangan pendapatan. Ditambah lagi Mietzner (2012) juga berpendapat senada bahwasanya dalam tahun politik menjelang pemilihan umum, paham demokrasi telah menurunkan ketimpangan pendapatan. Ketimpangan pendapatan mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam pembangunan berkelanjutan.

Adapun bentuk pemerintahan memaksakan serangkaian tuntutan dan kendala yang berbeda pada lembaga-lembaga hukum mereka, tren global demokratisasi menciptakan sistem peradilan pidana (kriminalitas) yang transparan dan akuntabel di seluruh dunia. Namun demikian, banyak negara telah berhasil menjatuhkan rezim otoriter dan menggantinya dengan pemerintah yang dipilih secara bebas, hanya beberapa dari mereka yang berhasil mengembangkan institusi peradilan pidana dan praktik yang sejalan dengan cita-cita demokrasi kesetaraan, keterbukaan, dan keadilan. Sehingga bentuk pemerintahan demokrasi menurunkan praktek kriminalitas (Prillaman, 2000; Solomon & Foglesong, 2000; Ungar 2002).

Sayangnya, siklus pemilu reguler tidak dengan sendirinya merupakan penentu yang cukup dari demokrasi yang matang. Masyarakat otoriter dapat menjadi "demokrasi disjungtif" dengan mengadakan pemilihan kompetitif berulang tanpa menjadi demokrasi liberal (Rodrigues, 2006).

Demokrasi liberal, juga dikenal sebagai liberalisme konstitusional, adalah suatu bentuk demokrasi representatif di mana kekuasaan pejabat terpilih dimoderasi oleh berfungsinya lembaga-lembaga konstitusional yang melindungi hak-hak dan kebebasan individu dan minoritas dan membatasi sejauh mana kehendak mayoritas dapat dilaksanakan (Zakaria, 2003).

Secara sosial, ini ditandai dengan toleransi dan pluralisme. Demokrasi disjungtif berbeda dari demokrasi liberal dalam hal mereka masih menderita cacat serius dalam hubungan antaretnis, diskriminasi terhadap minoritas dan kelompok yang kurang beruntung, kekuatan eksekutif yang tidak terkendali, dan/atau pers yang lemah. Penjajaran ekspansi demokrasi demokrasi yang stabil selama dua dekade terakhir, dan stagnasi dalam tingkat kebebasan sipil di banyak negara, menunjukkan kesenjangan yang mengganggu antara kedua standar tersebut sehingga memunculkan pengaruh yang negatif terhadap tingginya angka kriminalitas (Zakaria 2003).

Packer (1968) menjelaskan bahwa nilai-nilai dan praktik-praktik yang ditemukan dalam masyarakat otoriter cocok dengan semua ciri-ciri dasar model pengendalian kriminalitas. Ia menambahkan bahwa ada administrasi peradilan, yang diorganisasikan dalam penindasan perilaku kriminal. Seluruh sistem dirancang untuk mencegah kejahatan serta untuk mengidentifikasi pelanggar hukum pada secara maksimum efisiensi maksimum. Efisiensi, menurut Packer, adalah "kapasitas sistem untuk menangkap, mengadili, menghukum, dan membuang sebagian besar

pelaku kejahatan yang pelanggarannya diketahui". Pusat penyelesaian untuk proses peradilan pidana terletak pada tahap pencarian fakta administratif awal diawasi oleh polisi, jaksa penuntut, atau hakim investigasi. Pada saat yang sama, tahapan adjudikasi selanjutnya relatif tidak penting dan sering terpotong. Kecepatan dan finalitas dicapai dengan memberikan lembaga penegak hukum tenaga kerja yang unggul dan izin hukum untuk menyaring tersangka dan untuk menentukan kesalahan faktual dengan tingkat gangguan minimum. Efisiensi proses hukum dalam model ini ditingkatkan dengan asumsi bersalah dan dibuktikan dengan aliran kasus yang terus-menerus kepada pejabat yang menangani kasus secara seragam dan rutin. Finalitasnya, pencapaian tahap terakhir dari proses kriminal, juga dijamin dengan meminimalkan jumlah kasus yang dipecat selama yudikasi dan penuntutan, yang memastikan bahwa pelanggar hukum membayar untuk tindakan berbahaya mereka.

Menurut Alesina (1994) bahwa sifat diktator dalam pemerintahan demokrasi akan menaikkan koefisien gini. Artinya pemerintahan yang diktator mendorong peningkatan ketimpangan pendapatan. Karena seorang diktator tidak mampu sepenuhnya memenuhi tuntutan sosial, karena takut digulingkan sehingga mempengaruhi jumlah suara dan keputusan kebijakan mempengaruhi distribusi pendapatan. Senada dengan yang diungkapkan dengan Perotti (1993); Saint-Paul & Verdier (1992); Fernandez & Rogerson (1992); Benhabib & Rustichini (1991); Pearson (1991).

Westall (2015) berpendapat bahwa gagasan dan realitas pembangunan berkelanjutan dan demokrasi dapat menjadi tumpang tindih dan bisa juga saling bergantung dan menguatkan. Misalnya pada partisipasi masyarakat untuk bersatu dan terlibat dalam keputusan tentang bagaimana kita hidup, dan tujuan yang ingin kita capai sebagai masyarakat. Sehingga dengan kebulatan pendapat dapat memungkinkan terjadinya inovasi tingkat tinggi dan merespons tantangan dengan cepat. Adanya keadilan, legitimasi dan transparansi yang dicapai dalam perlindungan demokratis juga dapat membuat pencapaian pembangunan berkelanjutan.

Meadowcroft et al, (2012); Beckman, (2008); Bluhdorn, (2012); dan Lafferty, (2012) mengatakan dalam risetnya bahwa interaksi antara demokrasi dan pembangunan berkelanjutan tidak menerima perhatian dan implikasi yang cukup, yang membutuhkan adaptasi, dan transformasi sistem politik demokrasi. Perubahan radikal pada praktik ekonomi, sosial, dan lingkungan yang cenderung membutuhkan lebih banyak koordinasi dan keterlibatan antara pemerintah, orang-orang, masyarakat sipil, dan bisnis, yang menyiratkan bentuk politik demokrasi yang berbeda dan lebih luas.

2.2.4 Hubungan Teoritis Ketimpangan Pendapatan dan Pembangunan Berkelanjutan

Menurut Murwanto (2014) Tujuan pembangunan ekonomi di Indonesia pada hakikatnya adalah membangun manusia seutuhnya,

sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada tataran global "Deklarasi Millennium" yang ditandatangani di New York tahun 2000 juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan tersebut dikenal sebagai *Millennium Development Goals* (MDGs).

Setelah tujuan era MDGs berhasil dicapai, selanjutnya era SDGs (*Sustainable Development Goals*) dimulai dan dirancang untuk meneruskan capaian yang telah diraih oleh MDGs sebelumnya. Kesejahteraan masyarakat sebagai salah satu tujuan dari SDGs dan merupakan cerminan dari keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, dapat diukur dengan menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Putra & Ulupui, 2015).

IPM sebagai salah satu dari indikator alternatif, untuk menilai kesejahteraan masyarakat, mencakup tiga komponen yang dianggap mendasar bagi manusia dan secara operasional mudah dihitung untuk menghasilkan suatu ukuran yang merefleksikan upaya pembangunan manusia. Ketiga komponen tersebut adalah: 1) Peluang hidup, 2) Pengetahuan, 3) Hidup layak (Sanggalorang et al, 2015).

Pentingnya pengentasan kemiskinan menjadi persoalan utama yang dibahas di seluruh dunia, yang dibuktikan dalam SDGs dengan dinyatakannya *no poverty* (tanpa kemiskinan) sebagai poin pertama prioritas. Hal ini berarti dunia bersepakat untuk meniadakan kemiskinan dalam bentuk apapun di seluruh penjuru dunia (Ishartono dan Santoso, 2016).

Menurut Santosa (2013) semakin meningkatnya daya beli

masyarakat yang di dukung oleh pendapatan yang semakin tinggi tentu akan membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga masyarakat akan terlepas dari kemiskinan dan menuju pada hidup yang lebih sejahtera. Semakin meningkatnya pengeluaran perkapita dapat memberikan dampak pada jumlah penduduk miskin disuatu daerah sebab semakin tinggi tingkat pengeluaran perkapita menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan secara keseluruhan.

Menurut Blau & Blau (1982) adanya ketidaksetaraan pendapatan akan meningkatkan perasaan perampasan dan ketidakadilan. Ketidaksetaraan dapat diperburuk oleh ras. Psikolog evolusi, Wilson & Daly (1997) memandang kriminalitas sebagai akibat dari persaingan status. Mereka berpendapat bahwa orang-orang di bagian bawah distribusi pendapatan sangat sensitif terhadap ketidaksetaraan dan ini mengarah pada perilaku risiko kejahatan ketika kegiatan berisiko rendah menawarkan pengembalian yang buruk kepada individu.

Menurut Becker (1968) bahwa tingkat kriminalitas tergantung pada resiko dan sanksi atas kejahatan dan perbedaan potensi keuntungan dari kejahatan tersebut dalam bentuk *opportunity cost*. Keuntungan bersih ini telah mewakili perbedaan kekayaan antara si miskin dan si kaya seperti yang dijelaskan oleh Bourgiugnon (2000). Kelly (2000) menafsirkan bahwa ketimpangan pendapatan merupakan perbedaan antara keuntungan dengan biaya peluang kriminalitas. Penduduk yang berada di pendapatan kelas bawah memiliki tingkat kejahatan yang lebih tinggi daripada di daerah penduduk yang berada di pendapatan kelas menengah atau tinggi

(Braithwaite, 1979). Ada harga & insentif atas kriminalitas dalam melihat masalah ketimpangan pendapatan (Ehlich, 1973).

2.2.5 Hubungan Teoritis Kriminalitas dan Pembangunan

Berkelanjutan

Dalam konteks aktualisasi pembangunan bahwa pengendalian dan perkembangan kriminalitas atau kejahatan merupakan hal yang relatif berbeda atas pengambil kebijakan yang terjadi dalam praktik internasional sejak awal tahun 1900-an. Oleh karena itu, minat komunitas pembangunan internasional terhadap kriminalitas terbatas terutama pada proyek 'reformasi sektor keamanan' di masyarakat pasca-konflik (Ellison 2007; Gordon 2014).

Menurut Jespersion (2015) yang mengamati bahwa sebelum adanya konsep pembangunan berkelanjutan, banyak aktor pembangunan tetap ragu-ragu untuk memasukkan masalah kriminologis ke dalam mandat formal mereka karena mereka khawatir hal itu akan membuat pembangunan menjadi sarana untuk mencapai keamanan.

Adanya kekhawatiran ini tidak berdasar karena apabila 'sekuritisasi' masalah pembangunan lainnya didokumentasikan dengan baik dan banyak masalah kriminologis sangat rentan terhadap manipulasi politik dan kewirausahaan moral, sehingga saat terjadi masalah dalam kriminologis akan berpengaruh kepada pembangunan (Pickering, 2007).

Para kriminolog telah mempelajari dampak perkembangan terhadap kejahatan tetapi secara komparatif sedikit mengatakan tentang

dampak kejahatan terhadap pembangunan atau hubungan dialektis, dua arah antara fenomena-fenomena ini dan menyimpulkan kejahatan mempunyai hubungan yang positif terhadap pembangunan (Liu, 2006)

Permasalahan menyangkut pembangunan berkelanjutan didasarkan pada seperangkat wacana yang memberantas kriminalitas kekerasan dan tidak adanya aturan hukum sebagai hambatan untuk pembangunan (Jespersion, 2015).

Adanya kontrak historis antara kriminolog dan sektor pembangunan internasional telah menjadi pembahasan dalam banyak penelitian. Sektor pembangunan internasional (kadang-kadang digambarkan sebagai 'komunitas') atau organisasi internasional, organisasi keuangan internasional, lembaga bilateral, organisasi non-pemerintah (baik internasional dan lokal), kontraktor swasta, badan amal dan konsultan independen yang bekerja untuk mempromosikan atau memperoleh keuntungan dari pengembangan konsep pembangunan berkelanjutan (Blaustin et al, 2017).

Bahkan menjadi suatu kebenaran ubahwa pembangunan tidak memiliki definisi yang disepakati secara universal, tetapi masyarakat maju digambarkan memiliki kemampuan untuk menghasilkan produksi barang dan jasa yang memadai dan terus berkembang secara produktif dan efisien, dalam mengakumulasi modal, dan untuk mendistribusikan kembali hasil-hasil produksi dengan cara yang relatif adil (Jaffee, 1998 dalam Blaustin, 2017).

Sebuah topik yang terkait erat dalam penelitian *green criminolog* menyangkut ekonomi politik masyarakat kapitalis maju dan kontribusinya pada 'organisasi ekologis' pada pembangunan berkelanjutan (Lynch et al. 2013). *Green criminolog* telah mengungkap ketidakadilan yang terkait dengan produksi, transfer dan pembuangan bahan-bahan pencemar dan limbah, dan dampak materialnya pada populasi manusia, spesies bukan manusia seperti tanaman dan hewan, dan ekosistem (Ruggiero & South, 2010). Penelitian mereka lebih lanjut menunjukkan bahwa apa yang terjadi pada tanah, udara dan air berhadapan dengan proses industri dan perdagangan yang memiliki hasil pencemaran dan limbah mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraan orang-orang dan habitat tertentu (Ruggiero & South, 2013).

Dalam beberapa dekade terakhir, tingkat kejahatan yang terjadi di daerah penghasil sumber daya alam telah meningkatkan kekhawatiran, membawa konsekuensi material dan imaterial yang masih harus dipahami dengan baik. Strategi anti-kejahatan perlu segera diimplementasikan untuk mempromosikan komunitas yang aman dan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan. Kriminalitas perlu diperhitungkan selama proses perencanaan, karena komponen berharga dapat disediakan yang dapat menawarkan pendekatan yang efektif untuk pencegahan kejahatan dan peningkatan keselamatan masyarakat (Santana, 2009).

Harris (2000) berpendapat bahwa terdapat biaya finansial atas kriminalitas yang terjadi karena memiliki efek emosional dan fisik yang mendalam pada para korban, menyebabkan perubahan perilaku

yang dapat membawa konsekuensi serius bagi seluruh masyarakat. Ini termasuk juga atas ketakutan akan kejahatan (kegelisahan dan rasa tidak aman), yang hasilnya mungkin sebenarnya lebih buruk daripada kejahatan itu sendiri (Carter & Jones, 1989) karena menyebabkan orang mengubah secara drastis rutinitas harian mereka.

Kalau dipilah antara daerah perkotaan dan pedesaan terhadap insiden kriminalitas tentunya perbedaan yang sangat jelas terjadi banyak di daerah perkotaan. Ini jelas hasil dari fakta bahwa ada jauh lebih banyak barang yang tersedia di kota untuk dicuri dan dijual. Namun, itu juga mencerminkan fakta bahwa semakin banyak orang telah pindah ke kota-kota dalam beberapa dekade terakhir, hanya untuk menemukan diri mereka hidup di daerah kumuh dalam situasi pengucilan sosial (Cozen, 2002). Di tambah lagi, kriminalitas yang terjadi di masyarakat karena memiliki perbedaan besar antara kekayaan dan kualitas hidup (Cozen, 2002).

Bagi orang-orang yang berpenghasilan rendah, faktor-faktor seperti itu dapat membuatnya lebih mudah untuk beralih ke kriminalitas sebagai bentuk subsisten dan cara memperoleh barang yang seharusnya tidak terjangkau, dengan demikian meningkatkan status sosial seseorang. Akhirnya, lingkungan perkotaan juga menawarkan lebih sedikit kontrol sosial dan lebih banyak anonimitas, yang dapat menguntungkan para penjahat. Memang, studi pola distribusi kejahatan dalam kota telah menunjukkan bahwa tidak adanya fungsi pengawasan alami sebagai

variabel yang mempengaruhi timbulnya jenis kejahatan tertentu di tempat-tempat di mana motivasi dan banyak peluang (Harries, 2000).

Dengan demikian, penelitian kriminal telah mengkonfirmasi bahwa terdapat pola yang jelas untuk kejahatan, dengan konsentrasi di tempat-tempat tertentu dan pada waktu tertentu (Cozens, 2002). Artinya, insiden tidak didistribusikan secara acak; sebaliknya, ada daerah-daerah tertentu di kota-kota yang relatif kecil, tetapi di mana kejahatan terjadi jauh lebih sering daripada di tempat lain (disebut "hotspot"), menjadikannya sangat rentan dan dapat diprediksi (Goldsmith & McGuire, 2000). Fakta ini telah menarik perhatian pada studi lokalitas dan desain perkotaan.

Newman (1972) dalam (Cozen 2002) yang pertama kali mengidentifikasi hubungan antara aspek-aspek spesifik dari desain perkotaan dan tingkat kejahatan. Dalam teorinya "Pencegahan Kejahatan melalui Desain Lingkungan", ia berpendapat bahwa desain perkotaan mempengaruhi timbulnya kejahatan dan pembentukan hotspot.

Penulis lain juga mengklaim bahwa desain dan lingkungan perkotaan dapat berperan dalam keputusan apakah akan melakukan kejahatan atau tidak (Geason & Wilson, 1989); misalnya, kurangnya kewaspadaan alami, pencahayaan yang buruk dan variabel lainnya berarti bahwa area kecil dapat dengan mudah diubah menjadi hotspot kejahatan yang potensial.

Studi lain telah menilai pengaruh lingkungan fisik terhadap kekerasan, menyoroti kontribusi yang dibuat oleh ruang hijau (yaitu keberadaan pohon dan rumput) dalam mengurangi kejadian perilaku

agresif dan kekerasan pada penduduk yang tinggal di sekitarnya, terutama dalam lingkungan perumahan sosial kota (Ulrich, 1984; Kuo & Sullivan, 2001; Kim & Kaplan, 2004).

Namun, untuk ruang hijau yang akan digunakan untuk aktivitas fisik, termasuk aksesibilitas mereka, persepsi keamanan, kualitas dan kenyamanan infrastruktur dan daerah sekitarnya (keberadaan jalan setapak, penyeberangan pejalan kaki, lalu lintas yang aman, penerangan yang memadai, pemeliharaan dan kebersihan ruang publik) mempengaruhi tindakan kriminalitas (Santana, 2009).

2.2.6 Hubungan Teoritis Ketimpangan Pendapatan dan Kriminalitas

Menurut Becker (1968) bahwa tingkat kriminalitas tergantung pada resiko dan sanksi atas kejahatan dan perbedaan potensi keuntungan dari kejahatan tersebut dalam bentuk *opportunity cost*. Keuntungan bersih ini telah mewakili perbedaan kekayaan antara si miskin dan si kaya seperti yang dijelaskan oleh Bourgiugnon (2000). Atau Kelly (2000) menafsirkan bahwa ketimpangan pendapatan merupakan perbedaan antara keuntungan dengan biaya peluang kriminalitas. Penduduk yang berada di pendapatan kelas bawah memiliki tingkat kejahatan yang lebih tinggi daripada di daerah penduduk yang berada di pendapatan kelas menengah atau tinggi (Braithwaite, 1979).

Fajnzylber (2002) menjelaskan bahwa hubungan antara ketimpangan pendapatan melalui indeks gini dan kejahatan telah berkembang dalam teori sosiologi. Relevansinya terletak pada interpretasi

atas konsistensi orang-orang kelas bawah dengan orang-orang kelas atas. Dalam lingkungan masyarakat kelas bawah tinggal dan hiduplah orang yang melakukan kejahatan. Kemudian kelompok kelas bawah ini mengganggu kehidupan masyarakat kelas atas. Teori ini yang dikenal dengan "*the relative deprivation*". Artinya ketidaksetaraan melahirkan ketegangan sosial sebagai orang yang kurang mampu merasa disingkirkan bila dibandingkan dengan orang yang kaya. Perasaan tidak beruntung dan tidak adil ini menguasai orang miskin untuk mencari kompensasi dan kepuasan dengan segala cara termasuk melakukan kejahatan terhadap orang kaya bahkan orang miskin sekalipun jika keadaan terdesak.

Cheong (2013) berpendapat bahwa negara-negara dengan ketimpangan pendapatan yang lebih tinggi, individunya memiliki harapan yang lebih rendah untuk meningkatkan status sosial dan ekonomi mereka. Melalui kegiatan ekonomi akan mengurangi biaya peluang untuk berpartisipasi dalam kejahatan ilegal. Adanya persepsi pesimis terhadap perbaikan ekonomi menyebabkan berkurangnya dilemma moral yang terkait dengan pelanggaran hukum.

Kelly (2000) juga menjelaskan bahwa ketimpangan pendapatan memberikan pengaruh terhadap kejahatan properti dan kejahatan dengan kekerasan. Dampak dari kemiskinan merupakan pengaruh terhadap kejahatan property melalui teori kejahatan ekonomi. Sedangkan kejahatan kekerasan merupakan teori ketegangan dan diorganisasi sosial. Teori kejahatan ekonomi adalah ketika seseorang dihadapkan kepada

keberhasilan meningkatkan pendapatan maka orang lain yang relatif tidak berhasil merasa frustrasi terhadap situasi mereka. Keadaan ini membuat ketimpangan semakin tinggi dan mendorong seseorang terbuju atas individu yang berstatus rendah untuk melakukan kejahatan. Sedangkan teori disorganisasi adalah kejahatan terjadi ketika mekanisme kontrol sosial lemah. Faktor-faktor yang menyebabkan lemahnya kontrol sosial ini adalah kemiskinan, heterogenitas, ras, mobilitas, tempat tinggal dan ketidakstabilan dalam keluarga. Daerah dengan ketimpangan yang tinggi cenderung memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi.

Stack (1984) mengungkapkan bahwa ketidaksetaraan pendapatan melahirkan ketegangan sosial, dimana orang yang kurang mampu merasa disingkirkan atau dirampas bila dibandingkan orang yang kaya. Perasaan tidak beruntung dan tidak adil mendorong si miskin mencari kompensasi dan kepuasan dengan segala cara, termasuk melakukan kriminalitas terhadap orang miskin dan orang kaya (Fajnzylber, 2002).

Van Gestel et al (2008) menjelaskan bahwa hubungan keluarga dan hubungan bisnis dalam investasi berperan penting dalam jaringan kriminalitas. Namun karena jaringan ini dapat menyembunyikan dari dunia luar sehingga pengungkapan kasus kriminalitas tidak dapat diungkap. Selanjutnya ia juga menambahkan investasi dalam bentuk hipotek mengindikasikan terjadinya kriminalitas dengan cara membeli properti melalui hipotek mungkin diperoleh dari penipuan hipotek dan untuk melunasi hutang hipotek dengan uang kriminal. Adapun alasan utama di balik konstruksi memperpanjang pinjaman, konstruksi pinjaman yang

baru, atau transaksi fiktif (tidak nyata) digunakan untuk tujuan pencucian uang dan investasi dalam kriminalitas agar pelaku yang terlibat dan pihak yang berwenang dapat mengelak dari tindakan kriminalitas Ferwerda et al, (2007); Nelen et al, (2007); Van de Bunt et al, (2007).

2.3 Beberapa Hasil Penelitian dan Studi Empiris Penelitian

Mihaylova (2015) melakukan riset tentang analisis regresi mengenai ketimpangan pendapatan melalui perhitungan indeks gini dipengaruhi oleh investasi asing (*foreign direct investment /FDI*) pada 10 negara eropa (*Central and Eastern Europe*). Dimana variabel bebas adalah investasi asing yang dihitung sebagai persentase GDP (*gross domestik product*) dan variabel terikatnya adalah indeks gini. Hasilnya diperoleh bahwa investasi asing meningkatkan ketimpangan pendapatan.

Bhandari (2006) yang menguji FDI di Amerika menemukan bahwa FDI menurunkan ketimpangan pendapatan. Hal yang sama juga berlaku pada studi Milanovic (2002) yang menggunakan data panel di 88 negara pada periode tahun 1985 hingga 1991 yang menemukan bahwa FDI tidak berdampak pada distribusi pendapatan dalam pembangunan berkelanjutan.

Babatunde (2018) menjelaskan bahwa terdapat pengaruh antara investasi asing terhadap ketimpangan pendapatan di Nigeria. Adapun riset ini dilakukan pada tahun 1980 dan 2016. Riset ini menggunakan metode NARDL asimetrik yang menginvestigasikan hubungan jangka pendek dan jangka panjang investasi asing yang masuk ke Nigeria. Hasil riset ini

menunjukkan bahwa pada jangka pendek investasi asing yang masuk menaikkan ketimpangan pendapatan. namun di jangka panjang menurunkan ketimpangan pendapatan. Sehingga ketimpangan pendapatan ini mendorong bertambahnya pertumbuhan populasi penduduk dan malah menambah investasi domestik.

Apabila terjadi kesalahan setelah pembentukan investasi, atau jika instrumen yang relevan tidak mengandung persyaratan legalitas, maka masalah tersebut sebagai masalah penerimaan dapat diputuskan pada fase prestasi daripada fase yurisdiksi (Douglas, 2012). Sebagai contoh di *Plama v Bulgaria*, adanya persyaratan legalitas dalam perjanjian energi pada investor dan pengadilan memutuskan untuk mendengar dugaan kekeliruan dalam pemberian manfaat energi di Bulgaria (*Plama Consortium Bulgaria*, 2008). Pengadilan di Eropa pada *Semen v Turki* berurusan dengan tuduhan penipuan mengenai kepentingan kepemilikan di perusahaan investor pada tahap jasa (*Eurupe Cemen Investment*, 2009). Di *Churchill Mining v Indonesia*, semua klaim yang berkaitan dengan memperoleh hak penambangan ternyata tidak dapat diterima karena skema penipuan dokumen palsu telah menembus investasi (*Churchill Mining*, 2016).

Trinh (2016) menerangkan bahwa investasi asing mempengaruhi kesenjangan pendapatan di Vietnam. Riset ini berlangsung selama beriode 2002-2012. Dengan menggunakan model OLS dan model *fixed effect* memperlihatkan bahwa investasi asing yang masuk ke Vietnam menekan upah pekerja rendah keahlian sehingga distribusi pendapatan

menjadi negatif dan signifikan. Artinya dengan masuknya investasi asing ke dalam negeri membuat distribusi pendapatan tidak merata sehingga terjadi ketimpangan pendapatan.

Orellana (2011) yang melakukan riset di California, Amerika Serikat bahwasanya perusahaan yang melakukan investasi agar meningkatkan laba dan pendapatan perusahaan yang ditujukan untuk karyawannya sehingga melakukan investasi dalam bidang kesehatan dengan membangun klinik pengobatan; dalam bidang lingkungan dengan membangun *groundwater* untuk sanitasi dan air bersih; membangun *garbage ethanol* untuk mengelola sampah; dan membayar pajak kebersihan lingkungan yang sangat tinggi kepada pemerintah.

Azizi (2018) menerangkan bahwa besarnya PDRB, dana alokasi umum dan dana bagi hasil menunjukkan bahwa perekonomian di Sulawesi selatan tidak mencerminkan kondisi atau corak kehidupan masyarakatnya. Adanya perbedaan potensi dan kondisi geografis sebagai penyebab dalam ketimpangan pembangunan kabupaten dan Kota di Sulawesi selatan, kondisi demografi juga terlihat mengalami ketimpangan. Seperti ketimpangan yang terjadi dalam kualitas tingkat pendidikan masyarakatnya. Propinsi Sulawesi Selatan lebih banyak bergantung pada sektor pertanian yaitu sekitar 33,54%. Selain itu perekonomian Sulawesi Selatan memiliki perkembangan PDRB yang pesat sekitar 7,28 persen per tahun. Namun terjadi ketimpangan pendapatan yang cukup tinggi.

Lisna (2013) berpendapat bahwa implementasi desentralisasi fiskal dimana komposisi Dana Alokasi Umum (DAU) pada total pendapatan

daerah relatif tinggi, sementara komposisi bagi hasil bukan pajak (sumber daya alam) rendah telah mempercepat laju pertumbuhan ekonomi pada 23 propinsi di Indonesia, tetapi laju penurunan kemiskinan melambat bahkan proporsi penduduk miskin pertanian meningkat. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak peningkatan bagi hasil pajak dan belanja sektor riil terhadap perekonomian dan kemiskinan sektoral daerah yang memihak penduduk miskin pertanian serta mengurangi ketergantungan keuangan daerah pada DAU.

Zaini (2017) berpendapat bahwa Provinsi Kalimantan Timur merupakan provinsi penghasil sumber daya alam terbesar di Indonesia. Akibat proses eksploitasi yang *massive* dan nilai yang tinggi, sektor pertambangan sangat mendominasi perekonomian daerah tersebut. Dari sekian banyak sumber daya alam yang ada di Provinsi Kalimantan Timur, batubara adalah yang paling besar kontribusinya terhadap perekonomian. Terkait kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kekayaan sumber daya alam batubara dalam bentuk dana bagi hasil bukan pajak (sumber daya alam) terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Kalimantan Timur. Penelitian ini menggunakan data panel dari sembilan daerah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur selama tahun 2006-2014, yang kemudian diolah menggunakan model *pooled least square*. Selain itu dalam penelitian ini ditemukan pula bahwa pengeluaran pemerintah berhubungan positif dengan ketimpangan pendapatan, yang berarti pemerintah daerah belum berhasil menciptakan pemerataan kesejahteraan di wilayahnya. Adapun pertumbuhan ekonomi dan

kontribusi sektor pertanian dalam perekonomian Provinsi Kalimantan Timur terbukti tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

Westall (2015) melakukan riset tentang kesamaan dan perbedaan hubungan demokrasi dan pembangunan berkelanjutan. Riset ini dilaksanakan saat pemilihan umum tahun 2015 di Amerika Serikat. Menurutnya efek kegiatan yuridiksi politik dapat mempengaruhi perubahan iklim. Karena batas-batas ekosistem tidak berkesesuaian dengan batas politik. Keputusan yang diambil di bidang politik dibuat untuk mereka yang hidup hari ini namun generasi mendatang kehilangan hak nya untuk menikmati manfaat kegiatan saat ini.

Sori (2012) membahas demokrasi terhadap rasio gini. Dalam pembahasannya variabel demokrasi merupakan variabel terikat nya sedangkan rasio gini ditempatkan sebagai variabel bebasnya dari tahun 1973 hingga 2004. Ada tiga model demokrasi yang dibahas, yaitu model pertama mengenai kepuasan atas demokrasi, model kedua mengenai diskusi politik, dan model ketiga intensitas memilih.

Soci (2012) pada model pertama tentang kepuasan atas demokrasi ditempatkan variabel dummy atas kepuasan demokrasi yaitu angka 1 hingga angka 4. Pada angka bernilai satu menunjukkan sangat puas atas demokrasi, nilai dua menunjukkan cukup puas, nilai tiga menunjukkan tidak puas dan nilai empat menunjukkan sangat tidak puas. Pada model kedua menempati angka 1 hingga angka 3 mengenai diskusi politik. Dimana angka dummy 1 berarti sering berdiskusi politik, angka 2 berarti

kadang-kadang dan angka 3 berarti tidak pernah berdiskusi politik. Sedangkan pada model ketiga tentang intensitas memilih saat pemilu dengan menempatkan angka dummy 1 dan angka dummy 0, dimana angka 1 berarti tidak memilih saat dan angka 0 berarti memilih saat memilih.

Hasilnya menurut Sori (2012) adalah dengan model pertama mengenai hubungan kepuasan atas demokrasi atas kesenjangan pendapatan adalah penurunan kepuasan atas demokrasi menaikkan kesenjangan pendapatan, mendewasakan umur (dimana usia orang menjadi lebih bijaksana, atau lebih sabar, atau lebih toleran), pria lebih puas atas demokrasi dibanding wanita (dimana perempuan lajang lebih peka atas keadilan moral); kepuasan menaikkan pendidikan (orang berpendidikan versus tidak berpendidikan) dan lebih kuat untuk orang lebih berpendidikan (dimana pendidikan membantu mengevaluasi demokrasi dan juga hakekat demokrasi tersebut) dengan tingkat probabilitas atas kepuasan demokrasi meningkat per tahun hingga 0.00075; kondisi pekerja pengangguran dan pekerja lepas lebih sedikit kepuasannya atas demokrasi.

Untuk model kedua, Sori (2012) menunjukkan tentang kualitas demokrasi melalui diskusi politik, yakni sering atau kadang-kadang atau jarang berdiskusi politik. Hasilnya adalah orang yang sudah menikah dan mempunyai pekerjaan mempunyai hubungan yang positif terhadap diskusi politik.

Untuk model ketiga, Sori (2012) memperlihatkan tentang tidak memilih saat Pemilu esok, semua indeks gini memperlihatkan nilai negatif. Artinya kemungkinan secara langsung menunjukkan hubungan yang berlawanan baik dari segi kelamin pria, menikah, tingkat pendidikan menengah tinggi, dan umur akan meningkatkan kemungkinan memilih pemilu. Penekanannya adalah ketika ketidaksetaraan (indeks gini) menaikkan keputusan memilih walau tanpa mediasi saat pemilu yang akan datang. Konfirmasi yang kuat atas keahlian tentang politik memunculkan teori konflik berlawanan dengan teori kekuatan relatif.

Selanjutnya melalui model probit, Sori (2012) mengestimasi ketiga model di atas yang dikaitkan dengan indeks gini. Hasilnya jika indeks gini tinggi mendorong ketidaksetaraan pendapatan akan meurunkan kepuasan atas demokrasi dan diskusi mengenai politik. Selanjutnya lebih tua, pria, dan mempunyai tingkat pendidikan mempunyai hubungan yang positif dan signifikan berdampak pada kemungkinan kepuasan atas demokrasi, lalu sering berdiskusi politik dan memilih jika mereka sering berdiskusi mendorong mereka untuk memilih saat Pemilu mendatang. Seterusnya orang yang mempunyai pekerjaan mempunyai peranan penting dalam persepsi tentang demokrasi; orang yang tidak bekerja dan pekerja manual mempunyai sedikit kepuasan atas demokrasi dengan respek yang tidak aktif atas demokarsi; wiraswasta, manager, buruh, pekerja manual, orang yang telah pensiun dan menanggur lebih tidak aktif berdiskusi politik.

Menurut Sori (2012) bahwa distribusi pendapatan membawa pengaruh positif terhadap kepuasan atas demokrasi. Dimana orang kaya

menjadi lebih kaya karena mereka lebih puas atas demokrasi dan keputusan untuk memilih saat Pemilu mendatang.

Hsieh dan Pugh (1993), melakukan meta analisis dari 34 studi cross-sectional tentang hubungan antara ketimpangan pendapatan dan kejahatan dengan kekerasan, menemukan 97% korelasi menjadi positif dan menyimpulkan bahwa tingkat kekerasan lebih tinggi di masyarakat yang lebih tidak setara di Amerika Serikat.

Ganda (2015) yang menceritakan aturan yang fundamental dalam kerjasama kegiatan investasi penghijauan pada pembangunan berkelanjutan. Ia menjelaskan bagaimana perusahaan melakukan praktek investasi penghijauan di Afrika Selatan. Adapun teori yang diadopsinya yakni *the goal-framing theory*. Teori ini mendeskripsikan bagaimana orang-orang membentuk tujuan kemudian mengumpulkan informasi yang mendukung tujuan lalu bertindak sesuai tujuan. Di Afrika Selatan kegiatan investasi penghijauan diterapkan dalam peraturan lingkungan yang ditujukan kepada perusahaan berupa biaya pinalti tinggi atas pengrusakan lingkungan, hukuman penjara, penutupan perusahaan. Tim manajer perusahaan harus memberikan gambaran kebijakan penghijauan dan teknologi penghijauan.

Ahmad (2017) yang melakukan riset di Chili. Ia melakukan riset mengenai investasi dalam bentuk pembangunan infrastruktur pada pembangunan berkelanjutan. Di negara Chili dibangun sarana prasarana yang murah dan bersih, terhubung dengan negara-negara di Eropa lainnya melalui pembangunan jalan, bandara, kereta api. Pengaturan

pajak yang tinggi bagi individu, perusahaan, atau lembaga yang melakukan pengrusakan lingkungan. Hal ini memberikan pengaruh positif pertumbuhan pendapatan perkapita PDB terhadap pendapatan regional tahun 2016 melalui riset dengan mengolahnya melalui regresi. Hasil riset ini adalah adanya pengaruh positif terhadap permintaan penggunaan investasi fasilitas public terhadap pertumbuhan pendapatan perkapita negara Chili.

Hege (2018) yang melakukan riset di 30 negara di Eropa pada tahun 2016 dan tahun 2017. Hasilnya adalah ada 23 negara yang telah melakukan pengelolaan anggaran untuk pembangunan berkelanjutan melalui prinsip keuangan yang transparan yang melibatkan parlemen, masyarakat sipil, partai politik, kementerian dan lembaga sosial masyarakat. Negara-negara ini telah membentuk auditor yang menggiring anggaran mengenai keberlanjutan pembangunan.

Martin (2016) yang menjelaskan mengenai pengeluaran pemerintah untuk pembangunan berkelanjutan. Ia melaporkan terdapat 72 negara yang melakukan ikut dalam analisis transparansi dan akuntabilitas program MDGs. Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat 24 negara yang mempunyai perhatian rendah terhadap pengeluaran pemerintah untuk pembangunan berkelanjutan. Sisanya 48 negara telah secara detail mengelompokkan pengeluaran pemerintah untuk pembangunan berkelanjutan. Beberapa sektor yang dibiayai pemerintah pada 48 negara ini terangkum dalam panel data yakni sektor pertanian, gender, perlindungan sosial, dan sanitasi air higienis.

Qurbani (2014) yang menjelaskan bahwa terdapat perubahan pasal 20 UU No. 33/2004. Ia menerangkan bahwa bukan presentase yang diatur tetapi adanya penerapan asas desentralisasi di Indonesia. Ia berkesimpulan bahwa telah dilakukan perubahan atas Pasal 14 huruf e dan huruf f, Pasal 19 serta Pasal 20 UU No. 33/2004 yaitu lebih ditekankan pada strategi dan kebijaksanaan pembangunan yang mendistribusikan dana bagi hasil migas kepada pemerintahan daerah secara proporsional menurut kriteria yang rasional, adil, sesuai kondisi, potensi serta problem khusus di daerah yang bersangkutan dan memberikan keleluasaan ruang gerak (*discretionary power*) yang lebih besar kepada pemerintahan daerah sehingga terwujud kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dana bagi hasil dari kegiatan usaha migas harus dilakukan secara transparan, berkeadilan, berwawasan lingkungan, menjamin keamanan, keselamatan, serta kesejahteraan masyarakat.

Munslow (1995) yang menjelaskan mengenai demokrasi berpengaruh pada pembangunan berkelanjutan. Adapun riset nya diujikan ke negara menganut desentralisasi seperti di Afrika yakni Nigeria, Algeria, Kamerun dan Cina dan negara barat. Hasilnya bahwa negara yang menganut paham demokrasi mempunyai kemampuan dan prioritas dalam membangun pembangunan berkelanjutan dalam bentuk tranparansi manajemen sumber daya, melindungi hak azazi manusia dan partisipasi sosial.

Soderbaum (2012) yang menjelaskan tentang demokrasi dan

pembangunan berkelanjutan. Ia menganalisis 22 negara anggota panel *Our Common Future* di Afrika Selatan tahun 1987. Ia menjelaskan bahwa demokarsi adalah cara memindahkan tanggung jawab masa depan kepada individu yang dalam istilah ekonomi yakni sebagai produsen dan konsumen. Kemudian tanggung jawab ini mengubah kemauan politik untuk keberhasilan pembangunan berkelanjutan. Hasilnya bahwa negara dengan ideologi yang menganut paham ekonomi neo-klasik yang menempatkan peran pemerintah dalam idelogi negaranya atau menganut paham demokrasi lebih terdepan melaksanakan kegiatan pembangunan berkelanjutan.

Dervis (2012) yang menerangkan bahwa negara kaya dan negara berkembang menganut paham konvergen (menyatu), kebebasan dan divergen (menyebar). Ia berpendapat bahwa negara miskin telah mengalami banyak pengalaman dan konflik dan kegagalan pemerintahan. Sedangkan negara maju telah melakukan kebebasan atas individu untuk melaksanakan kegiatan ekonomi. Ia berkesimpulan bahwa negara miskin belum mampu melaksanakan pembangunan berkelanjutan karena masih berkutat dengan konflik politik dan pemerintahan.

Fajnzylber (2002) yang melakukan riset tentang hubungan antar ketimpangan pendapatan dan kejahatan dengan kekerasan. Riset ini dilakukan pada 39 negara. Ia menerangkan korelasi antara indeks gini dan tingkat pembunuhan dan perampokan di negara-negara tersebut. Kemudian secara parsial menguji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penentu kejahatan tersebut. Lalu secara endogenitas

mengisolasi ketidaksetaraan dengan dampak eksogennya. Dalam riset tersebut digunakan data panel selama 5 tahun yaitu periode tahun 1965 hingga tahun 1995 untuk kasus pembunuhan dan tahun 1970 hingga tahun 1994 untuk kasus perampokan. Hasilnya adalah terjadi korelasi positif antara tingkat kejahatan dan ketidaksetaraan di dalam negara-negara tersebut.

Terkait dengan kesejahteraan masyarakat, Prutowo (2013), Yasa & Sudarsana (2015) menyimpulkan bahwa ketimpangan yang diukur dengan rasio gini, memiliki korelasi yang negatif terhadap kesejahteraan masyarakat. Berbeda dengan hasil penelitian Rustariyuni (2014), bahwa gini rasio memiliki korelasi positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Cheong (2013) yang meneliti tentang ketimpangan pendapatan terhadap jumlah kejahatan di propinsi yang ada di Cina. Riset ini menggunakan data panel dari tahun 1997 hingga tahun 2007. Hasil risetnya adalah ketimpangan pendapatan yang terjadi di propinsi bagian-regional mempunyai hubungan yang positif terhadap jumlah kejahatan di daerah tersebut. Hal ini dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. Dimana tingkat pendidikan berpengaruh negatif terhadap jumlah kejahatan. Artinya semakin tinggi sekolah seseorang maka jumlah kriminalitas akan berkurang. Disamping itu riset ini juga menjelaskan tentang tingkat kejahatan di propinsi bagian-regional secara positif berpengaruh terhadap tingkat inflasi, tingkat pengangguran, ketimpangan atas konsumsi dan tenaga kerja antara di sektor perkotaan dan pedesaan.

Telah ada banyak penelitian yang mengupas tentang ketimpangan pendapatan dan kriminalitas. Kelly (2000) menyimpulkan bahwa tingkat perampokan, penyerangan, dan tingkat kejahatan agregat semuanya dipengaruhi oleh ketimpangan pendapatan. Kennedy et al. (1998) temuan menunjukkan bahwa efek ketidaksetaraan pendapatan pada kejahatan di AS dimediasi oleh modal sosial. Machin & Meghir (2004) menemukan bahwa kenaikan upah di bagian bawah distribusi telah mengurangi kejahatan dengan mengurangi insentif untuk melakukan kejahatan. Krohn (1976) melaporkan bahwa koefisien Gini adalah prediktor terbaik untuk tingkat pembunuhan nasional di AS dan Messner et al. (2002), menggunakan metode cross-sectional. Deininger dan Squire (1996), menemukan bahwa untuk AS ada hubungan positif antara pembunuhan dan ketidaksetaraan pendapatan.

Mathur (1978) menemukan bahwa Gini memiliki efek ambigu pada kejahatan, dan Stack (1984), menggunakan data dari Interpol untuk lintas negara, tidak menemukan hubungan antara ketimpangan pendapatan dan kejahatan.

Kelly (2000) yang menjelaskan bahwa ketimpangan pendapatan antara daerah perkotaan yang dibandingkan dengan jumlah kejahatan karena perilaku properti dan karena kejahatan dengan kekerasan. Riset ini dilakukan di daerah perkotaan yang berada di negara Amerika dan Inggris pada tahun 2000. Hasilnya adalah ketimpangan pendapatan tidak berpengaruh pada kejahatan property tetapi berpengaruh kuat pada kejahatan dengan kekerasan dengan elastisitas 0,5 pada persamaan

regresi.

Holzman (2011) menjelaskan dalam risetnya bahwa adanya aturan hukum yang jelas pada perlindungan ketenagakerjaan yakni skema pengangguran yang komprehensif seperti yang dilakukan di Cile pada tahun 2002 dan di Korea Selatan pada tahun 2005 agar pemberian pesangon dengan jumlah besar tidak diberikan lagi.

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan tinjauan pustaka maka kajian penelitian terdahulu atas variabel-variabel yang diteliti oleh peneliti terdahulu tersaji dalam Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Matriks Penelitian Terdahulu dan Preposisi Penelitian

Hubungan Antar Variabel	Peneliti	Teknik Analisis	Temuan	Preposisi
Investasi Swasta → Rasio Gini	Mihaylova, 2015	Anova	Terdapat pengaruh negatif di Eropa Tengah dan Timur	Investasi swasta berpengaruh negatif terhadap rasio gini
	Bhandari, 2006	Deskriptif	Terdapat pengaruh negatif Di AS	
	Milanovic, 2002	Regresi	Terdapat pengaruh negatif di AS	
Dana Bagi Hasil SDA → Rasio Gini	Wilhelm & Fiestas, 2005	Regresi	Terdapat pengaruh negatif di Eropa	Dana bagi hasil SDA berpengaruh negatif terhadap rasio gini
	Azizi, 2018	Regresi	Terdapat pengaruh negative di Sulsel	
	Zaini, 2017	Regresi	Terdapat pengaruh negatif di Kaltim	
Demokrasi → Rasio Gini	Soci, 2012	Regresi	Terdapat pengaruh positif di AS	Demokrasi berpengaruh positif terhadap rasio gini
	Aspinal, 2014	Deskriptif	Terdapat pengaruh positif di Indonesia	
	Mietzmer, 2012	Deskriptif	Terdapat pengaruh positif di Indonesia	
Investasi Swasta → Kriminalitas	Kryvoi, 2005	Deskriptif	Terdapat pengaruh positif di AS	Investasi swasta berpengaruh positif terhadap kriminalitas
	Vogenaver & Kleinheisterkamp, 2009	Deskriptif	Terdapat pengaruh positif	
Dana Bagi Hasil SDA → Kriminalitas	Westall, 2015	Deskriptif	Terdapat pengaruh positif di AS	Dana bagi hasil SDA berpengaruh positif terhadap kriminalitas
	Harries, 2000	Deskriptif	Terdapat pengaruh positif	
	Newman, 1972	Deskriptif	Terdapat pengaruh positif	
Demokrasi → Kriminalitas	Prillaman, 2000	Deskriptif	Terdapat pengaruh negatif	Demokrasi berpengaruh negatif terhadap kriminalitas
	Solomon & Foglesong, 2000	Deskriptif	Terdapat pengaruh negatif	
	Ungar, 2002	Deskriptif	Terdapat pengaruh negatif	
	Zakaria, 2003	Regresi	Terdapat pengaruh negatif	
Investasi Swasta → Pembangunan Berkelanjutan	Hsieh & Pugh, 1993	Korelasi	Terdapat pengaruh positif di AS	Investasi swasta berpengaruh positif terhadap pembangunan berkelanjutan
	Ganda, 2015	Deskriptif	Terdapat pengaruh positif di Afrika Selatan	
	Ahmad, 2017	Regresi	Terdapat pengaruh positif di Chili	
	Orellana, 2011	Deskriptif	Terdapat pengaruh positif di AS	
Dana Bagi Hasil SDA → Pembangunan	Hege, 2018	Deskriptif	Terdapat pengaruh di Eropa	Dana Bagi Hasil Sumber Alam berpengaruh terhadap

Berkelanjutan	Martin, 2016	Deskriptif	Terdapat pengaruh di 72 negara	pembangunan berkelanjutan
	Qurbani, 2014	Deskriptif	Terdapat pengaruh di Indonesia	
Demokrasi → Pembangunan Berkelanjutan	Munslow, 1995	Deskriptif	Terdapat pengaruh di Afrika	Demokrasi berpengaruh terhadap pembangunan berkelanjutan
	Soderbaum, 2012	Deskriptif	Terdapat pengaruh	
	Dervis, 2012	Deskriptif	Terdapat pengaruh di AS	
Rasio Gini → Pembangunan Berkelanjutan	Putra & Ulupui, 2015	Deskriptif	Terdapat pengaruh positif di Indonesia	Rasio gini berpengaruh terhadap pembangunan berkelanjutan
	Sanggolongan et al, 2015	Deskriptif	Terdapat pengaruh positif di Vietnam	
	Pratowo, 2013	Regresi	Terdapat pengaruh negatif di Indonesia	
	Yasa & Sudarsana, 2015	Regresi	Terdapat pengaruh negatif di Indonesia	
	Rustariyuni, 2014	Regresi	Terdapat pengaruh positif di Indonesia	
	Santosa, 2013	Deskriptif	Terdapat pengaruh positif di Indonesia	
Rasio Gini → Kriminalitas	Fajnzylber, 2002	Korelasi	Terdapat pengaruh positif di 39 negara	Rasio gini berpengaruh terhadap kriminalitas
	Cheong, 2013	Korelasi	Terdapat pengaruh positif di Cina	
	Kelly, 2000	Regresi	Terdapat pengaruh positif di AS & Inggris	
Kriminalitas → Pembangunan Berkelanjutan	Jespersion, 2015	Deskriptif	Terdapat pengaruh positif di AS	Kriminalitas berpengaruh terhadap pembangunan berkelanjutan
	Pickering, 2007	Deskriptif	Terdapat pengaruh positif di Eropa	
	Liu, 2006	Deskriptif	Terdapat pengaruh positif di Asia	

BAB III

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

3.1 Kerangka Konseptual Penelitian

Tujuan pembangunan ekonomi pada hakikatnya adalah membangun manusia seutuhnya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan tersebut dikenal sebagai *Millennium Development Goals* (MDGs). Setelah tujuan era MDGs berhasil dicapai, selanjutnya era SDGs (*Sustainable Development Goals*) dimulai dan dirancang untuk meneruskan capaian yang telah diraih oleh MDGs sebelumnya.

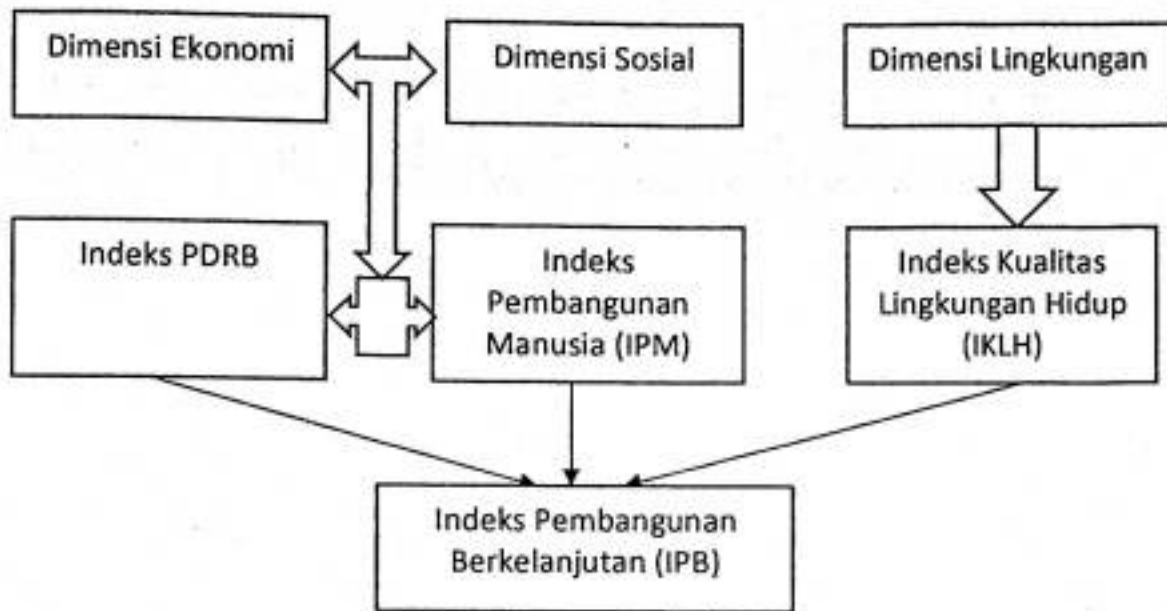
Kesejahteraan masyarakat sebagai salah satu tujuan dari SDGs dan merupakan cerminan dari keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah menitikberatkan pada tiga pilar dimensi keberlanjutan yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dengan menambahkan dimensi politik dalam mengukur pembangunan berkelanjutan maka akan menjadi tolak ukur dalam mewujudkan keberhasilan keberlanjutan pembangunan.

Pencapaian pembangunan berkelanjutan yang dapat diukur maka dilakukan perhitungan angka indeks pada tiga pilar dimensi keberlanjutan. Yang dinamakan indeks pembangunan berkelanjutan (IPB). IPB ini merupakan indeks komposit atas indeks dimensi ekonomi yaitu indeks PDRB, indeks dimensi sosial yaitu indeks pembangunan manusia, dan indeks dimensi lingkungan yaitu indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH).

Adapun faktor-faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan berkelanjutan diantaranya ada lima variabel yaitu investasi swasta, dana bagi hasil sumber daya alam, demokrasi, ketimpangan pendapatan, dan kriminalitas. Kelima variabel ini mewakili keberlanjutan di bidang ekonomi, sosial, lingkungan dan politik. Penulis mengungkap faktor ekonomi sebagai penentu atas keberlanjutan di bidang ekonomi dengan mengkaji indeks PDRB, investasi swasta, dan dana bagi hasil sumber daya alam. Faktor sosial yakni ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia (IPM) dan indeks kriminalitas sebagai salah satu penentu keberlanjutan pembangunan di bidang sosial. Faktor politik yaitu indeks demokrasi sebagai salah satu penentu keberlanjutan pembangunan di bidang politik. Dan faktor lingkungan yakni indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) sebagai salah satu penentu keberlanjutan pembangunan di bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam

Pemilihan ketiga indikator ini sebagai penyusun indeks komposit didasari pandangan bahwa ketiganya mampu memenuhi kriteria indikator yang baik dalam pemenuhan pembangunan berkelanjutan. Baik dari sisi tingkat keandalannya, ketersediaannya, cakupan sosial, serta relevansi dengan fenomena yang diukur. Dua indikator yang pertama yakni PDRB (Pembangunan Domestik Regional Bruto) dan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) merupakan indikator yang sudah diakui oleh dunia internasional. Sedangkan IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) walaupun masih belum dapat dikatakan sebagai indikator yang terbaik dari indikator

lingkungan yang ada (*the best available*). Sebagaimana dijelaskan dalam Gambar 3.1 berikut:



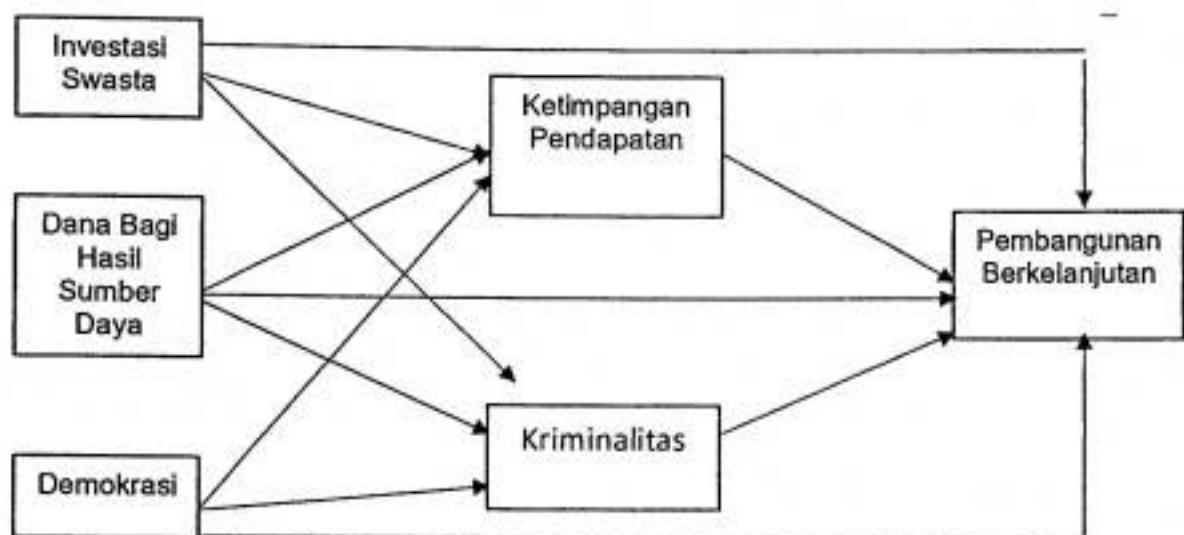
Gambar 3.1 Penyusunan Indeks Pembangunan Berkelanjutan

Selanjutnya keberhasilan pembangunan berkelanjutan dalam mensejahterakan masyarakatnya akan dipengaruhi oleh investasi swasta dan dana bagi hasil sumber daya alam yang mewakili pilar dimensi ekonomi, ketimpangan pendapatan dan kriminalitas yang mewakili pilar dimensi sosial, serta demokrasi yang mewakili pilar dimensi politik.

Dalam riset ini dilihat seberapa besar pengaruh faktor-faktor tersebut dalam menuntaskan berlanjut atau tidaknya pembangunan berkelanjutan pada propinsi penghasil tambang di Indonesia selama periode tahun 2009-2018.

Oleh karena itu kerangka konseptual penelitian ini dijelaskan sebagai berikut bahwa variabel investasi swasta, dana bagi hasil sumber daya alam dan demokrasi berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap pembangunan berkelanjutan melalui ketimpangan pendapatan.

Kemudian variabel investasi swasta, dana bagi hasil sumber daya alam dan demokrasi berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap pembangunan berkelanjutan melalui kriminalitas. Untuk mendeskripsikan hubungan antara berbagai variabel-variabel tersebut, selengkapnya disajikan pada skema atau diagram pada Gambar 3.2 berikut:



Gambar 3.2 Kerangka Pikir Penelitian

3.2 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, studi empiris, dan kerangka konsep maka disusun hipotesis sebagai berikut:

H_1 = Investasi swasta berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan berkelanjutan secara langsung.

H_{1a} = Investasi swasta berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembangunan berkelanjutan melalui ketimpangan pendapatan secara tidak langsung.

- H_{1b} = Investasi swasta berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembangunan berkelanjutan melalui kriminalitas secara tidak langsung.
- H₂ = Dana bagi hasil sumber daya alam berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan berkelanjutan secara langsung.
- H_{2a} = Dana bagi hasil sumber daya alam berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembangunan berkelanjutan melalui ketimpangan pendapatan secara tidak langsung.
- H_{2b} = Dana bagi hasil sumber daya alam berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembangunan berkelanjutan melalui kriminalitas secara tidak langsung.
- H₃ = Demokrasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan berkelanjutan secara langsung.
- H_{3a} = Demokrasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembangunan berkelanjutan melalui ketimpangan pendapatan secara tidak langsung.
- H_{3b} = Demokrasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembangunan berkelanjutan melalui kriminalitas secara langsung.

BAB IV

METODE PENELITIAN

4.1 Rancangan Penelitian

Penelitian ini dirancang sebagai penelitian verifikasi yaitu menguji jawaban yang tertuang dalam hipotesis terhadap masalah yang ada. Penelitian verifikasi tersebut dikategorikan sebagai penelitian kausalitas yang bertujuan untuk mengkaji dan menguji keberadaan teori secara empiris dari hubungan variabel-variabel yang diformulasikan ke dalam hipotesis.

Penelitian ini bersifat *explanatory* atau penelitian eksperimen yang bertujuan untuk meramalkan dan menjelaskan hal-hal yang terjadi atau yang akan terjadi di antara variabel-variabel tertentu melalui spekulasi pengontrolan hubungan di antara variabel-variabel tersebut. Sehingga ditemukan perbedaan salah satu variabel atau hubungan dan bahkan berpengaruh di antara variabel-variabel tersebut.

Selanjutnya penelitian kausalitas ini bertujuan untuk menyelidiki kemungkinan hubungan sebab akibat dari suatu penelitian atau peristiwa atau fenomena yang dapat diukur dan berusaha menjelaskan hubungan kausalitas antara variabel eksogen dengan variabel endogen. Dengan demikian maka penelitian kausalitas merupakan tingkatan penelitian verifikasi yang didasari pada sifat penelitian eksplanatori yakni menjelaskan hubungan kausalitas antar variabel. Karena itu, rancangan penelitian yang bersifat verifikasi dan didasari pada eksplanatori yang

dipilih tersebut merupakan konsekuensi dari pilihan pemikiran deduktif, yang disimpulkan berdasarkan hasil pemikiran (logic) atau rasio, sehingga untuk meyakinkan kebenarannya diperlukan pengujian (verifikasi) yakni membandingkan dan atau menyesuaikan keadaan empiric dengan proses penalaran induktif. Hal ini didasarkan pada hasil pemilihan logika tersebut yang umumnya didasari atas ketidakpuasan terhadap sesuatu dan bukan hanya terhadap hasil pemikiran orang lain, bahkan termasuk dengan hasil pemikiran itu sendiri.

4.2 Teknik Penarikan Sampel

Teknik penarikan sampel dalam studi adalah dilakukan secara proporsional dengan memilih (10) sepuluh propinsi di Indonesia yang didasarkan pada pembukaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan rekomendasi status *clean and clear* (C&C) sesudah adanya koordinasi dan supervisi yang disajikan pada Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1
Perkembangan Izin Usaha Tambang di Indonesia Tahun 2015

No.	Propinsi	Sebelum Koordinasi dan Supervisi	Sesudah Koordinasi dan Supervisi
1.	Kalimantan Timur (Kaltim)	993 buah perusahaan	1.018 buah perusahaan
2.	Kalimantan Tengah (Kalteng)	553 buah perusahaan	554 buah perusahaan
3.	Kep. Bangka Belitung (Babel)	484 buah perusahaan	514 buah perusahaan
4.	Kalimantan Selatan (Kalsel)	404 buah perusahaan	404 buah perusahaan
5.	Kalimantan Barat (Kalbar)	370 buah perusahaan	374 buah perusahaan
6.	Sulawesi Tenggara (Sultra)	326 buah perusahaan	321 buah perusahaan
7.	Sumatera Selatan (Sumsel)	276 buah perusahaan	274 buah perusahaan
8.	Maluku Utara (Malut)	227 buah perusahaan	221 buah perusahaan
9.	Sulawesi Tengah (Sulteng)	224 buah perusahaan	204 buah perusahaan
10.	Sulawesi Selatan (Sulsel)	172 buah perusahaan	176 buah perusahaan

Sumber: Ditjen Minerba, 2015

Berdasarkan Tabel 4.1 maka diurutkan sampel propinsi penghasil tambang terbanyak setelah dilakukan koordinasi dan supervisi adalah sebagai berikut:

1. Propinsi Kalimantan Timur (Kaltim)
2. Propinsi Kalimantan Tengah (Kalteng)
3. Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel)
4. Propinsi Kalimantan Selatan (Kalsel)
5. Propinsi Kalimantan Barat (Kalbar)
6. Propinsi Sulawesi Tenggara (Sultra)
7. Propinsi Sumatera Selatan (Sumsel)
8. Propinsi Maluku Utara (Malut)
9. Propinsi Sulawesi Tengah (Sulteng)
10. Propinsi Sulawesi Selatan (Sulsel)

4.3 Objek Penelitian

Wilayah atau daerah yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah 10 (sepuluh) propinsi penghasil tambang di Indonesia selama periode tahun 2009 hingga tahun 2018. Penelitian ini menggunakan data panel (*pooled data*) dengan mengkolaborasi atau dengan menggabungkan data *cross section* 10 (sepuluh) propinsi penghasil tambang dan data *time series* 10 tahun.

Pada studi ini mengandung hubungan variabel bebas (eksogen), variabel antara (mediasi/interveining) dan variabel terikat (endogen). Variabel bebas (eksogen) meliputi investasi swasta yang dilambangkan dengan X_1 , dana bagi hasil sumber daya alam dilambangkan dengan X_2 , dan demokrasi dilambangkan dengan X_3 . Variabel antara (mediasi/interveining) meliputi ketimpangan pendapatan dilambangkan

dengan Y_1 , dan kriminalitas dilambangkan dengan Y_2). Sedangkan variabel terikat (endogen) terdiri dari pembangunan berkelanjutan yang dilambangkan dengan Y_3 .

4.4 Teknik Analisis Data

Prosedur analisis data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut; pertama, data diolah dan dianalisis dengan statistik dan dideskripsikan untuk memberikan gambaran umum tentang perekonomian makro dan pembangunan berkelanjutan di sepuluh propinsi penghasil tambang di Indonesia. Kedua, data diestimasi dengan melakukan analisis regresi lajur untuk tiga persamaan simultan dalam bentuk persamaan *reduced form*.

Model struktural dalam penelitian ini sebagaimana yang diajukan dan didasarkan pada kerangka konseptual sehingga kerangka model studi ini dapat ditulis dalam bentuk persamaan fungsional dengan 3 (tiga) persamaan adalah sebagai berikut:

$$Y_{1it} = f(X_{1it}, X_{2it}, X_{3it}), i = 1, 2, 3, \dots, 10; t = 1, 2, 3, \dots, 10.$$

$$Y_{2it} = f(X_{1it}, X_{2it}, X_{3it}), i = 1, 2, 3, \dots, 10; t = 1, 2, 3, \dots, 10.$$

$$Y_{3it} = f(Y_{1it}, Y_{2it}; X_{1it}, X_{2it}, X_{3it}), i = 1, 2, 3, \dots, 10; t = 1, 2, 3, \dots, 10.$$

Dimana;

X_{1it} = Investasi Swasta di propinsi i pada tahun t

X_{2it} = Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam di propinsi i pada tahun t

X_{3it} = Demokrasi di propinsi i pada tahun t

Y_{1it} = Ketimpangan Pendapatan di propinsi i pada tahun t

Y_{2it} = Kriminalitas di propinsi i pada tahun t

Y_{3it} = Pembangunan Berkelanjutan di propinsi i pada tahun t

Berdasarkan bentuk sistem persamaan struktural tersebut, maka secara eksplisit dapat dinyatakan dalam bentuk fungsi non linear adalah sebagai berikut:

$$e_{it}^{\gamma_1} = \alpha_0 X_{1it}^{\alpha_1} X_{2it}^{\alpha_2} e_{it}^{\alpha_3 X_{3it} + \mu_{1it}} \quad \dots(3.1)$$

$$e_{it}^{\gamma_2} = \beta_0 X_{1it}^{\beta_1} X_{2it}^{\beta_2} e_{it}^{\beta_3 X_{3it} + \mu_{2it}} \quad \dots (3.2)$$

$$e_{it}^{\gamma_3} = \gamma_0 X_{1it}^{\gamma_1} X_{2it}^{\gamma_2} e_{it}^{\gamma_3 X_{3it} + \gamma_4 Y_{1it} + \gamma_5 Y_{2it} + \mu_{3it}} \quad \dots (3.3)$$

Dimana:

e = bilangan experimental, dan $\alpha_n, \beta_n, \gamma_n$ adalah parameter.

i = propinsi i, dan t = tahun ke t

Ketiga fungsi non linear yakni pada Persamaan (3.1), Persamaan (3.2), dan Persamaan (3.3) dapat dinyatakan ulang dalam bentuk persamaan estimasi regresi linear secara simultan yang telah ditransformasikan menjadi linear dalam bentuk *logaritma natural (ln)*, adalah sebagai berikut:

$$Y_{1it} = \ln \alpha_0 + \alpha_1 \ln X_{1it} + \alpha_2 \ln X_{2it} + \alpha_3 X_{3it} + \mu_1 \quad \dots (3.1a)$$

$$Y_{2it} = \ln \beta_0 + \beta_1 \ln X_{1it} + \beta_2 \ln X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \mu_2 \quad \dots (3.2a)$$

$$Y_{3it} = \ln \gamma_0 + \gamma_1 \ln X_{1it} + \gamma_2 \ln X_{2it} + \gamma_3 X_{3it} + \gamma_4 Y_{1it} + \gamma_5 Y_{2it} + \mu_3 \quad \dots (3.3a)$$

Persamaan (3.1a) dan Persamaan (3.2a) dapat disederhanakan menjadi Persamaan (3.1b) dan Persamaan (3.2b) adalah sebagai berikut:

$$Y_{1it} = \alpha_0 + \alpha_1 \ln X_{1it} + \alpha_2 \ln X_{2it} + \alpha_3 X_{3it} + \mu_{1it} \quad \dots(3.1b)$$

Dimana:

α_0 = Konstanta

α_1 = Pengaruh langsung X_1 melalui Y_1

α_2 = Pengaruh langsung X_2 melalui Y_1

α_3 = Pengaruh langsung X_3 melalui Y_1 .

μ_{1it} = Composite random error

$$Y_{2it} = \beta_0 + \beta_1 \ln X_{1it} + \beta_2 \ln X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \mu_{2it} \quad \dots (3.2b)$$

Dimana:

β_0 = Konstanta.

β_1 = Pengaruh langsung X_1 terhadap Y_2 .

β_2 = Pengaruh langsung X_2 terhadap Y_2 .

β_3 = Pengaruh langsung X_3 terhadap Y_2 .

μ_{2it} = Composite random error

Persamaan (3.1c) dan Persamaan (3.2b) disubstitusi ke Persamaan (3.3a) menghasilkan persamaan *reduced form* adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} Y_{3it} &= \gamma_0 + \gamma_1 \ln X_{1it} + \gamma_2 \ln X_{2it} + \gamma_3 X_{3it} + \gamma_4 (\alpha_0 + \alpha_1 \ln X_{1it} + \alpha_2 \ln X_{2it} + \alpha_3 X_{3it} \\ &\quad + \mu_{1it}) + \gamma_5 ((\beta_0 + \beta_1 \ln X_{1it} + \beta_2 \ln X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \mu_{2it}) + \mu_{3it}) \\ &= \gamma_0 + \gamma_4 \alpha_0 + \gamma_5 \beta_0 + (\gamma_1 + \gamma_4 \alpha_1 + \gamma_5 \beta_1) \ln X_{1it} + (\gamma_2 + \gamma_4 \alpha_2 + \gamma_5 \beta_2) \ln X_{2it} \\ &\quad + (\gamma_3 + \gamma_4 \alpha_3 + \gamma_5 \beta_3) X_{3it} + \gamma_4 \mu_{1it} + \gamma_5 \mu_{2it} + \mu_{3it} \end{aligned}$$

$$Y_{3it} = \theta_0 + \theta_1 \ln X_{1it} + \theta_2 \ln X_{2it} + \theta_3 X_{3it} + e_{123it} \quad \dots (3.3b)$$

Dimana:

$\theta_0 = \gamma_0 + \gamma_4 \alpha_0 + \gamma_5 \beta_0$ adalah konstanta

$\theta_1 = \gamma_1 + \gamma_4\alpha_1 + \gamma_5\beta_1$ adalah pengaruh total X_1 terhadap Y_3 yang terdiri dari pengaruh langsung X_1 terhadap Y_3 sebesar γ_1 ditambah pengaruh tidak langsung X_1 hanya melalui Y_1 sebesar $\gamma_4\alpha_1$ ditambah pengaruh tidak langsung hanya melalui Y_2 sebesar $\gamma_5\beta_1$.

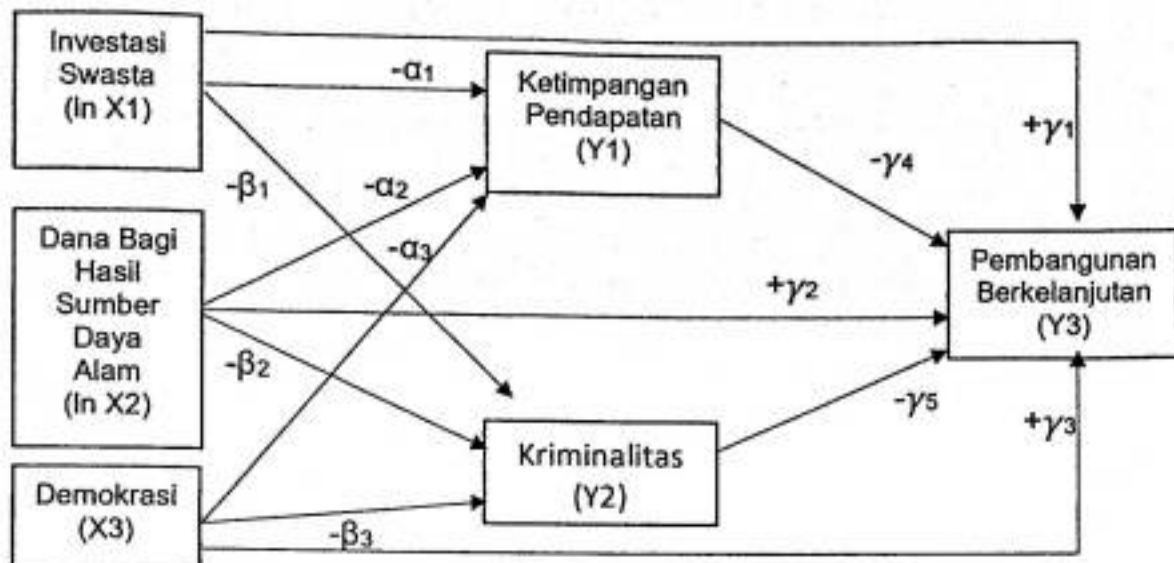
$\theta_2 = \gamma_2 + \gamma_4\alpha_2 + \gamma_5\beta_2$ adalah pengaruh total X_2 terhadap Y_3 yang terdiri dari pengaruh langsung X_2 terhadap Y_3 sebesar γ_2 ditambah pengaruh tidak langsung X_2 terhadap Y_1 sebesar $\gamma_4\alpha_2$ ditambah pengaruh tidak langsung X_2 terhadap Y_2 sebesar $\gamma_5\beta_2$.

$\theta_3 = \gamma_3 + \gamma_4\alpha_3 + \gamma_5\beta_3$ adalah pengaruh total X_3 terhadap Y_3 yang terdiri dari pengaruh langsung X_3 terhadap Y_3 sebesar γ_3 ditambah pengaruh tidak langsung X_3 terhadap Y_1 sebesar $\gamma_4\alpha_3$ ditambah pengaruh tidak langsung X_3 terhadap Y_2 sebesar $\gamma_5\beta_3$.

$e_{123it} = \gamma_4\mu_{1it} + \gamma_5\mu_{2it} + \mu_{3it}$ adalah *composite random error*

Dengan demikian Persamaan (3.1b), Persamaan (3.2b) dan Persamaan (3.3b) inilah yang merupakan persamaan fungsional dalam bentuk simultan (*Simultaneous Equation Model, SEM*) yang digunakan dalam penelitian ini.

Oleh karena itu, untuk mendeskripsikan persamaan *reduced form* di atas terhadap hubungan setiap variabel dalam kerangka pikir penelitian ini, maka diuraikan dalam skema diagram kerangka konseptual penelitian sebagai berikut:



Gambar 4.1 Kerangka Konseptual Penelitian

Menurut Gambar 4.1 dijelaskan bahwa kerangka kerangka konseptual penelitian ini dijelaskan sebagai berikut bahwa variabel investasi swasta, dana bagi hasil sumber daya alam dan demokrasi berpengaruh terhadap pembangunan berkelanjutan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui ketimpangan pendapatan. Kemudian variabel investasi swasta, dana bagi hasil sumber daya alam dan demokrasi berpengaruh langsung terhadap pembangunan berkelanjutan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui kriminalitas.

Adapun teknik analisa data dalam studi menggunakan analisis regresi berganda. Pengujian ini dilakukan untuk menjawab pengaruh langsung variabel eksogen (bebas) yaitu investasi swasta, dana bagi hasil sumber daya alam, dan demokrasi terhadap variabel antara (mediasi) yaitu ketimpangan pendapatan dan kriminalitas. Sedangkan untuk menjawab pengaruh variabel eksogen (bebas) yaitu investasi swasta, dana bagi hasil sumber daya alam, dan demokrasi terhadap variabel

endogen (terikat) yaitu pembangunan berkelanjutan. Data diolah menggunakan program SPSS versi 21.

Teknik pengujian hipotesis menggunakan pengujian asumsi klasik meliputi pengujian koefisien determinasi (R^2), uji F, dan uji t. Teknik pengujian hipotesis ini diuraikan sebagai berikut:

4.4.1 Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah 0 dan 1. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel bebas memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel terikat. Secara umum koefisien determinasi untuk data silang (*cross section*) relatif rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan, sedangkan untuk data runtun waktu (*time series*) biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi.

4.4.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji F dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara bersamaan, dengan tingkat signifikansi (kepercayaan) sebesar 5%. Apabila value < 5% maka dapat disimpulkan bahwa variabel bebas dapat mempengaruhi variabel

terikat, atau model yang digunakan layak (*Fit*). Pengujian hipotesis menggunakan uji signifikan simultan (F hitung) dengan penerimaan atau penolakan hipotesis sebagai berikut (Ghozali, 2011):

1. Jika nilai signifikan $> \alpha$ (0,05) berarti hipotesis tidak terbukti atau hipotesis ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat secara serentak.
2. Jika nilai signifikan $< \alpha$ (0,05) berarti hipotesis terbukti atau hipotesis diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat secara serentak.

4.4.3 Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t)

Menurut Ghozali (2011), Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel bebas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat. Untuk menguji hipotesis ini digunakan t hitung dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut:

1. Jika nilai signifikan $> \alpha$ (0,05) berarti hipotesis tidak terbukti atau hipotesis ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat secara individual.
2. Jika nilai signifikan $< \alpha$ (0,05) berarti hipotesis terbukti atau hipotesis diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat secara individual.

4.5 Definisi Operasional

Untuk mengoperasionalkan variabel-variabel yang dianalisis dalam penelitian ini maka berdasarkan klasifikasi variabel, kerangka konseptual, dan definisi operasional dari variabel yang ada adalah sebagai berikut:

1. Investasi swasta adalah realisasi besarnya penerimaan investasi swasta di dalam negeri pada sepuluh propinsi penghasil tambang di Indonesia tahun 2009-2018 dalam trilyun rupiah. Data investasi swasta ini merupakan penggabungan antara realisasi penerimaan investasi swasta asing (*foreign direct investment*) dan investasi swasta domestik (*domestik direct investment*) yang diambil dalam website BPS. Adapun nilai realisasi penerimaan investasi swasta ini diukur dalam rupiah.
2. Dana bagi hasil sumber daya alam adalah jumlah *sharing* bukan pajak /sumber daya alam yang ditetapkan dalam APBN dan APBD pada sepuluh propinsi penghasil tambang di Indonesia tahun 2009-2018 dalam rupiah yang diambil dalam website BPS. Periode pengamatan selama kurun waktu 2009 hingga 2018 yang diukur dalam trilyun rupiah.
3. Demokrasi diukur dengan menghitung indeks demokrasi pada sepuluh propinsi penghasil tambang selama tahun 2009-2018. Indeks demokrasi Indonesia (IDI) menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia yang telah dipublikasi melalui website BPS. Tingkat pencapaiannya berdasarkan indeks komposit atas 3 aspek, 11 variabel dan 28 indikator demokrasi. Tiga aspek itu yakni aspek kebebasan sipil, aspek hak-hak politik, dan aspek lembaga demokrasi;

11 variabel dan 28 indikator demokrasi. Adapun aspek, variabel dan indikator penyusun indeks demokrasi ini dapat dilihat pada Lampiran 4. Metode perhitungan indeks demokrasi ini menggunakan empat sumber data yaitu *review* surat kabar lokal, *review* dokumen (Perda, Pergub, dan lain-lain), *focus group discussion*, dan wawancara mendalam. Klasifikasi tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori yakni "baik" (indeks > 80), "sedang" (indeks 60-80), "buruk" (indeks < 60). Indeks demokrasi ini memuat sepuluh propinsi penghasil tambang di Indonesia selama periode 2009-2018 yang diambil dari website BPS.

4. Ketimpangan pendapatan diukur dalam rasio gini pada sepuluh propinsi penghasil tambang di Indonesia selama periode tahun 2009-2018. Rasio gini mencerminkan ketidakmerataan distribusi pendapatan penduduk. Angkanya antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna). Rasio gini menunjukkan jumlah persentase penerima pendapatan dikali dengan jumlah kumulatif persentase pendapatan. Rasio gini memuat indeks gini sepuluh propinsi penghasil tambang di Indonesia selama kurun waktu 2009-2018 yang diambil dari website BPS.

5. Kriminalitas diukur dengan indeks kriminalitas (*crime index*) yang mencerminkan peristiwa kejahatan (*crime rate*), yang mana angka indeks kriminalitas dirumuskan sebagai berikut: (BPS, 2014)

$$\text{Indeks Kriminalitas (IK)} = \frac{\text{Crime rate tahun } t}{\text{crime rate tahun dasar}} \times 100 \quad \dots(4.1)$$

Dimana indeks kriminalitas ini dihitung berdasarkan jumlah kejadian kriminalitas (*crime rate*) pada tahun *t* yang dibandingkan dengan tahun

dasar yaitu tahun 2010. *Crime rate* adalah resiko penduduk terkena tindak pidana per 100.000 penduduk menurut Kepolisian Daerah (Polda). Indeks kriminalitas ini diambil dari publikasi BPS (Buku Statistika Kriminal Indonesia) pada sepuluh propinsi penghasil tambang di Indonesia selama kurun waktu 2009-2018.

6. Pembangunan berkelanjutan yang merupakan sasaran akhir yang disintesis dan diuji menjadi Indeks Pembangunan Berkelanjutan (IPB) yang merupakan indeks komposit atas indeks Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Dalam menghitung indeks pembangunan berkelanjutan menggunakan metode pembobotan parameter peringkat (rangking). Metode pembobotan ini didasarkan atas pengambilan keputusan spasial yang sering kali menggunakan banyak parameter yang pasti dihadapkan pada masalah penentuan tingkat pengaruh satu parameter terhadap parameter lainnya yang menyusun fungsi keputusan. Pengambilan keputusan harus melakukan pembobotan untuk setiap parameter berdasarkan tingkat pengaruh atau nilai penting parameter yang bersangkutan. Nilai penting suatu parameter, dapat dilihat dari seberapa besar bobot yang diberikan untuknya dalam proses penentuan keputusan (Selamat, 2002).

Disamping itu, Fauzi (2014) telah menggunakan indeks pembangunan berkelanjutan dengan melakukan pembobotan parameter melalui skenario indeks komposit indeks pembangunan berkelanjutan. Pembobotan yang sama dilakukan antar dimensi pembangunan

berkelanjutan (ekonomi, sosial, dan lingkungan). Fokusnya pada studi ini bukan pada indikator penyusunnya, melainkan pada dimensi pembangunan yang mewakili masing-masing indikator. PDRB dan IKLH masing-masing mewakili dimensi ekonomi dan lingkungan, sedangkan IPM mewakili dua dimensi sekaligus yaitu sosial dan ekonomi. Agar bobot antar dimensi sama, maka masing-masing indikator diberi bobot yang berbeda, 1/6 untuk indeks PDRB, 3/6 untuk IPM, dan 2/6 untuk IKLH. Hal ini terangkum dalam Rumus (4.2) berikut:

$$IPB = \frac{\text{Indeks PDRB} + (3 \times \text{IPM}) + (2 \times \text{IKLH})}{6} \quad \dots (4.2)$$

Dengan demikian nilai indeks pada Rumus (4.2) yang diambil sebagai nilai indeks pembangunan berkelanjutan dalam studi ini.

7. Indeks Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan publikasi BPS (Buku Produk Domestik Regional Bruto) yang telah disebarluaskan pada website BPS. Indeks PDRB mengandung indeks perkembangan PDRB yang membandingkan PDRB atas dasar harga konstan dengan PDRB atas dasar harga berlaku pada setiap kategori menurut lapangan usaha. Dalam studi ini diambil indeks perkembangan PDRB pada sepuluh propinsi penghasil tambang di Indonesia pada kategori pertambangan, dan penggalian atas dasar harga konstan 2010, selama periode tahun 2009-2018.
8. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salahsatu publikasi BPS yang dapat dilihat di website BPS. IPM dihitung berdasarkan indeks komposit atas indeks kesehatan (angka harapan hidup), indeks pendidikan (rata2 lama sekolah dan harapan lama sekolah), dan indeks

pengeluaran (pengeluaran perkapita). Dalam studi ini IPM yang diambil terangkum dalam sepuluh propinsi penghasil tambang di Indonesia selama kurun waktu 2009-2018.

9. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) juga merupakan publikasi BPS (buku Statistika Lingkungan Hidup Indonesia) yang dapat dilihat di website BPS. IKLH ini dihitung berdasarkan indeks komposit atas indeks pencemaran air, indeks pencemaran udara, dan indeks tutupan hutan. Dalam studi ini IKLH yang diambil terangkum dalam sepuluh propinsi penghasil tambang di Indonesia selama kurun waktu 2009-2018.

BAB V

HASIL PENELITIAN

5.1 Gambaran Umum Penelitian

5.1.1 Perkembangan Investasi Swasta pada Propinsi Penghasil

Tambang di Indonesia

Adapun gambaran umum penelitian ini menyangkut data variabel investasi swasta, bagi hasil sumber daya alam, demokrasi, ketimpangan pendapatan, kriminalitas, dan pembangunan berkelanjutan. Berikut ini digambarkan data investasi swasta yang mewakili variabel X_1 yang diambil dari data realisasi investasi swasta dalam negeri propinsi penghasil tambang di Indonesia dibandingkan dengan Indonesia secara keseluruhan yang dirangkum pada Tabel 5.1.

Berdasarkan data pada Tabel 5.1 terlihat bahwa terjadi peningkatan nilai investasi swasta walaupun berjalan lambat dari tahun 2009-2013. Ini terjadi pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Namun memasuki periode Pemerintahan Jokowi-JK tahun 2014 terjadi penurunan nilai investasi swasta karena terjadi peristiwa politik yakni pergantian periode pemerintahan SBY ke periode pemerintahan Jokowi. Investor melakukan tindakan penundaan investasi yang disebabkan oleh faktor politik sejalan dengan berjalannya tahun politik.

Pada pemerintahan Jokowi banyak sekali dikeluarkan paket-paket kebijakan ekonomi yang terkesan memberatkan calon investor. Salah satu strategi pemerintah yakni dikeluarkannya Peraturan Presiden (Perpres)

Tabel 5.1
Realisasi Investasi Swasta di Dalam Negeri
Propinsi Penghasil Tambang di Indonesia Tahun 2009-2018
(Dalam Trilyun Rupiah)

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	RATA-RATA
PROVINSI											
KALTIM	82.200	7881.300	6569.100	5889.300	16034.600	12859.000	9611.300	6885.100	10980.200	11760.200	8855.230
KALTENG	1464.200	3507.700	3376.000	4529.600	1835.300	980.400	1270.100	8179.100	3037.800	10775.300	3895.550
BABEL	249.300	0.400	514.400	533.500	608.200	615.500	1023.700	2202.000	1734.700	6664.200	1414.590
KALSEL	870.900	2015.000	2118.300	3509.800	8299.200	2616.500	2060.400	6163.000	2981.900	10336.800	4097.180
KALBAR	517.100	1171.700	1404.000	2811.000	2522.100	4320.800	6143.500	9015.500	12380.900	12335.600	5262.220
SULTRA	-	19.200	59.000	907.300	1261.600	1249.900	2015.400	1794.200	3148.700	6778.600	1914.878
SUMSEL	580.300	1738.400	1068.900	2930.600	3396.000	7042.800	10944.100	8534.100	8200.200	10778.600	5521.400
MALUT	-	-	13.500	320.500	1114.900	156.300	48.200	8.800	1150.600	6775.600	1198.550
SULTENG	-	153.600	2620.200	602.800	605.300	95.800	968.400	1081.200	1929.700	6877.200	1659.356
SULSEL	1137.800	3212.300	3986.300	2318.900	921.000	4949.600	9215.300	3334.600	1969.400	6344.500	3738.970
RATA-RATA	700.257	2188.844	2172.970	2435.330	3659.820	3488.660	4330.040	4719.760	4751.410	8942.660	
INDONESIA	17 799.8	60 626.3	76 000.7	92 182	128 150.6	156 126.3	179 465.9	216 230.8	262 350.5	303 552.8	303 552.8

Sumber: www.bps.go.id.

No. 39 Tahun 2014. Pada prinsipnya paket kebijakan ini bermuara pada peningkatan investasi dan mendorong peningkatan daya saing.

Alhasil pada tahun 2015 terdapat respons positif langsung dapat terlihat dan dirasakan pada Propinsi Sumatera Selatan yakni nilai investasi swasta mencapai Rp 10.9 Trilyun dibandingkan dengan investasi swasta tahun 2014 sebesar Rp 7.04 trilyun. Selama kurun waktu 2009 hingga tahun 2018 rata-rata investasi swasta sebesar Rp 5.5 trilyun. Kalau dibandingkan dengan Indonesia secara keseluruhan selama periode 2009-2018 rata-rata investasi swasta per tahun sebesar Rp 303. 5 milyar.

Tren positif terjadi pada tahun 2017-2018. Hal ini terlihat pada Propinsi Kalimantan Timur bahwa realisasi investasi swasta mencapai Rp 11.7 trilyun pada tahun 2018 yang meningkat dari tahun 2017 hanya sebesar Rp 10.9 trilyun (atau rata-rata per tahun sebesar Rp 8.85 trilyun. Keadaan ini membawa respon cepat dan positif pemerintah dalam menghadapi pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), khususnya dengan menerbitkan serial paket kebijakan ekonomi oleh pemerintah Jokowi-JK. Paling tidak sudah dikeluarkan sekitar 18 paket kebijakan ekonomi oleh pemerintahan Presiden Jokowi.

Hal ini menggambarkan bahwa paket-paket kebijakan ekonomi yang berorientasi memberikan kemudahan berinvestasi, memangkas jalur birokrasi perijinan, serta upaya-upaya menghilangkan hambatan-hambatan ekonomi yang sering dikeluhkan oleh para investor.

Dengan demikian melalui hadirnya paket kebijakan ekonomi tersebut yang secara khusus mengatur resiko politik bagi investasi diharapkan kekhawatiran mengenai terjadinya *transfer risk* (resiko yang berhubungan dengan *capital payment*), *operational risk* (yang mengancam sumber daya lokal), *ownership control risk* (kemungkinan pengambilalihan atau penyitaan) bisa diminimalisasi, sekaligus menjadi jaminan bagi para investor untuk menanamkan modalnya.

5.1.2 Perkembangan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam pada Propinsi Penghasil Tambang di Indonesia

Adapun dana bagi hasil sumber daya alam yang mewakili variabel X_2 yang diambil dari *share* (dana bagi) hasil bukan pajak/sumber daya alam pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pada dasarnya Dana Bagi Hasil (DBH) lebih berfungsi sebagai penyeimbang fiskal antara pusat dan daerah dari pajak dan sumber daya alam (SDA) yang dibagihasilkan, termasuk sebagai pengkoreksi atas eksploitasi SDA selama ini.

Dana Bagi Hasil menjadi salah satu sumber pembiayaan yang berguna dalam menunjang kegiatan-kegiatan sektor publiknya. Oleh sebab itu, propinsi yang memiliki kekayaan SDA dan penghasilan pajak tinggi maka akan memiliki porsi pendapatan yang juga tinggi. Namun sayangnya potensi karakteristik SDA dan sumber pajak di Indonesia sangat beragam sehingga hal itu mempengaruhi sumber pendapatan daerah melalui mekanisme Transfer Ke Daerah (TKD). Karena

keterbatasan anggaran daerah tersebut akan menyebabkan penyediaan layanan publik menjadi lebih rendah.

Secara keseluruhan apabila dilihat pada Tabel 5.2 bahwa dana bagi hasil sumber daya alam (DBH SDA) pada propinsi penghasil tambang di Indonesia dan Indonesia secara keseluruhan memiliki tren yang menaik, di mana pada tahun 2009 Propinsi Sulawesi Selatan mencapai Rp 9 triliun menjadi sebesar Rp 97.9 triliun pada tahun 2018, serta pada Propinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2009 dialokasikan sebesar Rp 1.5 milyar meningkat menjadi Rp 98 milyar. Adapun rata-rata per tahun yang diterima pada propinsi ini adalah Rp 49 Milyar.

Kalau dibandingkan dengan Indonesia secara keseluruhan selama periode tahun 2009 hingga tahun 2018 rata-rata DBH SDA yang dihasilkan sebesar Rp 24.5 Trilyun. Dan nilai DBH SDA terbesar berada pada tahun 2014 yakni sebesar Rp 47.6 Trilyun.

Namun masalahnya porsi DBH yang diberikan ke daerah dapat berfluktuasi tergantung pengelolaan SDA dan pajaknya. Salah satu daerah dengan porsi DBH sangat tinggi adalah di Provinsi Kalimantan Timur. Pada tahun 2017, penerimaan transfer fiskal dalam APBD Propinsi ini menurun drastis. Dari Rp 3.17 trilyun pada tahun 2015 terus menurun menjadi Rp 1.2 trilyun pada tahun 2018. Hal ini dapat terjadi karena pengaruh fluktuasi dari DBH SDA dan pajak akibat kebijakan pemerintah pusat terkait TKD. Proporsi APBD Propinsi ini terdiri dari PAD sebesar 48 persen dan dana perimbangan sebesar 52 persen. Penyusun dana perimbangan terbesar berasal DBH SDA dari minyak dan gas (migas) dan

tambang serta DBH pajak. Pada tahun 2014 Propinsi ini menjadi penerima DBH SDA tertinggi dibandingkan propinsi lain di Indonesia.

Pada tahun 2014, Indonesia secara keseluruhan mengalami nilai transfer DBH SDA terbesar yakni Rp 47.6 Trilyun. Sedangkan pada tahun tersebut rata-rata nilai DBH SDA propinsi-propinsi penghasil tambang adalah sebesar Rp 606.78 milyar. Jika dibandingkan dengan tahun 2013 terjadi penurunan nilai transfer DBH SDA yang diterima oleh propinsi-propinsi penghasil tambang di Indonesia yakni sebesar Rp 661.2 milyar.

Propinsi Bangka Belitung mengalami kenaikan nilai transfer DBH SDA dari tahun 2017 sebesar Rp 12 Milyar menjadi Rp 122.5 Milyar pada tahun 2018. Hal ini disebabkan ditemukan tambang-tambang baru di propinsi ini yang mengakibatkan persentase penerimaan atas DBH SDA meningkat pula. Begitu juga yang dialami oleh Propinsi Kalimantan Selatan. Pada tahun 2009-2017 mengalami peningkatan penerimaan DBH SDA. Pada tahun 2017 mendapatkan DBH SDA sebesar Rp 71.3 Milyar. Pada tahun 2018 meningkat tajam menjadi Rp 145.4 Milyar.

Tabel 5.2
Perkembangan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA
Propinsi Penghasil Tambang di Indonesia
Tahun 2009-2018 (Dalam Rupiah)

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	RAT/
WINSI	2.523.474,916	3.620.846,163	3.116.597,570	5.268.684,084	4.446.313,563	3.532.243,333	3.166.218,336	2.154.070,925	1.545.912,582	1.233.211,322	3,06x
IM	45.741,426	51.961,488	49.900,000	131.068,852	146.986,818	198.245,696	202.946,136	12.581,089	163.537,809	254.445,331	12x
ENG	60.310,388	48.516,961	53.220,453	98.684,932	85.902,968	122.110,799	140.696,182	92.608,512	12.020,027	122.544,211	8x
SEL	361.576,568	309.529,316	374.000,000	646.336,615	584.114,343	596.622,189	604.921,470	835.291,936	16.741,832	766.447,221	52x
BAR	12.296,934	7.915,306	10.640,356	28.104,240	31.378,670	51.062,301	45.457,841	25.728,625	71.324,874	145.447,656	4x
TRA	5.645,752	7.106,547	3.904,000	45.493,192	59.378,675	61.153,215	73.568,737	37.088,482	38.199,559	123.544,332	4x
ISEL	502.680,051	862.163,718	847.399,318	1.127.002,330	1.180.856,653	1.395.070,591	749.983,666	631.146,676	1.031.578,078	1.322.447,809	96x
LUT	20.533,886	30.000,369	13.917,081	50.620,895	47.582,504	64.196,612	57.983,593	27.346,253	51.567,256	122.322,114	4x
TENG	1.516,833	1.893,270	2.252,842	14.426,121	18.212,925	25.866,332	31.254,392	37.389,645	86.271,426	98.677,900	3x
SEL	9.076,750	7.003,880	15.120,114	9.797,950	11.317,890	30.681,746	17.687,427	82.539,898	49.195,927	97.990,099	3x
TA- TA	354.285,350	494.692,702	448.695,173	742.021,921	661.204,501	606.788,481	529.071,878	393.579,204	306.634,937	428.707,800	
JONESIA	23.758,943,751	33.389,606,526	39.728,838,558	45.293,700,858	42.081,701,755	47.646,316,601	35.315,542,734	29.637,534,730	24.512,728,573	28.990,765,977	35,035

Sumber: www.bps.go.id.

5.1.3 Perkembangan Indeks Demokrasi pada Propinsi Penghasil Tambang di Indonesia

Adapun perkembangan indeks demokrasi Indonesia yang mewakili variabel X_3 pada propinsi penghasil tambang di Indonesia dan Indonesia secara keseluruhanyang berada pada kurun waktu 2009-2018 yang dimuat dalam Tabel 5.3. Berdasarkan data pada Tabel 5.3 terlihat bahwa saat pesta demokrasi tahun 2014 nilai demokrasi hampir seluruh sampel propinsi dan kondisi Indonesia menunjukkan nilai tertinggi di antara tahun-tahun yang lainnya.

Untuk Propinsi Kepulauan Bangka Belitung saja pada tahun 2018 memiliki nilai demokrasi yang mendekati 100 yakni 85,8. Ini membuktikan bahwa daerah ini telah memahami persepsi demokrasi di dalam kehidupan bermasyarakatnya. Dibandingkan tahun 2009 hanya memiliki nilai demokrasi sebesar 67 atau mengalami pertumbuhan tingkat demokrasi sebesar 1.2 persen.

Propinsi Kalimantan Barat mengalami penurunan nilai demokrasi setelah tahun politik 2014. Dari tahun 2014 hingga tahun 2018 mengalami penurunan angka indeks dari 80.5 menjadi 75.6. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat di propinsi ini tidak begitu aktif berpartisipasi dalam politik demokrasi. Selain itu terjadinya aspek kebebasan sipil yang menurun akibat meningkatnya hambatan kebebasan berkumpul dan berserikat serta menurunnya kebebasan dari diskriminasi. Untuk aspek hal-hal politik karena berkurangnya pengaduan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah yang menggambarkan kurangnya

kepedulian masyarakat mengoreksi kinerja pemerintah. Sedangkan turunnya aspek lembaga demokrasi disebabkan turunnya kinerja dan peran partai politik serta peran birokrasi pemerintah daerah.

Propinsi Sumatera Selatan dengan memiliki angka indeks demokrasi yang terus meningkat sebesar 82.33 di tahun 2018. Apalagi jika dibandingkan pada tahun 2009 hanya sebesar 72.5. Hal ini menunjukkan semakin besar masyarakat antusias terhadap kehidupan demokrasi di daerahnya.

Propinsi Maluku Utara juga mengalami hal yang sama semenjak adanya pemekaran propinsi. Ini terlihat pada tahun 2009 telah meraih demokrasi di atas 50 tepatnya sebesar 67.2 dan terus naik hingga tahun 2018 yaitu sebesar 75.98. Ini membuktikan bahwa masyarakat Propinsi Maluku Utara semakin aktif dalam politik dan kehidupan demokrasi.

Propinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2010 hingga tahun politik 2014 mengalami penurunan angka demokrasi. Nilai demokrasi nya rata-rata berada pada angka 50. Hal ini berarti sebagian masyarakat belum paham pentingnya kehidupan berdemokrasi bagi kemajuan daerah dan bangsa. Namun di tahun politik yaitu tahun 2014 telah mengalami kenaikan sebesar 72 persen atau sekitar pada angka indeks 50.2 menjadi 70.1.

Tabel 5.3
Perkembangan Indeks Demokrasi
Propinsi Penghasil Tambang di Indonesia
Tahun 2009-2018

NO	PROVINSI	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	RATA-RATA
1	KALIMANTAN TIMUR	72.31	73.04	66.37	71.23	68.13	77.77	81.24	73.64	73.73	74.23	73.17
2	KALIMANTAN TENGAH	77.63	71.1	76.28	65.78	64.15	79	73.46	74.77	75.31	75.56	73.30
3	BANGKA BELITUNG	67.01	65.94	67.13	69.37	68.79	75.32	72.31	83	85.77	85.66	74.03
4	KALIMANTAN SELATAN	66.63	70.94	66.47	61.13	63.71	70.84	74.76	73.43	73.79	73.55	69.53
5	KALIMANTAN BARAT	72.38	69.32	74.86	65.38	67.52	80.58	76.4	75.28	76.17	76.55	73.44
6	SULAWESI TENGGARA	64.29	54.79	57.56	57.26	52.61	70.13	69.44	71.13	79.45	73.22	64.99
7	SUMATERA SELATAN	72.52	73.65	67.92	73.17	67.12	74.82	79.81	80.95	82.05	82.33	75.43
8	MALUKU UTARA	67.21	59.92	59.17	66.83	64.06	67.9	61.52	73.27	75.41	75.98	67.13
9	SULAWESI TENGAH	66.02	66.63	64	64.97	64.5	74.36	76.67	72.2	73.03	75.67	69.81
10	SULAWESI SELATAN	61.48	56.67	65.31	68.55	65.2	75.3	67.9	68.53	70.42	74.55	67.39
	RATA-RATA	68.75	66.20	66.51	66.37	64.58	74.60	73.35	74.62	76.51	76.73	
	INDONESIA	67.3	63.17	65.48	62.63	63.72	73.04	72.82	70.09	71.14	74.2	68.36

Sumber: www.bps.go.id.

5.1.4 Perkembangan Ketimpangan Pendapatan pada Propinsi Penghasil Tambang di Indonesia

Adapun perkembangan ketimpangan pendapatan di propinsi penghasil tambang di Indonesia diukur dengan rasio gini. Pada Tabel 5.4 berikut terlihat perkembangan rasio gini antar propinsi penghasil tambang di Indonesia dan Indonesia secara keseluruhan.

Tabel 5.4
Perkembangan Rasio Gini (Ketimpangan Pendapatan)
Propinsi Penghasil Tambang di Indonesia
Tahun 2009-2018

NO	PROVINSI	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	RATA-RATA
1	KALTIM	0.379	0.368	0.323	0.363	0.366	0.361	0.315	0.328	0.333	0.346	0.348
2	KALTENG	0.293	0.304	0.334	0.332	0.358	0.365	0.300	0.347	0.327	0.346	0.331
3	BABEL	0.288	0.296	0.320	0.311	0.307	0.295	0.275	0.288	0.276	0.367	0.302
4	KALSEL	0.348	0.366	0.353	0.364	0.356	0.326	0.334	0.351	0.347	0.407	0.355
5	KALBAR	0.321	0.370	0.363	0.395	0.384	0.402	0.330	0.331	0.329	0.406	0.363
6	SULTRA	0.359	0.421	0.389	0.403	0.391	0.399	0.381	0.388	0.404	0.394	0.393
7	SUMSEL	0.313	0.340	0.401	0.397	0.375	0.381	0.334	0.362	0.365	0.397	0.367
8	MALUT	0.327	0.336	0.343	0.306	0.320	0.322	0.286	0.309	0.330	0.349	0.323
9	SULTENG	0.338	0.366	0.388	0.387	0.391	0.352	0.370	0.347	0.345	0.395	0.368
10	SULSEL	0.394	0.404	0.427	0.418	0.432	0.448	0.404	0.400	0.429	0.417	0.417
	RATA-RATA	0.336	0.357	0.364	0.368	0.368	0.365	0.333	0.345	0.349	0.382	
	INDONESIA	0.372	0.382	0.396	0.425	0.424	0.433	0.419	0.409	0.407	0.406	0.407

Sumber: www.bps.go.id.

Berdasarkan data pada Tabel 5.4 terlihat bahwa angka rasio gini Indonesia masih dalam kisaran 0.40 tepatnya angka rasio gini terbesar Indonesia berada pada angka 0.433 pada tahun 2014. Hal ini membuktikan bahwa terdapat terjadi ketimpangan distribusi pendapatan yang besar sebesar 43 persen. Artinya di Indonesia pada tahun 2014 terdapat kesenjangan pendapatan antara kaya dan miskin sebesar 43 persen. Kondisi yang ideal adalah dimana angka rasio gini mendekati

kurang dari 30 persen atau 0.30, dimana saat kondisi ini terjadi ketimpangan pendapatan yang kecil antara si kaya dan si miskin. Selama kurun waktu 2009-2018 Indonesia mengalami ketimpangan pendapatan rata-rata sebesar 40.7. Ini berarti bahwa Indonesia masuk dalam kategori sedang pada ketimpangan pendapatan.

Selain itu apabila dilihat dari 10 (sepuluh) propinsi penghasil tambang terbanyak di Indonesia, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memiliki angka ketimpangan pendapatan yang mendekati 0.30, yaitu tepatnya 0.276 pada tahun 2017. Ini membuktikan bahwa di di daerah ini terdapat pemerataan distribusi pendapatan pada tahun 2017.

Namun yang terjadi di Propinsi Sulawesi Selatan terlihat ketimpangan pendapatan terbesar dari keseluruhan sampel propinsi, yakni sekitar 0.448 pada tahun 2014. Ini membuktikan bahwa di propinsi terjadi ketidaksetaraan distribusi pendapatan sebesar 44,8 persen. Artinya terdapat terdapat jurang kesenjangan antara si kaya dan si miskin sebesar 44,8 persen.

Propinsi Kalimantan Timur telah mengalami penurunan ketimpangan pendapatan dari tahun 2009 yang hanya 37.9 persen menjadi 33.3 persen. Hal ini berarti terjadi penyerapan jumlah tenaga kerja di propinsi pada sektor andalannya yakni sektor pertambangan.

Keadaan yang serupa juga terjadi di Propinsi Kalimantan Selatan. Ini terlihat adanya pemeratan distribusi pendapatan dari tahun 2009 hingga tahun 2018 yakni rata-rata sebesar 35 persen yang cenderung stabil pada periode tahun tersebut.

5.1.5 Perkembangan Kriminalitas pada Propinsi Penghasil Tambang di Indonesia

Adapun perkembangan kriminalitas di propinsi penghasil tambang di Indonesia diukur dengan indeks kriminalitas yang terlihat dalam Tabel 5.5 berikut ini:

Tabel 5.5
Perkembangan Indeks Kriminalitas
Propinsi Penghasil Tambang di Indonesia
Tahun 2009-2018

NO	PROVINSI	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	RATA-RATA
1	KALTIM	88.98	86.61	94.27	83.12	90.76	93.25	90.38	90.25	96.91	90.32	90.49
2	KALTENG	86.61	93.59	98.04	97.68	96.96	81.43	98.21	99.66	99.75	98.66	95.06
3	BABEL	96.05	99.12	94.03	99.85	86.68	82.96	85.34	84.94	91.80	92.33	91.31
4	KALSEL	99.00	95.45	95.45	95.45	99.82	99.64	99.36	99.82	99.09	98.07	98.12
5	KALBAR	99.89	69.50	98.00	99.44	99.78	99.44	88.33	91.67	97.15	98.32	94.15
6	SULTRA	91.40	99.45	99.15	99.85	90.03	85.50	86.87	81.53	90.97	89.32	91.41
7	SUMSEL	81.20	99.15	97.00	93.60	88.80	96.00	93.60	93.60	91.32	91.34	92.56
8	MALUT	71.11	93.64	85.96	83.94	84.55	81.01	85.86	84.85	86.02	85.45	84.24
9	SULTENG	81.46	92.71	83.75	81.46	88.01	87.00	84.30	86.13	94.26	93.04	87.21
10	SULSEL	94.69	87.19	92.37	90.17	92.82	98.70	93.79	93.79	99.09	97.87	94.05
	RATA-RATA	89.04	91.64	93.80	92.46	91.82	90.49	90.60	90.62	94.64	93.47	
	INDONESIA	99.30	99.33	105.97	106.43	102.29	100.00	93.57	90.80	108.53	92.56	99.88

Sumber: Data diolah.

Dari Tabel 5.5 terlihat bahwa angka kriminalitas menunjukkan jumlah kriminalitas pada tahun tertentu dibandingkan dengan tahun dasar yaitu tahun 2010. Di Indonesia tahun 2016 merupakan tahun yang memiliki kriminalitas terendah yakni sebesar 90.80.

Propinsi Kalimantan Selatan mengalami peningkatan jumlah kejahatan selama kurun waktu 2009-2018 yang terlihat pada nilai kriminalitas sebesar 88.98 tahun 2009 menjadi 98.7 tahun 2018. Namun

apabila dilihat secara detail setiap tahun nya mengalami fluktuasi. Pada tahun 2012 sempat mengalami penurunan kriminalitas sebesar 83.12.

Propinsi Kalimantan Tengah juga mengalami peningkatan jumlah kejahatan selama kurun waktu 2009-2018 yang terlihat pada nilai kriminalitas sebesar 86.61 tahun 2009 menjadi 98.66 tahun 2018. Namun apabila dilihat secara detail setiap tahun nya mengalami fluktuasi. Pada tahun 2014 sempat mengalami penurunan kriminalitas sebesar 81.43.

Propinsi Bangka Belitung mengalami penurunan jumlah kejahatan selama kurun waktu 2009-2018 yang terlihat pada nilai kriminalitas sebesar 96.05 tahun 2009 menjadi 92.33 tahun 2018. Namun apabila dilihat secara detail setia tahun nya mengalami fluktuasi. Pada tahun 2012 sempat mengalami peningkatan kriminalitas sebesar 99.85.

Propinsi Kalimantan Selatan mengalami penurunan jumlah kejahatan selama kurun waktu 2009-2018 yang terlihat pada nilai kriminalitas sebesar 99.00 tahun 2009 menjadi 98.7 tahun 2018. Namun apabila dilihat secara detail setia tahun nya mengalami fluktuasi. Pada tahun 2013-2014 sempat mengalami penurunan kriminalitas sebesar 95.45.

Propinsi Sulawesi Tenggara mengalami penurunan jumlah kejahatan selama kurun waktu 2009-2018 yang terlihat pada nilai kriminalitas sebesar 91.07 tahun 2009 menjadi 89.32 tahun 2018. Namun apabila dilihat secara detail setia tahun nya mengalami fluktuasi. Pada tahun 2016 sempat mengalami penurunan kriminalitas sebesar 81.53. Hal

ini disebabkan banyak sektor informal membuka kesempatan kerja yang mengurangi pengangguran sehingga menambah penghasilan masyarakat.

Propinsi Sumatera Selatan mengalami peningkatan jumlah kejahatan selama kurun waktu 2009-2018 yang terlihat pada nilai kriminalitas sebesar 81.20 tahun 2009 menjadi 91.34 tahun 2018. Namun apabila dilihat secara detail setiap tahunnya mengalami fluktuasi. Pada tahun 2010 mengalami peningkatan kriminalitas sebesar 99.15.

Propinsi Maluku Utara mengalami peningkatan jumlah kejahatan selama kurun waktu 2009-2018 yang terlihat pada nilai kriminalitas sebesar 71.11 tahun 2009 menjadi 85.45 tahun 2018. Namun apabila dilihat secara detail setiap tahunnya mengalami fluktuasi. Pada tahun 2010 sempat mengalami peningkatan kriminalitas sebesar 93.64.

5.1.6 Perkembangan Indeks PDRB pada Propinsi Penghasil Tambang di Indonesia

Adapun perkembangan Indeks Produk Domestik Regional Bruto (PRDB) pada 10 (sepuluh) propinsi penghasil tambang terbanyak di Indonesia dan dibandingkan dengan Indonesia secara keseluruhan yang disajikan pada Tabel 5.6 berikut.

Adapun indeks PDRB pada tahun 2010 mengalami kenaikan sebesar 7.8 persen. Pada tahun 2013 meningkat tajam menjadi 46.1 persen. Namun pada tahun 2014 menurun tajam mencapai 9.4 persen. Hal ini disebabkan karena terjadinya kenaikan pendapatan secara

regional pada tahun 2014 sehingga dapat dikatakan selama periode 2009-2018 pada tahun 2014 Indonesia lebih sejahtera.

Tabel 5.6
Perkembangan Indeks PDRB
Propinsi Penghasil Tambang di Indonesia
Tahun 2009-2018

PROVINSI	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	RATA-RATA
KALTIM	110.19	117.77	139.98	150.29	149.95	114.86	117.90	111.24	112.58	113.83	123.86
KALTENG	111.46	111.78	135.78	158.10	183.09	147.58	150.35	161.78	175.94	175.91	151.18
BABEL	102.96	100.89	112.06	114.77	116.79	104.55	106.26	106.80	109.17	107.99	108.22
KALSEL	103.92	108.24	128.61	134.15	140.98	128.76	127.89	128.35	133.61	139.23	127.37
KALBAR	109.03	108.96	134.11	159.66	149.99	115.51	116.20	141.20	142.94	153.59	133.12
SULTRA	106.05	122.99	133.83	179.19	187.82	168.84	185.51	186.04	209.81	224.17	170.43
SUMSEL	104.88	110.64	128.74	143.99	154.79	117.66	122.30	126.66	133.50	145.88	128.90
MALUT	92.32	107.85	112.96	120.79	126.09	95.08	101.14	99.55	110.72	123.38	108.99
SULTENG	126.19	152.50	137.81	182.42	235.33	162.36	206.87	278.19	320.11	344.17	214.60
SULSEL	95.18	115.97	91.77	104.70	109.46	118.97	127.79	129.35	134.27	135.68	116.31
RATA-RATA	106.22	115.76	125.57	144.81	155.43	127.42	136.22	146.92	158.27	166.38	
INDONESIA	111.48	107.8	126.6	138.59	146.06	109.41	110.53	112.87	114.64	116.59	119.46

Sumber: www.bps.go.id.

Propinsi Maluku Utara memiliki penurunan indeks perkembangan PDRB pada tahun 2009 yang terlihat pada angka indeks PDRB-nya hanya 92.32. Artinya pada tahun 2008 propinsi ini mengalami penurunan kesejahteraan yang tergambar dari pendapatannya sebesar 7.7 persen. Sedangkan pada tahun 2013 mengalami peningkatan pendapatan sebesar 26.09 persen.

Propinsi Sulawesi Tengah dari tahun 2014 hingga tahun 2018 mengalami peningkatan pendapatan regional yang berarti telah terjadi peningkatan kesejahteraan. Hal ini ditandai dengan indeks perkembangan PDRB-nya hingga mencapai 344.17.

Begitu juga halnya Propinsi Sulawesi Tenggara juga mengalami peningkatan kesejahteraan pada tahun 2014 hingga tahun 2018. Ini terlihat pada pencapaian indeks perkembangan PDRB yang berturut-turut yaitu 168.84, 185.51, 186.04, 209.81 dan 224.17. Artinya selama periode 2014-2018 telah mengalami peningkatan pendapatan regional sebesar 95.5 persen.

5.1.7 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia pada Propinsi Penghasil Tambang di Indonesia

Adapun perkembangan indeks pembangunan manusia pada propinsi penghasil tambang di Indonesia dan dibandingkan dengan Indonesia secara keseluruhan selama periode 2009 hingga tahun 2018 terangkum dalam Tabel 5.7 berikut ini.

Berdasarkan data pada Tabel 5.7 bahwa indeks pembangunan manusia (IPM) Indonesia memiliki dua bentuk perhitungan yakni menggunakan metode lama dan metode baru. Hingga tahun 2013 dilakukan perhitungan IPM memakai metode lama. Selanjutnya tahun 2014 hingga saat ini nilai IPM menggunakan perhitungan metode baru.

Pada metode lama, nilai IPM dihitung berdasarkan pertama; angka melek huruf sudah tidak relevan mengukur tingkat pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu karena angka melek huruf di sebagian besar daerah sudah tinggi sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antar daerah dengan baik. Kedua; bahwasanya PDB perkapita tidak dapat menggambarkan pendapatan

masyarakat pada suatu wilayah. Di samping itu penggunaan rumus rata-rata aritmatika dalam perhitungan IPM menggambarkan pencapaian yang rendah di suatu dimensi dapat ditutupi dari dimensi lain.

Pada perhitungan metode baru, indikator yang berubah adalah angka melek huruf diganti dengan angka harapan lama sekolah dan PDB perkapita diganti dengan PNB perkapita. Selanjutnya metode agregasi diubah dari rata-rata aritmatik menjadi rata-rata geometrik.

Tabel 5.7
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia
Propinsi Penghasil Tambang di Indonesia
Tahun 2009-2018

NO	PROVINSI	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	RATA-RATA
1	KALTIM	75.11	75.56	76.22	76.71	73.21	73.82	74.17	74.59	75.12	74.32	74.88
2	KALTENG	74.36	74.64	75.06	75.46	67.41	67.77	68.53	69.13	69.79	69.54	71.17
3	BABEL	72.55	72.86	73.37	73.78	67.92	68.27	69.05	69.55	69.99	69.77	70.71
4	KALSEL	69.30	69.92	70.44	71.08	67.17	67.63	68.38	69.05	69.65	69.66	69.23
5	KALBAR	68.79	69.15	69.66	70.31	64.30	64.89	65.59	65.88	66.26	67.78	67.26
6	SULTRA	69.52	70.00	70.55	71.05	67.55	68.07	68.75	69.31	69.86	69.66	69.43
7	SUMSEL	72.61	72.95	73.42	73.99	66.16	66.75	67.46	68.24	68.86	69.67	70.01
8	MALUT	68.63	69.03	69.47	69.98	64.78	65.18	65.91	66.63	67.20	69.77	67.66
9	SULTENG	70.70	71.14	71.62	72.14	65.79	66.43	66.76	67.47	68.11	70.78	69.09
10	SULSEL	70.94	71.62	72.14	72.70	67.92	68.49	69.15	69.76	70.34	70.78	70.38
	RATA-RATA	71.25	71.69	72.20	72.72	67.22	67.73	68.38	68.96	69.52	70.17	
	INDONESIA	71.76	72.27	72.77	73.29	68.31	68.90	69.55	70.18	70.81	71.87	70.97

Sumber: www.bps.go.id.

Dari data Tabel 5.7 terlihat nilai IPM berkisar antara 56-80 yang berarti bahwa kualitas pembangunan manusia sudah berada di atas standar. Propinsi Kalimantan Tengah memiliki IPM tertinggi pada angka 75.46 pada tahun 2012, yang berarti bahwa propinsi ini dengan hasil tambang yang tersedia mendorong perbaikan kualitas pembangunan

manusia. Propinsi Kalimantan Barat memiliki nilai IPM yang terendah yang terlihat pada tahun 2013 berada pada angka 64.30.

Propinsi Bangka Belitung mengalami penurunan angka IPM. Pada tahun 2009 memperoleh IPM sebesar 72.6 namun tahun 2018 sebesar 69.77. Hal ini berarti angka partisipasi penduduk untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi menurun. Ditambah lagi tingkat pendapatan menurun sehingga mempengaruhi tingkat daya beli, konsumsi hingga pemenuhan gizi masyarakat.

Begitu juga yang terjadi di Propinsi Sumatera Selatan. Akibat adanya disparitas pendapatan yang tinggi menyebabkan kemampuan keluarga untuk melanjutkan pendidikan anaknya ke jenjang lebih tinggi menurun. Ini tergambar dengan penurunan nilai IPM pada tahun 2009 sebesar 72.6 menjadi 68.7 pada tahun 2018.

Pada Propinsi Sulawesi Selatan terdapat kestabilan nilai IPM. Ini terlihat dari tahun 2009 hingga tahun 2017 nilai IPM nya berkisar rata-rata sebesar 71. Ini membuktikan bahwa pendapatan perkapita masyarakat propinsi ini cenderung stabil sehingga kepedulian masyarakat akan pendidikan relative meningkat stabil.

Hal senada juga dialami oleh propinsi di Pulau Kalimantan yakni Propinsi Kalimantan Timur, Propinsi Kalimantan Tengah, Propinsi Kalimantan Selatan dan Propinsi Kalimantan Barat. Nilai IPM yang diperoleh cenderung stabil selama periode tahun 2009 hingga tahun 2018. Propinsi Kalimantan Timur rata-rata IPM selama periode tersebut adalah 75. Propinsi Propinsi Kalimantan Tengah, Propinsi Kalimantan Selatan

dan Propinsi Kalimantan Barat rata-rata berturut-turut sekitar 73, 70 dan 68.

5.1.8 Perkembangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada Propinsi Penghasil Tambang di Indonesia

Adapun perkembangan indeks lingkungan hidup pada propinsi penghasil tambang di Indonesia dan dibandingkan dengan Indonesia secara keseluruhan yang menjadi pembentuk indeks komposit atas pembangunan berkelanjutan dijelaskan dalam Tabel 5.8 berikut.

Tabel 5.8
Perkembangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Propinsi Penghasil Tambang di Indonesia
Tahun 2009-2018

NO	PROVINSI	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	RATA-RATA
1	KALTIM	68.63	62.22	70.75	73.12	73.21	74.00	81.15	76.85	75.65	75.43	73.10
2	KALTENG	45.70	50.38	63.98	70.84	69.71	70.37	74.09	74.71	71.47	71.55	66.28
3	BABEL	52.15	64.92	64.99	57.73	59.41	60.21	71.26	66.88	67.85	68.76	63.42
4	KALSEL	48.25	58.24	60.29	57.10	55.86	57.51	57.47	59.07	69.38	69.66	59.28
5	KALBAR	71.92	76.39	74.27	69.91	69.08	68.31	75.88	72.24	74.17	72.33	72.45
6	SULTRA	60.53	62.23	52.79	70.32	69.08	72.14	75.18	75.24	70.38	72.32	68.02
7	SUMSEL	69.30	75.70	77.50	56.73	58.53	61.62	69.06	67.27	69.18	69.35	67.42
8	MALUT	78.80	79.72	73.09	79.31	76.56	77.22	75.97	72.46	74.55	73.54	76.12
9	SULTENG	67.62	62.89	62.64	64.76	63.67	64.06	76.43	70.54	69.39	70.44	67.24
10	SULSEL	60.53	62.23	52.79	70.32	69.08	72.14	75.18	75.24	70.38	70.57	67.85
	RATA-RATA	62.34	65.49	65.31	67.01	66.42	67.76	73.17	71.05	71.24	71.40	
	INDONESIA	59.79	61.07	60.25	64.21	63.13	63.42	68.23	65.73	66.46	69.45	64.17

Sumber: www.bps.go.id.

Perhitungan nilai IKLH merupakan indeks komposit atas indeks pencemaran air, indeks pencemaran udara dan indeks luas tutupan hutan-lahan. Apabila nilai IKLH mencapai 100 berarti telah terjadi penurunan ngsi lingkungan hidup.

Dari data pada Tabel 5.8 terlihat sepanjang periode tahun 2009 hingga tahun 2018 bahwa Propinsi Kalimantan Tengah memiliki indeks kualitas lingkungan hidup yang terendah yakni berada pada angka 45.70 pada tahun 2009. Sedangkan Propinsi Kalimantan Timur memiliki indeks kualitas lingkungan hidup yang tertinggi yakni berada pada angka 81.15 pada tahun 2015. Artinya telah terjadi degradasi sumber daya alam dan lingkungan di Propinsi Kalimantan Timur di tahun 2015 dan di Propinsi Kalimantan Tengah cenderung masih memiliki lingkungan dan sumber daya alam yang masih asri pada tahun 2009.

Tapi yang terjadi di tahun 2018, Propinsi Kalimantan Tengah telah mengalami kenaikan nilai IKLH sebesar 71.6. Artinya di propinsi ini telah terjadi penurunan kualitas fungsi lahan dan hutan sebesar 72 persen. Karena propinsi ini banyak bermunculan pembukaan izin perusahaan tambang, sehingga menggerus lahan dan hutan yang ada.

Hal yang sama juga terjadi di Propinsi Kalimantan Selatan dan Propinsi Kalimantan Barat. Di Propinsi Kalimantan Selatan telah meningkatkan nilai IKLH sebesar 48.3 tahun 2009, meningkat drastis pada tahun 2017 mencapai 69.7. Di Propinsi Kalimantan Barat memperoleh nilai IKLH sebesar 71.9 pada tahun 2009 dan di tahun 2018 mencapai 72.3.

Namun berbeda dengan Propinsi Maluku Utara. Di propinsi ini terjadi penurunan nilai IKLH selama periode tahun 2009 hingga tahun 2018. Nilai IKLH pada tahun 2009 sebesar 78.8. Kemudian menurun menjadi 74.5. Hal ini berarti bahwa karena geografis propinsi berbentuk

kepulauan yang luas lutupan hutan dan lahan tidak banyak sehingga menyebabkan menurunnya nilai IKLH propinsi ini.

5.1.9 Perkembangan Indeks Pembangunan Berkelanjutan pada Propinsi Penghasil Tambang di Indonesia

Perkembangan indeks pembangunan berkelanjutan pada propinsi penghasil tambang di Indonesia dan dibandingkn dengan Indonesia secara keseluruhan yang tersusun atas indeks komposit menurut indeks PDRB, IPM, dan IKLH terangkum dalam Tabel 5.9 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.9
Perkembangan Indeks Pembangunan berkelanjutan
Propinsi Penghasil Tambang di Indonesia
Tahun 2009-2018

NO	PROVINSI	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	RATA-RATA
1	KALTIM	78.80	78.15	85.02	87.78	86.00	80.72	83.79	81.45	81.54	81.28	82.45
2	KALTENG	70.99	72.74	81.49	87.69	87.46	81.94	84.02	86.43	88.04	87.94	82.87
3	BABEL	70.82	74.89	77.03	75.26	73.23	71.63	75.99	74.87	75.81	75.80	74.53
4	KALSEL	68.05	72.41	76.75	76.93	75.70	74.45	74.66	75.61	80.22	81.26	75.60
5	KALBAR	76.54	78.20	81.94	85.07	80.18	74.47	77.46	80.55	81.68	83.60	79.97
6	SULTRA	72.61	76.24	75.18	88.83	88.11	86.22	90.35	90.74	93.36	96.30	85.79
7	SUMSEL	76.89	80.15	84.00	79.90	78.39	73.53	77.13	77.65	79.74	82.27	78.96
8	MALUT	75.97	79.06	77.93	81.56	78.93	74.18	75.14	74.06	76.90	79.96	77.37
9	SULTENG	78.92	81.95	79.66	88.06	93.34	81.63	93.34	96.61	96.54	96.23	92.73
10	SULSEL	71.51	75.88	68.96	77.24	75.23	78.12	80.93	81.52	81.01	81.53	77.19
	RATA-RATA	74.11	76.97	78.79	82.83	81.66	77.69	81.28	82.65	84.88	86.62	
	INDONESIA	74.39	74.46	77.57	81.15	79.54	73.83	75.94	75.81	76.67	78.52	76.79

Sumber: Data diolah.

Berdasarkan Tabel 5.9 terlihat bahwa Indonesia selama periode 2009-2018 mengalami fluktuasi indeks pembangunan berkelanjutan (IPB). Perhitungan IPB ini didasarkan atas indeks komposit atas dimensi indeks yang mewakili pembangunan berkelanjutan yakni dimensi ekonomi yang

mewakilinya yakni indeks PDRB, dimensi sosial yang mewakilinya yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan dimensi lingkungan yang mewakilinya adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

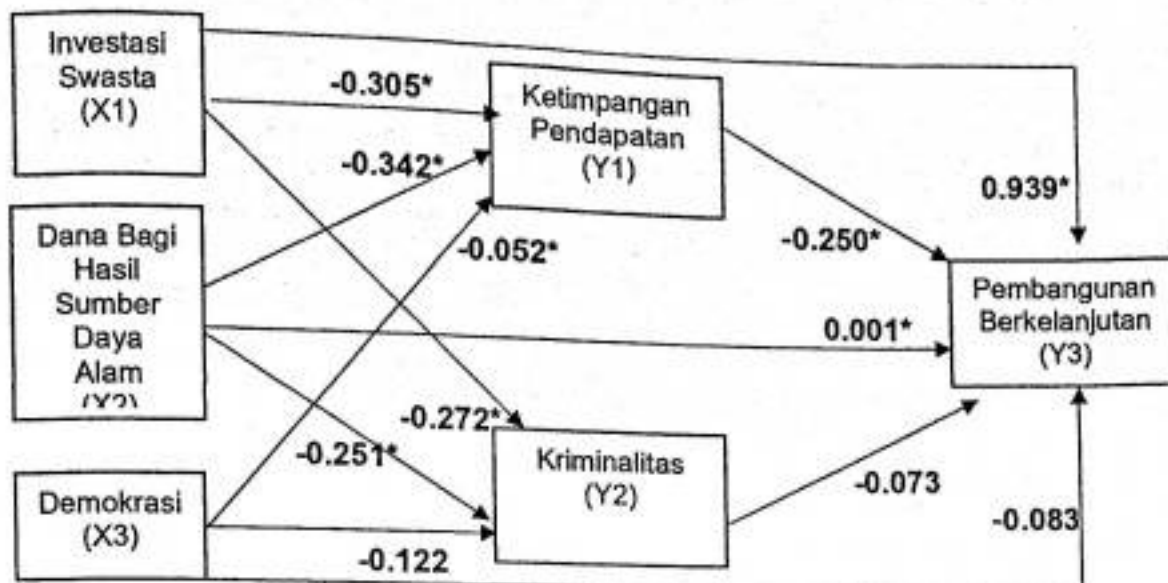
Kalau dibandingkan antara tahun 2009 dengan tahun 2018, IPB Indonesia berada pada 74.39 di tahun 2009 menjadi 78.52 pada tahun 2018. Artinya terjadi trend yang meningkat dari awal periode pengamatan hingga akhir periode pengamatan. Hal ini disebabkan karena di Indonesia pada rentang periode tersebut secara keseluruhan telah mengalami mampu mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Walaupun memang belum maksimal.

Dari tahun 2009 hingga tahun 2018 terlihat tren pembangunan berkelanjutan meningkat. Ini disebabkan adanya gairah investasi yang digalakkan oleh pemerintah dengan memberikan kemudahan-kemudahan bagi calon investor. Hal ini sangat dirasakan oleh investor pada saat Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Ini terlihat pada Propinsi Sulawesi Tengah dan propinsi lainnya. Pada tahun 2009 Propinsi Sulawesi Tengah mempunyai indeks pembangunan berkelanjutan sebesar 78.92 kemudian meningkat pada tahun 2018 menjadi 96.23. Artinya telah terjadi peningkatan pembangunan berkelanjutan hampir dua kali lipat selama kurun waktu sepuluh tahun yakni periode tahun 2009 hingga tahun 2018.

Kemudian dari tahun 2013 hingga tahun 2014 kembali tren pembangunan berkelanjutan menurun di seluruh propinsi penghasil tambang di Indonesia kecuali Propinsi Sulawesi Selatan. Rata-rata IPB di

tahun 2013 tersebut sebesar 81.66 turun menjadi 77.69 pada tahun 2014. Tetapi tahun 2014 hingga tahun 2018 kembali memperlihatkan peningkatan tren indeks pembangunan berkelanjutan. Hal ini disebabkan akibat adanya pergantian pemerintahan presiden dari Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ke Presiden Joko Widodo. Pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo dikeluarkan paket-paket kebijakan pembangunan yang mengkhawatirkan para calon investor ke Indonesia dengan mengurangi resiko bisnis. Seiring berjalan waktu paket-paket kebijakan Pemerintahan Jokowi telah kembali menguntungkan para investor dan meningkatkan pendapatan regional propinsi-propinsi ini.

Adapun hasil estimasi besarnya pengaruh langsung (*direct effect*), pengaruh tidak langsung (*indirect effect*) dan total pengaruh (*total effect*) dari variabel investasi swasta, dana bagi hasil sumber daya alam, demokrasi, ketimpangan pendapatan, dan kriminalitas terhadap pembangunan berkelanjutan berdasarkan nilai dan koefisien estimasi sesuai dengan hipotesis yang telah dikemukakan, dapat dilihat pada Gambar 3.1 berikut:



Gambar 5.1 Hasil Estimasi Penelitian

Berdasarkan Gambar 5.1 dapat dijelaskan bahwa secara langsung antara investasi swasta dan dana bagi hasil sumber daya alam berpengaruh positif dan signifikan pembangunan berkelanjutan. Sedangkan antara demokrasi terhadap pembangunan berkelanjutan berpengaruh positif dan tidak signifikan.

Adapun investasi swasta, dana bagi hasil sumber daya alam, dan demokrasi mempunyai hubungan positif dan signifikan terhadap pembangunan berkelanjutan secara tidak langsung melalui ketimpangan pendapatan. Dan investasi swasta, dana bagi hasil sumber daya alam, dan demokrasi mempunyai hubungan positif dan tidak signifikan terhadap pembangunan berkelanjutan secara tidak langsung melalui kriminalitas.

5.2 Hasil Estimasi Pengaruh Investasi Swasta terhadap Pembangunan Berkelanjutan Baik Secara Langsung maupun Tidak Langsung Melalui Ketimpangan Pendapatan dan Kriminalitas

Hasil estimasi studi ini menjelaskan mengenai pengaruh secara langsung investasi swasta terhadap pembangunan berkelanjutan dan pengaruh secara tidak langsung investasi swasta terhadap pembangunan berkelanjutan melalui ketimpangan pendapatan dapat dilihat pada Tabel 5.10 berikut.

Investasi swasta terhadap pembangunan berkelanjutan mempunyai hubungan positif dan signifikan secara langsung. Investasi swasta terhadap pembangunan berkelanjutan secara tidak langsung melalui ketimpangan pendapatan mempunyai pengaruh positif dan signifikan. Selanjutnya investasi swasta terhadap pembangunan berkelanjutan secara tidak langsung melalui kriminalitas mempunyai pengaruh negatif dan tidak signifikan.

Investasi swasta mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan berkelanjutan secara langsung. Ini terlihat dari nilai koefisien regresi sebesar 0.639 dan nilai t hitung sebesar 2.616. Pada tingkat kepercayaan yang lebih kecil dari 5 persen yaitu sebesar 1 persen. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesa (H_1) diterima. Dengan demikian setiap peningkatan investasi swasta sebesar 10 persen maka menambah ketimpangan pendapatan sebesar 6.39 persen pada sepuluh propinsi penghasil tambang di Indonesia. Begitupun sebaliknya.

Tabel 5.10
Hasil Estimasi Investasi Swasta
terhadap Pembangunan Berkelanjutan melalui
Ketimpangan Pendapatan dan Kriminalitas

Pengaruh Antar Variabel	Koefisien Regresi untuk Pengaruh Variabel		
	Pengaruh Langsung	Pengaruh Tidak Langsung	Pengaruh Total
Pengaruh Langsung			
Investasi Swasta terhadap Pembangunan Berkelanjutan $X_1 \rightarrow Y_3$	0.639* (γ_1) (t hitung = 2.616) (Sig. = 0.019)		
Pengaruh Tidak Langsung			
Investasi Swasta terhadap Pembangunan Berkelanjutan melalui Ketimpangan Pendapatan $X_1 \rightarrow Y_1 \rightarrow Y_3$	-0.305* (α_1) (t hitung = -2.953) (Sig. = 0.043)	(-0.305* x -0.250*) 0.076* ($\gamma_4 \alpha_1$)	(0.639* (γ_1) + 0.076* ($\gamma_4 \alpha_1$) + 0.019 ($\gamma_5 \beta_1$)) = 0.734*
Investasi Swasta terhadap Pembangunan Berkelanjutan melalui Kriminalitas $X_1 \rightarrow Y_2 \rightarrow Y_3$	-0.272* (γ_5) (t hitung = -2.923) (Sig. = 0.047)	(-0.272* x -0.073) 0.019 ($\gamma_5 \beta_1$)	
	-0.073 (β_1) (t hitung = -0.588) (Sig. = 0.558)		

Sumber: Lampiran, *) = signifikan

Berdasarkan Tabel 5.10 bahwa secara tidak langsung investasi swasta memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan berkelanjutan melalui ketimpangan pendapatan pada sepuluh propinsi penghasil tambang di Indonesia selama kurun waktu 2009-2018. Ini terlihat pada nilai koefisien regresi sebesar 0.076 yang merupakan

perkalian antara koefisien regresi pengaruh langsung investasi swasta sebesar -0.305 dan nilai t hitung sebesar -2.953 terhadap ketimpangan pendapatan. Kemudian diteruskan antara ketimpangan pendapatan terhadap pembangunan berkelanjutan dengan nilai koefisien regresi sebesar -0.250 dan nilai t hitungnya sebesar -2.649. Pada tingkat kepercayaan 5 persen dapat disimpulkan bahwa hipotesa (H_{1a}) ditolak.

Adapun investasi swasta mempunyai pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pembangunan berkelanjutan secara tidak langsung melalui kriminalitas. Ini dibuktikan dengan nilai koefisien regresi sebesar 0.019 yang merupakan perkalian antara koefisien regresi pengaruh langsung investasi swasta sebesar -0.272 dan nilai t hitung yakni sebesar -2.923 terhadap kriminalitas. Kemudian diteruskan antara kriminalitas terhadap pembangunan berkelanjutan dengan nilai koefisien regresi sebesar -0.073 dan nilai t hitung sebesar -0.588. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesa (H_{1b}) ditolak.

Oleh karena itu, pengaruh total atas investasi swasta terhadap pembangunan berkelanjutan melalui ketimpangan pendapatan dan kriminalitas merupakan penjumlahan dari pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung atas investasi swasta terhadap pembangunan berkelanjutan melalui ketimpangan pendapatan dan kriminalitas, yang mempunyai hubungan positif dan signifikan. Hal ini dapat dibuktikan pada Tabel 5.10 tentang pengaruh total dengan nilai koefisien regresi sebesar 0.038 (yang merupakan penjumlahan dari nilai koefisien regresi pengaruh langsung investasi swasta terhadap pembangunan berkelanjutan sebesar

0.639 ditambah dengan nilai koefisien regresi investasi swasta terhadap pembangunan berkelanjutan secara tidak langsung melalui ketimpangan pendapatan sebesar 0.076, ditambah dengan nilai koefisien regresi investasi swasta terhadap pembangunan berkelanjutan secara tidak langsung melalui kriminalitas sebesar 0.019).

5.3 Hasil Estimasi Pengaruh Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam terhadap Pembangunan Berkelanjutan Baik Secara Langsung maupun Tidak Langsung Melalui Ketimpangan Pendapatan dan Kriminalitas

Dana bagi hasil sumber daya alam (DBH SDA) mempunyai hubungan positif dan signifikan terhadap pembangunan berkelanjutan secara langsung pada sepuluh propinsi penghasil tambang di Indonesia. Dana bagi hasil sumber daya alam mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan berkelanjutan secara tidak langsung melalui ketimpangan pendapatan. Dan dana bagi hasil sumber daya alam mempunyai pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pembangunan berkelanjutan secara tidak langsung melalui kriminalitas. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 5.11 berikut.

Berdasarkan Tabel 5.11 bahwa dana bagi hasil sumber daya alam mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan berkelanjutan secara langsung. Ini dibuktikan dengan nilai koefisien regresi sebesar 0.001 dan nilai t hitung sebesar 2.402. Pada tingkat kepercayaan yang lebih kecil dari 5 persen, maka dapat disimpulkan

bahwa hipotesa (H_2) diterima. Sehingga apabila terjadi penambahan dana bagi hasil sumber daya alam sebesar 10 persen maka meningkatkan pembangunan berkelanjutan sebesar 0.01 persen pada sepuluh propinsi penghasil tambang di Indonesia selama kurun waktu 2009-2018. Begitu juga sebaliknya.

Berdasarkan Tabel 5.11 dijelaskan bahwa dana bagi hasil sumber daya alam terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan berkelanjutan secara tidak langsung melalui ketimpangan pendapatan pada sepuluh propinsi penghasil tambang di Indonesia. Ini terlihat pada nilai koefisien regresi sebesar 0.021 yang merupakan perkalian antara koefisien regresi pengaruh langsung dana bagi hasil sumber daya alam terhadap ketimpangan pendapatan sebesar -0.111 dan nilai t hitung sebesar -2.317. Kemudian diteruskan kepada ketimpangan pendapatan terhadap pembangunan berkelanjutan dengan nilai koefisien regresi sebesar -0.188 dan nilai t hitungnya sebesar -2.643. Pada tingkat kepercayaan 5 persen dapat disimpulkan bahwa hipotesa (H_{2a}) ditolak.

Adapun dana bagi hasil sumber daya alam mempunyai pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pembangunan berkelanjutan secara tidak langsung melalui kriminalitas. Ini dibuktikan dengan nilai koefisien regresi sebesar 0.018 yang merupakan perkalian antara koefisien regresi pengaruh langsung dana bagi hasil sumber daya alam terhadap kriminalitas yakni sebesar -0.251 dan nilai t hitung sebesar -2.932 serta mempunyai tingkat kepercayaan dibawah 5 persen. Kemudian diteruskan antara kriminalitas terhadap pembangunan berkelanjutan dengan nilai

koefisien regresi sebesar -0.073 dan nilai t hitungnya sebesar -0.588
 Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesa (H_{2b}) ditolak.

Tabel 5.11
Hasil Estimasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
terhadap Pembangunan Berkelanjutan melalui
Ketimpangan Pendapatan dan Kriminalitas

Pengaruh Antar Variabel	Koefisien Regresi untuk Pengaruh Variabel		
	Pengaruh Langsung	Pengaruh Tidak Langsung	Pengaruh Total
Pengaruh Langsung			
DBH SDA terhadap Pembangunan Berkelanjutan $X_2 \rightarrow Y_3$	0.001* (γ_2) (t hitung = 2.402) (Sig. = 0.015)		
Pengaruh Tidak Langsung			
DBH SDA terhadap Pembangunan Berkelanjutan melalui Ketimpangan Pendapatan $X_2 \rightarrow Y_1 \rightarrow Y_3$	-0.342* (γ_4) (t hitung = -2.643) (Sig. = 0.032) -0.250* (α_2) (t hitung = -2.649) (Sig. = 0.011)	(-0.342* x -0.250*) 0.085* ($\gamma_4\alpha_2$)	(0.001* (γ_2) + 0.085* ($\gamma_4\alpha_2$) + 0.018 ($\gamma_6\beta_2$)) = 0.104*
DBH SDA terhadap Pembangunan Berkelanjutan melalui Kriminalitas $X_2 \rightarrow Y_2 \rightarrow Y_3$	-0.251* (γ_6) (t hitung = -2.932) (Sig. = 0.045) -0.073 (β_2) (t hitung = -0.588) (Sig. = 0.558)	(-0.251* x -0.073) 0.018 ($\gamma_6\beta_2$)	

Sumber: Lampiran, *) = signifikan

Oleh karena itu, pengaruh total atas dana bagi hasil sumber daya alam terhadap pembangunan berkelanjutan melalui ketimpangan pendapatan dan kriminalitas merupakan penjumlahan dari pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung atas dana bagi hasil sumber daya alam terhadap pembangunan berkelanjutan melalui ketimpangan pendapatan dan kriminalitas, yang mempunyai hubungan positif dan

signifikan. Hal ini dapat dibuktikan pada Tabel 5.11 tentang pengaruh total dengan nilai koefisien regresi sebesar 0.104 (yang merupakan penjumlahan dari nilai koefisien regresi pengaruh langsung dana bagi hasil sumber daya alam terhadap pembangunan berkelanjutan sebesar 0.001 ditambah dengan nilai koefisien regresi dana bagi hasil sumber daya alam terhadap pembangunan berkelanjutan secara tidak langsung melalui ketimpangan pendapatan sebesar 0.085, ditambah dengan nilai koefisien regresi dana bagi hasil sumber daya alam terhadap pembangunan berkelanjutan secara tidak langsung melalui kriminalitas sebesar 0.018).

5.4 Hasil Estimasi Pengaruh Demokrasi terhadap Pembangunan Berkelanjutan Baik Secara Langsung maupun Tidak Langsung Melalui Ketimpangan Pendapatan dan Kriminalitas

Menurut hasil analisa yang telah dilakukan bahwa demokrasi mempunyai hubungan negatif dan tidak signifikan terhadap pembangunan berkelanjutan secara langsung. Demokrasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan berkelanjutan secara tidak langsung melalui ketimpangan pendapatan. Demokrasi memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pembangunan berkelanjutan secara tidak langsung melalui kriminalitas. Untuk melihat pengaruh langsung dan tidak langsung antara demokrasi terhadap pembangunan berkelanjutan melalui ketimpangan pendapatan dan kriminalitas dapat dilihat pada tabel 5.12

Berdasarkan Tabel 5.12 menunjukkan bahwa demokrasi mempunyai pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pembangunan berkelanjutan secara langsung pada sepuluh propinsi penghasil tambang di Indonesia. Ini dibuktikan dengan nilai koefisien regresi sebesar -0.083 dan nilai t hitung sebesar -0.627. Pada tingkat kepercayaan 53.2 persen yang lebih besar dari 5 persen, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesa (H_3) ditolak.

Adapun demokrasi mempunyai hubungan positif dan signifikan terhadap pembangunan berkelanjutan secara tidak langsung melalui ketimpangan pendapatan. Ini ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi sebesar 0.013 yang merupakan perkalian antara koefisien regresi pengaruh langsung demokrasi terhadap ketimpangan pendapatan sebesar -0.052 dan nilai t hitung sebesar -3.884. Kemudian diteruskan ketimpangan pendapatan terhadap pembangunan berkelanjutan dengan nilai koefisien regresi sebesar -0.250 dan nilai t hitung sebesar -2.649. Artinya hipotesa (H_{3a}) ditolak.

Tabel 5.12
Hasil Estimasi Demokrasi
terhadap Pembangunan Berkelanjutan melalui
Ketimpangan Pendapatan dan Kriminalitas

Pengaruh Antar Variabel	Koefisien Regresi untuk Pengaruh Variabel		
	Pengaruh Langsung	Pengaruh Tidak Langsung	Pengaruh Total
Pengaruh Langsung			
Demokrasi terhadap Pembangunan Berkelanjutan $X_3 \rightarrow Y_3$	-0.083 (γ_3) (t hitung = -0.627) (Sig. = 0.532)		
Pengaruh Tidak Langsung			
Demokrasi terhadap Pembangunan Berkelanjutan melalui Ketimpangan Pendapatan $X_3 \rightarrow Y_1 \rightarrow Y_3$	-0.052* (γ_4) (t hitung = -3.884) (Sig. = 0.020) -0.250* (α_3) (t hitung = -2.649) (Sig. = 0.011)	(-0.052* x -0.250*) 0.013* ($\gamma_4\alpha_3$)	(-0.083 (γ_3) + 0.013* ($\gamma_4\alpha_3$) + 0.009* ($\gamma_5\beta_3$)) = -0.061*
Demokrasi terhadap Pembangunan Berkelanjutan melalui Kriminalitas $X_3 \rightarrow Y_2 \rightarrow Y_3$	-0.122 (γ_5) (t hitung = -0.087) (Sig. = 0.778) -0.073 (β_3) (t hitung = -0.588) (Sig. = 0.558)	(-0.122 x -0.073) 0.009 ($\gamma_5\beta_3$)	

Sumber: Lampiran, *) = signifikan

Berdasarkan hasil analisa bahwa demokrasi mempunyai hubungan positif dan tidak signifikan terhadap pembangunan berkelanjutan secara tidak langsung melalui kriminalitas pada sepuluh propinsi penghasil tambang di Indonesia. Ini dibuktikan dengan nilai koefisien regresi sebesar 0.009 yang merupakan perkalian antara koefisien regresi pengaruh langsung demokrasi terhadap kriminalitas sebesar -0.122 dan nilai t hitung sebesar -0.087. Kemudian diteruskan kriminalitas terhadap pembangunan berkelanjutan dengan nilai koefisien regresi sebesar -0.0073 dan nilai t hitung sebesar -0.588. Artinya hipotesa (H_{3b}) ditolak.

Dengan demikian pengaruh total atas demokrasi terhadap pembangunan berkelanjutan melalui ketimpangan pendapatan dan kriminalitas merupakan penjumlahan dari pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung atas demokrasi terhadap pembangunan berkelanjutan melalui ketimpangan pendapatan dan kriminalitas, yang mempunyai hubungan negatif dan signifikan. Hal ini dapat dibuktikan pada Tabel 5.12 tentang pengaruh total dengan nilai koefisien regresi yakni sebesar -0.061 (yang merupakan penjumlahan dari nilai koefisien regresi pengaruh langsung demokrasi terhadap pembangunan berkelanjutan sebesar -0.083 ditambah dengan nilai koefisien regresi demokrasi terhadap pembangunan berkelanjutan secara tidak langsung melalui ketimpangan pendapatan sebesar 0.013, ditambah dengan nilai koefisien regresi demokrasi terhadap pembangunan berkelanjutan secara tidak langsung melalui kriminalitas sebesar 0.009).

5.5 Hasil Estimasi Persamaan Struktural

5.5.1 Hasil Estimasi Persamaan (3.1)

Berdasarkan persamaan *reduced form* yang memuat 3 (tiga) fungsi persamaan struktural yaitu pada Bab IV maka dilakukan estimasi sebagai berikut. Adapun Persamaan (3.1a) dapat ditulis: (Lampiran 1)

$$Y_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 \ln X_{1it} + \alpha_2 \ln X_{2it} + \alpha_3 X_{3it} + e_{it}$$

$$Y_{1it} = 39.652 - 0.305 \ln X_{1it} - 0.342 \ln X_{2it} - 0.052 X_{3it} + e_{1it} \quad \dots (5.1)$$

T hitung	(8.598)	(-2.953)	(-2.643)	(-3.884)
Sig.	(0.000)	(0.043)	(0.032)	(0.020)

$$R_{lit}^2 = 0.825, F \text{ hitung} = 1.834, \text{Sig. } F = 0.046, e_{lit} = \sqrt{1 - R_{lit}^2} = 0.418$$

Pada Persamaan (5.1) menjelaskan hubungan antara investasi swasta, dana bagi hasil sumber daya alam, dan demokrasi secara langsung terhadap ketimpangan pendapatan. Adapun hubungan variasi antara investasi swasta, dana bagi hasil sumber daya alam, dan demokrasi secara langsung terhadap ketimpangan pendapatan sebesar 0.825 (82.5 persen). Artinya terdapat hubungan variasi yang kuat yakni mendekati 100 persen yang memuat variasi ketimpangan pendapatan secara langsung dapat dijelaskan oleh variasi investasi swasta, dana bagi hasil sumber daya alam, dan demokrasi. Sisanya 17.5 persen dijelaskan oleh hubungan variasi yang lain. Sedangkan kesalahan dalam melakukan estimasi fungsi persamaan simultan ini adalah sebesar 0.418 (41.8) persen.

Adapun hubungan masing-masing variabel secara keseluruhan memiliki variasi simultan yang signifikan. Ini dapat dibuktikan dengan nilai F hitung 1.834 pada tingkat kepercayaan yang lebih kecil dari 5 persen yaitu sebesar 0.046 (4.6 persen). Artinya investasi swasta, dana bagi hasil sumber daya alam, dan demokrasi secara langsung memiliki variasi yang simultan terhadap ketimpangan pendapatan. Hubungan parsial antara investasi swasta, dana bagi hasil sumber daya alam, dan demokrasi secara langsung terhadap ketimpangan pendapatan telah dijelaskan pada Sub Bab 5.2.

5.5.2 Hasil Estimasi Persamaan (3.2)

Adapun hasil estimasi yang telah dilakukan dalam menganalisis Persamaan (3.2) seperti diuraikan sebagai berikut:

$$Y_{2it} = \beta_0 + \beta_1 \ln X_{1it} + \beta_2 \ln X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + e_{2it}$$

$$Y_{2it} = 79.903 - 0.272 \ln X_{1it} - 0.251 \ln X_{2it} - 0.122 X_{3it} + e_{2it} \quad (5.2)$$

T hitung	(9.100)	(-2.923)	(-2.932)	(-0.087)
Sig.	(0.000)	(0.047)	(0.045)	(0.778)

$$R_{2it}^2 = 0.825, F \text{ hitung} = 1.863, \text{Sig. } F = 0.041, e_{2it} = \sqrt{1 - R_{2it}^2} = 0.418$$

Dari hasil estimasi Persamaan (5.2) yang menjelaskan hubungan investasi swasta, dana bagi hasil sumber daya alam, dan demokrasi secara langsung terhadap kriminalitas, terbukti bahwa variasi hubungan yang kuat. Ini terlihat dari nilai koefisien determinasi (R_{2it}^2) sebesar 0.825 (82.5 persen) yang mendekati 100 persen. Sisanya 17.5 persen dijelaskan oleh variasi hubungan yang lain. Adapun terjadi kesalahan dalam melakukan estimasi (*error term*) sebesar 0.418 (41.8 persen).

Selain itu untuk melihat tingkat signifikansi variasi hubungan yang simultan antara investasi swasta, dana bagi hasil sumber daya alam, dan demokrasi secara langsung terhadap kriminalitas dapat ditunjukkan pada nilai F hitung sebesar 1.863 dengan tingkat kepercayaan yang kurang dari 5 persen atau sebesar 0.41 (4.1 persen). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kriminalitas dapat dijelaskan oleh investasi swasta, dana bagi hasil sumber daya alam, dan demokrasi secara langsung dan simultan. Hubungan masing-masing variabel terhadap kriminalitas telah dijelaskan pada Sub Bab 5.3.

5.5.3 Hasil Estimasi Persamaan (3.3)

Pada Bab IV ditulis Persamaan (3.3a) sebagai berikut: (Lampiran 3)

$$Y_{3it} = \theta_0 + \theta_1 \ln X_{1it} + \theta_2 \ln X_{2it} + \theta_3 X_{3it} + e_{123it}$$

$$\theta_0 = \gamma_0 + \gamma_4 \alpha_0 + \gamma_5 \beta_0 = 76.788 + 39.652 + 79.903 = 196.340$$

$$\theta_1 = \gamma_1 + \gamma_4 \alpha_1 + \gamma_5 \beta_1 = 0.639 + 0.076 + 0.019 = 0.734$$

$$\theta_2 = \gamma_2 + \gamma_4 \alpha_2 + \gamma_5 \beta_2 = 0.001 + 0.085 + 0.018 = 0.104$$

$$\theta_3 = \gamma_3 + \gamma_4 \alpha_3 + \gamma_5 \beta_3 = (-0.083) + 0.013 + 0.009 = -0.061$$

$$Y_{3it} = 196.340 + 0.349 \ln X_{1it} + 0.276 \ln X_{2it} - 0.028 X_{3it} + e_{123it} \quad \dots (5.3)$$

$$R_{3it}^2 = 0.839, F \text{ hitung} = 1.801, \text{Sig. } F = 0.020, \mu_{2it} = \sqrt{1 - R_{3it}^2} = 0.401$$

Adapun Persamaan (5.3) menjelaskan hubungan antara investasi swasta, dana bagi hasil sumber daya alam, dan demokrasi secara total (kesleuruhan) terhadap pembangunan berkelanjutan melalui ketimpangan pendapatan dan kriminalitas. Adapun hubungan variasi antara investasi swasta, dana bagi hasil sumber daya alam, dan demokrasi secara total terhadap pembangunan berkelanjutan melalui ketimpangan pendapatan dan kriminalitas sebesar 0.839 (83.9 persen). Artinya terdapat hubungan variasi yang kuat yakni mendekati 100 persen yang memuat variasi pembangunan berkelanjutan dijelaskan oleh variasi investasi swasta, dana bagi hasil sumber daya alam, demokrasi, ketimpangan pendapatan, dan kriminalitas. Sisanya 16.1 persen dijelaskan oleh hubungan variasi yang lain. Sedangkan kesalahan dalam melakukan estimasi fungsi persamaan simultan ini adalah sebesar 0.401 (40.1 persen).

Adapun hubungan masing-masing variabel secara keseluruhan memiliki variasi simultan yang signifikan. Ini dapat dibuktikan dengan nilai F hitung 1.801 pada tingkat kepercayaan yang lebih kecil dari 5 persen yaitu sebesar 0.020 (2 persen). Artinya investasi swasta, dana bagi hasil sumber daya alam, demokrasi, ketimpangan pendapatan, dan kriminalitas secara keseluruhan memiliki variasi yang simultan terhadap pembangunan berkelanjutan.

BAB VI

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

6.1 Analisis dan Implikasi Pengaruh Investasi Swasta terhadap Pembangunan Berkelanjutan melalui Ketimpangan Pendapatan dan Kriminalitas

Berdasarkan hasil studi menunjukkan bahwa secara langsung investasi swasta dapat memberikan pengaruh positif dan signifikan sebagaimana yang diharapkan terhadap pembangunan berkelanjutan pada sepuluh propinsi penghasil tambang di Indonesia. Hasil ini sesuai dengan hipotesis (H_1) yang menyatakan bahwa investasi swasta berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan berkelanjutan.

Hal ini didasari atas pertumbuhan pendapatan terus meningkat sepanjang tahun 2016 hingga 2017. Karena kepercayaan investor mulai kembali dengan adanya investasi di bidang infrastruktur yang semakin banyak dan rupiah yang stabil. Penjualan kendaraan bermotor cenderung naik dan pertumbuhan kredit pun meningkat.

Pembangunan infrastruktur di Indonesia telah membaik terutama dalam hal transportasi logistik dan pengolahan air memajukan pembangunan ekonomi, usaha, dan sosial. *Global Competitiveness Report* menempatkan Indonesia pada peringkat 60 dari 138 negara dalam hal infrastruktur. Infrastruktur yang baik mendorong perdagangan internasional, daya saing, dan penanaman modal asing di Indonesia. (OECD, 2016).

Selain itu investasi dalam bidang energi dan listrik telah dikembangkan oleh pemerintah. Hal ini disebabkan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) hanya memiliki sedikit sumber daya keuangan untuk berinvestasi skala besar, sehingga permintaan melebihi pasokan. Pemerintah berencana meningkatkan kapasitas pembangkit listrik sampai 35 GW hingga tahun 2020 serta menghapus penggunaan bahan bakar minyak yang berbiaya tinggi dan meningkatkan penggunaan batu bara dan sumber energi terbarukan. Selain itu PLN adalah suatu bentuk monopoli pemerintah dan sangat bergantung pada subsidi pemerintah untuk menjembatani selisih antara biaya produksi dan harga jual yang ditetapkan pemerintah (OECD, 2015).

Dengan adanya penambahan infrastruktur dan reformasi peraturan yang meringankan investor maka mendorong investasi tetap kuat dan ekspor lebih cepat. Sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kisaran 5 persen per tahun sejak tahun 2013. Kemudian meningkatkan pendapatan dan kepercayaan konsumen akan menopang kenaikan konsumsi rumah tangga (OECD, 2015).

Pertumbuhan PDB Indonesia berkembang di atas kisaran 5 % sejak tahun 2013. Kebijakan makroekonomi yang mendukung, keyakinan yang lebih besar, dan permintaan eksternal yang lebih besar mendorong kegiatan perekonomian pada tahun 2017, dan momentum ini diperkirakan berlanjut hingga tahun 2020. Konsumsi terus menjadi penopang pengeluaran. Keyakinan konsumen relatif tinggi sehingga mendukung kenaikan pendapatan. Investasi infrastruktur meningkat kuat dan impor

barang modal melonjak naik. Sektor jasa tumbuh dengan kuat. Kenaikan harga komoditas terutama untuk produk-produk mineral mendukung kegiatan pertambangan. Lingkungan usaha secara keseluruhan lebih besar berkat reformasi peraturan yang terus berjalan. Hal ini menjadi tantangan bagi pembangunan berkelanjutan ke depan (OECD, 2018).

Dengan demikian terjadinya kenaikan investasi swasta di bidang pembangunan infrastruktur dan sumber daya energi mendorong pertumbuhan PDB dan menambah konsumsi rumah tangga. Seperti riset yang dilakukan oleh Hornberg, 2011; Bhnadari, 2006; Babatunde, 2018; Ahmad; 2017, dan Orellana, 2011.

Lingkungan usaha yang baik merupakan faktor penting yang mendorong penanaman modal. Peraturan yang tidak tumpang tindih dan tidak berlebihan di berbagai tingkatan pemerintah mempermudah pendirian dan pengoperasian usaha, baik pelaku usaha asing maupun domestik. Indonesia telah melakukan liberalisasi terhadap pembatasan investasi yang masuk seiring waktu, meskipun bekalangan ini lajunya lebih lambat (Rostow, 1960; Milanonic, 2003,)

Saat ini terjadi perkembangan positif yaitu adanya revisi daftar negatif investasi pada bulan Mei 2016 yang menghapus pembatasan kepemilikan asing di 35 sektor sehingga sektor-sektor tersebut kini dibuka sepenuhnya untuk kepemilikan asing, dan hal ini menjadi pengaturan penanaman modal asing Indonesia semakin dekat dengan tingkat keterbukaan internasional dan regional. Langkah ini menandakan sikap lebih positif terhadap investasi swasta-asing, terutama dengan dicabutnya

atau dikurangnya pembatasan kepemilikan asing di sektor penting. Sebagai contoh, asing kini diperbolehkan menguasai sepenuhnya pembangkit listrik panas bumi yang berkapasitas lebih dari 10 MW dan menguasai 49 % pembangkit listrik yang berkapasitas lebih kecil. Asing juga akan diperbolehkan menguasai sepenuhnya usaha *e-commerce* (perdagangan elektronik), tetapi pembatasan investasi swasta-asing di sektor ritel masih berlaku. Langkah ini menjadi momen penting karena daftar negatif sebelumnya, yang dikeluarkan pada tahun 2014, mengambil pendekatan yang lebih heterogen terhadap investasi swasta-asing (OECD, 2016).

Meskipun tampak adanya liberalisasi, daftar 2014 membalik tren keterbukaan yang ada dalam beberapa periode sebelumnya, dan secara khusus membuat investasi swasta-asing di beberapa sektor penting, seperti pertambangan, jadi lebih ketat. Selanjutnya aturan divestasi ini mengurangi minat penanaman modal asing pada proyek besar jangka panjang yang padat modal, dan adanya keputusan yang tampak serampangan dari pemerintah daerah (seperti kasus Churchill Mining di Kalimantan Timur) juga menimbulkan keengganan di kalangan investor asing ((Plama Consortium Bulgaria, 2008; Churchill Mining, 2016).

Berdasarkan hasil analisa didapatkan bahwa secara tidak langsung investasi swasta mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan berkelanjutan melalui ketimpangan pendapatan. Ini disebabkan bahwa investasi swasta pada sepuluh propinsi penghasil tambang Indonesia belum mampu menciptakan kesempatan kerja

terhadap masyarakat ataupun untuk mendongkrak pendapatan masyarakat. Selain itu, sebaran investasi swasta mampu mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan karena memanfaatkan tenaga kerja tidak terampil berpendapatan rendah.

Keberadaan tenaga kerja asing di Indonesia merupakan faktor kebijakan investasi di Indonesia dengan orientasi kepada efektifitas dan efisiensi. Jadi kalau penggunaan tenaga kerja Indonesia itu efisien dan hasilnya efektif maka pastilah tenaga kerja Indonesia yang dipakai. Namun walau efisien tapi tidak efektif karena etos kerja rendah maka investor tentu menggunakan tenaga kerja sendiri walau mahal. Karena dalam investasi waktu adalah hal yang sangat penting untuk unggul dalam persaingan dan penghematan. Hal ini harus disadari sebagaimana prinsip *business as usual* (OECD, 2018).

Hal ini berbeda dengan riset dilakukan oleh Brown et al (1993); Tsai (1995); Wood (1995); Paolo (2006) bahwa investasi sebenarnya dapat membantu mengurangi ketimpangan pendapatan saat diterapkan pemanfaatan tenaga kerja tidak terampil yang berpendapatan rendah. Hal ini mengakibatkan dengan adanya peningkatan investasi menaikkan pendapatan golongan rendah. Investasi merangsang pertumbuhan ekonomi dan manfaat akhirnya menyebar ke seluruh ekonomi. Dan investasi baru menciptakan tempat kerja baru bagi tenaga kerja berketerampilan rendah.

Pada tahun 2014 terjadi pembangunan infrastruktur ekonomi dengan pembangunan kawasan industri smelter sebagai akibat UU

Minerba. Ditambah lagi tidak adanya pengawasan yang lemah dari pemerintah sehingga menyebabkan banyaknya jumlah tenaga kerja asing ilegal yang berada di Indonesia. Masalah itu bukan karena pemerintah sengaja tidak melakukan pengawasan tetapi lebih karena aturan yang dibuat era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengenai Perpres Nomor 72 tahun 2014 yang tidak memuat soal pengenaan sanksi dalam penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia. Kemudian diperbaharui lagi di era Presiden Jokowi agar tidak merugikan Indonesia dan investor.

Ditambah lagi bahwa investasi swasta memegang peranan penting dalam pembangunan nasional. Investasi swasta terbesar berada pada sektor energi pada tahun 2017. Adapun sektor yang mempunyai nilai investasi tertinggi setelah sektor energi adalah sektor kelistrikan dengan total investasi Rp1.035 trilyun untuk 1 program. Kemudian ada sektor konstruksi jalan sebanyak 74 proyek dengan total nilai investasi sebesar Rp 684 trilyun. Diikuti oleh sektor perkeretaapian sebanyak 23 proyek dengan nilai investasi sebesar Rp 613 trilyun. Dan terakhir adanya 30 proyek sektor pemukiman kawasan dengan nilai investasi sebesar Rp 290 trilyun. Kelima sektor ini merupakan proyek strategis nasional dengan investasi swasta memiliki nilai investasi terbesar. Ini terlihat bahwa terdapat 12 proyek energi dengan nilai total investasi sebesar Rp 1.242 trilyun.

Berdasarkan hasil studi ini menunjukkan bahwa secara tidak langsung investasi swasta tidak memberikan pengaruh terhadap pembangunan berkelanjutan melalui kriminalitas pada sepuluh propinsi penghasil tambang di Indonesia. Karena di Indonesia adanya investasi

swasta belum dapat menurunkan kriminalitas. Investasi swasta belum menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran serta membuka lapangan pekerjaan baru yang mengakibatkan tingkat kriminalitas meningkat. Hal ini berbeda dengan yang diungkapkan oleh Becker (1968); (Braithwaite, 1979); Bourgiugnon (2000); Kelly (2000).

Investasi swasta yang ada di Indonesia belum menyerap pasar tenaga kerja. Walaupun ada reformasi kerangka penetapan upah minimum melalui kenaikan upah minimum. Tapi menurut *survey of adult skill* yang dilakukan oleh OECD tahun 2015 bahwa keterampilan pekerja tampak masih lemah. Karena rendahnya tingkat kemajuan kemampuan baca tulis dan berhitung. Kurang dari sepertiga orang dewasa berusia 15 hingga 60 tahun memiliki pendidikan setara SMA. Rentang sebaran angka kemampuan di kalangan orang dewasa jauh lebih besar dibandingkan dengan negara lain yang ikut dalam survei ini. Sehingga terjadi kesenjangan keterampilan yang paling besar di antara profil profesional yakni dalam bidang keterampilan berbahasa Inggris dan computer dan diikuti oleh keterampilan dalam berpikir dan berperilaku (OECD, 2016).

Ketidakcocokan keterampilan (*skill mismatch*) menjadi masalah di Indonesia. Terlepas dari angka pengangguran di kalangan lulusan perguruan tinggi, banyak perusahaan menyatakan bahwa mereka mengalami kesulitan menemukan pekerja terampil. Pada tahun 2010, sekitar 55 % dari lulusan pendidikan tinggi memiliki kualifikasi berlebih (*over-qualified*) untuk bekerja di pekerjaan mereka. Hanya 5 % dari semua perusahaan di Indonesia yang menawarkan pelatihan formal bagi

pekerjaannya. Selain itu, terjadinya dualism pasar tenaga kerja menjadikan berbagai pelatihan tersebut kemungkinan besar tidak ditawarkan ke sejumlah besar angkatan kerja yang bekerja di sektor informal (OECD, 2016).

Selain itu, kondisi angkatan kerja yang didominasi oleh lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) ke bawah di salah satu propinsi penghasil tambang di Indonesia yaitu Propinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018 yakni sekitar 733.269 orang atau sekitar 58.63 persen yang dijelaskan dalam Gambar 6.3. Kemudian diikuti oleh angkatan kerja dengan lulusan Sekolah Lanjutan Atas (SLTA) sebesar 26.28 persen. Seterusnya angkatan kerja dengan latar belakang pendidikan tinggi hanya 15.09 persen. Artinya bahwa dengan kemampuan akademis dan keahlian rendah maka wajarlah terjadi ketimpangan distribusi pendapatan.

Adapun nilai Indeks Pembangunan Berkelanjutan (IPB) Propinsi Sulawesi Tenggara mengalami kenaikan pada tahun 2017-2018 yakni sebesar 112.05 menjadi 117.08 (seperti yang tertera dalam Tabel 5.9 pada Bab V). Hal ini memperkuat argumentasi bahwa walaupun daya serap tenaga kerja tamatan Sekolah Menengah Pertama (SMP) tinggi di pasar tenaga kerja yang dibayar dengan upah sesuai tingkat pendidikannya tetap mendorong ketimpangan pendapatan antar berbagai tingkat pendidikan. Hal ini menyebabkan meningkatnya indeks pembangunan berkelanjutan di Propinsi Sulawesi Tenggara.

Menurut Stack (1984); (Fajnzylber, 2002); Van Gestel et all (2008) dalam riset nya mengungkapkan bahwa dengan adanya hubungan bisnis

menimbulkan ketidaksetaraan pendapatan melahirkan ketegangan sosial, kriminalitas, transaksi fiktif dan praktek pencucian uang.

Kemudian orang yang kurang mampu merasa disingkirkan atau dirampas bila dibandingkan orang yang kaya. Perasaan tidak beruntung dan tidak adil mendorong si miskin mencari kompensasi dan kepuasan dengan segala cara. Biasanya hal ini dilakukan karena adanya hubungan keluarga dan kekerabatan yang sulit untuk diungkap (Ferwerda et al, 2007); Nelen et al, 2007; Van de Bunt et al, 2007).

6.2 Analisis dan Implikasi Pengaruh Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam terhadap Pembangunan Berkelanjutan melalui Ketimpangan Pendapatan dan Kriminalitas

Berdasarkan hasil analisa studi ini mengenai adanya pengaruh langsung antara dana bagi hasil sumber daya alam terhadap pembangunan berkelanjutan yang memiliki hubungan positif dan signifikan pada sepuluh propinsi penghasil tambang di Indonesia. Hasil ini dipengaruhi oleh seiring tumbuhnya pendapatan Indonesia dan sepuluh penghasil tambang dalam sepuluh tahun ke depan, ekpektasi terhadap layanan sosial juga akan meningkat. Dengan digunakannya hitungan belanja sosial publik untuk perekonomian pada proyeksi demografi Indonesia secara tersirat menunjukkan terjadi peningkatan besar dalam program dan belanja sosial per PDB pada tahun 2030. Ekspektasi ini dianggarkan untuk pemerintah daerah melalui alokasi transfer dana ke daerah (OECD, 2018).

Pada tahun 2015 sebanyak 89 % dari seluruh penerimaan pemerintah dikumpulkan oleh pemerintah pusat yang hanya menangani 47 % dari pengeluaran. Sisanya dikelola oleh pemerintah daerah. Transfer dana dari pemerintah pusat dialokasikan langsung ketiga tingkat pemerintah daerah, yaitu provinsi, kabupaten/kota, dan desa. Artinya pemerintah daerah mempunyai jumlah dana simpanan. Jumlah dana simpanan ini digunakan untuk membiayai program prioritas daerah untuk mempercepat pembangunan (OECD, 2013).

Tahun 2015 agar mencapai pembangunan berkelanjutan, Indonesia mengalokasikan dana publik yang diambil dari transfer dana ke pemerintah daerah sebesar 5 % untuk pengeluaran kesehatan publik dan 20 % untuk pendidikan. Saat ini menjadi tantangan dalam hal tata kelola pemerintah daerah untuk menggunakan dana tersebut (OECD, 2018).

Dalam jangka panjang, pemerintah daerah telah diberi dana hibah yang jumlahnya dihitung menurut rumus pemerataan fiskal tertentu yang mencerminkan kebutuhan daerah dan prioritas nasional. Namun, karena kurangnya kapasitas yang mereka miliki, banyak pemerintah daerah di Indonesia kesulitan membelanjakan seluruh alokasi anggaran tahunannya. Jumlah dana simpanan pemerintah daerah meningkat dari Rp 90 triliun (US\$ 6.8 milyar) pada Desember 2015 menjadi Rp 220 triliun pada tahun 2016 (naik 140 %). Hal ini mengecewakan bagi konstituen, termasuk dunia usaha setempat, dan menghambat pemerintah pusat baik dalam upaya mengejar prioritas nasional seperti meningkatkan

infrastruktur dan juga memberikan stimulus fiskal pada masa perlambatan ekonomi (OECD, 2016).

Dalam jangka pendek, kinerja fiskal daerah dapat ditingkatkan dengan menghubungkan dana hibah secara lebih erat ke program tertentu, terutama di bidang prioritas nasional, seperti penanaman modal di bidang infrastruktur. Salah satu caranya adalah dengan banyak memanfaatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dananya memang dialokasikan untuk tujuan tertentu. Nilai DAK belakangan ini naik cukup besar guna mengakomodasi aspirasi daerah dalam mempercepat pembangunan dan penyediaan fasilitas infrastruktur. Selain itu, agar dapat mencapai sasaran dengan baik, pemerintah masih terus berupaya menyempurnakan mekanisme alokasi dan pencairan DAK (OECD, 2018).

Dengan demikaian besarnya transfer dana ke pemerintah daerah mendorong belanja publik dan mengakomodasi aspirasi daerah dalam mempercepat pembangunan. Seperti riset yang dilakukan oleh Wilhelm & Fiestas, 2005; Lisna, 2014).

Menurut hasil analisa studi ini bahwa secara tidak langsung antara dana bagi hasil sumber daya alam terhadap pembangunan berkelanjutan melalui ketimpangan pendapatan mempunyai pengaruh positif dan signifikan. Hal ini disebabkan bahwa dana bagi hasil sumber daya alam yang ada mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan.

Di Indonesia alokasi dana bagi hasil sumber daya alam minyak bumi sebesar 15.5 persen dan gas bumi sebesar 30.5 persen. Alokasi

dana ini diperuntukkan untuk mendanai program atau kegiatan bidang pendidikan dan kesehatan, dan diserahkan kepada daerah atas prioritas kebutuhan daerah nya (OECD, 2016).

Hal ini sesuai dengan riset Azizi (2018) dan Lisna (2014) bahwa penerapan desentralisasi melalui dana bagi hasil memiliki hubungan negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan regional. Karena secara langsung menurut hasil dari studi ini bahwa antara dana bagi hasil sumber daya alam memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan pada sepuluh propinsi penghasil tambang di Indonesia.

Pada hakikatnya studi yang dilakukan oleh Kajian Pengeluaran Publik Indonesia (2007) tentang desentralisasi fiskal dan kesenjangan daerah, dimana tantangan utama bagi keberlanjutan pembangunan Indonesia bukan lagi untuk memberikan dana kepada daerah-daerah yang lebih miskin tetapi bagaimana memastikan agar daerah-daerah tersebut menggunakan dana yang disalurkan dengan sebaik-baiknya. Sumber dana yang terpenting untuk daerah berupa Dana Alokasi Umum (Dana DAU) yang mengalami peningkatan nominal hingga 64 persen pada 2006. Sebagian besar daerah sudah memiliki sumber daya yang cukup untuk melakukan berbagai perbaikan taraf hidup warganya. Bahkan daerah-daerah yang dulunya dianggap miskin, kini memiliki DAU per kapita rata-rata sebesar US \$425 setiap tahun, jumlah alokasi DAU ini telah mengalami peningkatan sebesar 75 persen pada tahun 2006. Jika dana bagi hasil sumber daya alam dialokasikan berdasarkan formula

kesenjangan fiskal maka daerah yang miskin sumber daya alam akan menikmati juga hasil sumber daya alam. Agar tidak terjadi ketimpangan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan (OECD, 2018).

Terkait dengan sumber pendapatan daerah, ketika penerimaan daerah dari DBH meningkat maka pemerintah daerah dituntut juga memperbesar pengeluarannya. Hal ini karena DBH yang berasal dari pungutan pajak akan menurunkan pendapatan masyarakat. Turunnya pendapatan masyarakat berdampak pada turunnya permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa. Penurunan permintaan atas barang dan jasa tersebut dapat menurunkan kegiatan perekonomian (OECD, 2016).

Menurut hasil analisa studi bahwa dana bagi hasil sumber daya alam tidak mempunyai hubungan terhadap pembangunan berkelanjutan secara tidak langsung melalui kriminalitas selama kurun waktu tahun 2009-2018 pada sepuluh propinsi penghasil tambang di Indonesia. Seperti yang diungkapkan oleh Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu di Surabaya, 8 Oktober 2015, tentang dana bagi hasil sumber daya alam (DBH SDA) Indonesia. Dalam paparan ini disebutkan penerimaan negara dari bukan pajak yang berasal dari sektor migas dan nonmigas cenderung menurun dari 17,66 % pada tahun 2011 menjadi 6,75 % pada tahun 2015. Hal ini dipertanyakan apakah memang Indonesia masih kaya akan sumber daya alam. DBH SDA ini merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk memenuhi kebutuhan daerah dalam rangka

pelaksanaan desentralisasi di Indonesia. Adapun bagian daerah di Indonesia yang menerima DBH SDA adalah penerimaan sumber daya kehutanan, perikanan, pertambangan umum, minyak bumi, gas bumi dan panas bumi (OECD, 2015).

Selain itu sumber daya alam ini harus layak dibagihasilkan karena merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dan jikalau dapat di daur ulang memiliki masa pemulihan lama dan mengandung upaya dan biaya pemulihan eksploitasi/konsumsi. Di samping itu juga mengandung biaya eksternalitas dalam bentuk biaya sosial yang tinggi yang tidak dapat dipulihkan seperti kesenjangan sosial dan ketimpangan pendapatan; biaya infrastruktur seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan lain-lain; serta biaya rehabilitasi lahan/reklamasi yang tinggi (OECD, 2013).

Di Indonesia penerimaan sumber daya alam ini cenderung tidak stabil. Pada tahun 2011, Indonesia menerima sekitar Rp 54 trilyun, tahun 2012 naik sekitar Rp 62.6 trilyun, tahun 2013 malah menurun menjadi Rp 42.5 trilyun, tahun 2014 naik lagi sekitar Rp 65,4 trilyun dan tahun 2015 turun lagi hingga mencapai Rp 55.8 trilyun. Hal ini berpotensi menimbulkan adanya ketimpangan fiskal antar daerah di Indonesia. Bahkan bisa saja memicu ketimpangan sosial dan mendorong kriminalitas antar daerah di Indonesia. Di tambah lagi dana perimbangan berperan cukup besar dalam melakukan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang tercermin dari semakin kecilnya koefisien variasi dari 1.21 tahun 2013 menjadi 0.68 pada tahun 2015. Artinya semakin tinggi atau

tidak stabil penerimaan dana bagi hasil sumber daya alam antar daerah maka semakin mendorong ketimpangan dan kecemburuan antar daerah yang selanjutnya meningkatkan jumlah kriminalitas. Hal ini sesuai dengan riset yang dilakukan oleh Azizi (2018) dan Lisna (2014)

6.3 Analisis dan Implikasi Demokrasi terhadap Pembangunan Berkelanjutan melalui Ketimpangan Pendapatan dan Kriminalitas

Berdasarkan hasil estimasi studi ini bahwa adanya demokrasi tidak mempunyai pengaruh secara langsung terhadap pembangunan berkelanjutan pada sepuluh propinsi penghasil tambang di Indonesia selama kurun waktu 2009-2018. Hasil ini berbeda dengan yang diteliti oleh Packer, 1968; Lothering & Elkington, 2008; Rodrigues, 2006; Zakaria, 2003 bahwa pemerintahan yang demokratis yang diperlihatkan dengan semakin terbukanya transparansi dan partisipasi masyarakat membuka tantangan bagi pembangunan berkelanjutan.

Saat ini terjadi di Indonesia ketika demokrasi diwujudkan maka penyelewengan banyak terjadi. Seperti halnya kasus korupsi. Terjadinya tindakan korupsi karena adanya penyelewengan atas transparansi keuangan (Godson, 2003; Yukos Universal, 2009; Vogenauer & Kleinheisterkamp, 2009). Keberhasilan dalam memberantas korupsi salah satu perwujudan atas transparansi dalam demokrasi.

Meskipun Indonesia telah mencapai kemajuan dalam mengatasi korupsi dalam beberapa tahun terakhir. Indonesia berada di peringkat 88

dari 168 negara pada tahun 2015. Tetapi hal ini belum optimal (menurut survey persepsi korupsi dari transparansi internasional yang dilakukan OECD, 2015).

Korupsi menjadi masalah besar di daerah, karena buruknya pemahaman mengenai aturan yang ada. Persoalan ini semakin mendesak karena makin berkembangnya kewenangan daerah dan tanggung jawab administratif diserahkan ke pemerintah daerah sebagai salah satu wujud demokrasi. Mengingat kapasitas hukum dan administratif tingkat daerah yang biasanya lemah, pemantauan dari atas ke bawah sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam demokrasi yang lebih baik dipandang sebagai cara yang paling efektif untuk mengurangi korupsi di Indonesia (OECD, 2015).

Jika merujuk pada hasil rilis tranparansi internasional tahun 2011, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia masih berada pada urutan ke-100 dari 183 negara yang disurvei. Indonesia berada pada urutan ke-100 dari 183 negara yang disurvei. Pada tahun 2012-2013 IPK Indonesia mengalami stagnasi pada angka 32 dari skala 0-100. Walaupun mengalami perbaikan peringkat dari urutan 118 ke 114 dari 176 negara yang disurvei, namun perbaikan tersebut bukan karena membaiknya pemberantasan korupsi di Indonesia, tetapi IPK di empat negara lain yang disurvei mengalami penurunan. Di tingkat ASEAN IPK korupsi Indonesia masih di bawah negara anggota ASEAN yang lain yakni peringkat pertama adalah Singapura dengan skor 9,2. Laporan tersebut

menempatkan Indonesia sebagai salah satu dari 10 negara terkorup di dunia (Haryadi, 2014).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki peran penting dalam mengurangi kerugian negara akibat suap dan korupsi. Telah dilakukan perbaikan praktik-praktik korupsi di daerah. Reformasi di tingkat daerah seperti peningkatan penggunaan *e-procurement* (pengadaan secara elektronik) serta penguatan anggaran dan kendali internal. Pada tahun 2018 diluncurkan sebuah sistem elektroni untuk perizinan yaitu *sistem online single submission*. Kemudian dilanjutkan dengan aplikasi "Arsitektur Dan Informasi Kerja (ADIK) untuk kementrian dan lembaga demi meningkatkan kualitas alokasi anggaran (OECD, 2018).

Dalam riset Meadowcroft et al, (2012); Beckman, (2008); Bluhdorn, (2012); dan Lafferty, (2012) bahwa terjadinya perubahan radikal dan reformasi dalam demokrasi merupakan perwujudan atas implikasi dari pembangunan.

Kemudian dari hasil studi mengenai demokrasi bahwa secara tidak langsung memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan berkelanjutan melalui ketimpangan pendapatan pada sepuluh propinsi penghasil tambang di Indonesia.

Seperti yang diungkapkan oleh Alesina (1994) bahwa sifat diktator dalam pemerintahan demokrasi akan menaikkan koefisien gini. Artinya pemerintahan yang diktator mendorong peningkatan ketimpangan pendapatan. Karena seorang diktator tidak mampu sepenuhnya memenuhi tuntutan sosial, karena takut digulingkan sehingga

mempengaruhi jumlah suara dan keputusan kebijakan mempengaruhi distribusi pendapatan. Senada dengan yang diungkapkan dalam riset Perotti (1993); Saint-Paul & Verdier (1992); Fernandez & Rogerson (1992); Benhabib & Rustichini (1991); Pearson (1991).

Indonesia telah memberikan legitimasi dan transparansi dalam pengaturan keuangan. Seperti yang dikemukakan sebelumnya bahwa pemerintah telah membuat aplikasi dan program keterbukaan anggaran belanja kementerian dan pemerintah daerah. Tindakan korupsi merupakan faktor yang paling menjadi masalah dalam berusaha di Indonesia (OECD, 2016).

Disamping itu faktor-faktor yang mempengaruhi dalam berusaha di Indonesia selain korupsi antara lain, birokrasi pemerintah tak efisien, pasokan infrastruktur tak memadai, akses pada pembiayaan, inflasi, ketidakstabilan kebijakan, buruknya etika kerja pada angkatan kerja, tariff pajak, angkatan kerja kurang berpendidikan, kerumitan aturan perpajakan, aturan tentang mata uang asing, ketidakstabilan pemerintahan/kudeta, kejatan dan pencurian, buruknya kesehatan masyarakat, kapasitas inovasi tak memadai, dan aturan ketenagakerjaan yang membatasi. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi tolak ukur terjadinya reformasi dalam kebijakan berusaha di Indonesia (OECD, 2016).

Berdasarkan hasil studi ini bahwa antara demokrasi tidak mempunyai hubungan terhadap pembangunan berkelanjutan melalui kriminalitas pada sepuluh penghasil tambang di Indonesia. Karena saat ini demokrasi menuntut keterbukaan baik pemerintah pusat dan pemerintah

daerah. Desentralisasi diharapkan dapat meningkatkan kinerja dengan jalan transparansi dan partisipasi masyarakat. Hal ini memicu persaingan antar daerah untuk menyediakan layanan secara efisien untuk menarik dunia usaha. Akan tetapi perlu berhati-hati pula untuk menghindari keadaan ketika persaingan antar daerah yang dipicu desentralisasi menyebabkan daerah berlomba-lomba menurunkan biaya dan pungutan, serta memberikan subsidi untuk menarik investasi usaha (OECD, 2016).

Keterlibatan sektor swasta yang lebih besar dalam proyek infrastruktur akan mengurangi tekanan pada BUMN tetapi saat ini terdesak keluar. Karena pemerintah telah meningkatkan penggunaan Kerjasama Pemerintah-Badan Usaha (KPBU) atau *public-private partnership*. Pada tahun 2017 terdapat KPBU yang sedang berjalan dengan nilai keseluruhan mencapai USD 15.4 Milyar. Proyek-proyek KPBU yang dirancang belum dapat dikelola dengan tepat yang memanfaatkan efisiensi dan keahlian sektor swasta. Sehingga calon investor menghadapi ketidakpastian hukum dan peraturan serta minimnya informasi proyek yang layak akibat kelemahan dalam siklus proyek. BUMN terkadang bertindak sebagai penawar swasta "*private buyers*" yang mungkin membuat investor swasta mengurungkan niatnya (OECD, 2018).

Beberapa instrument telah dibuat untuk lebih menarik minat sektor swasta terhadap KPBU berupa dana dukungan pemerintah (*viability gap funding*) untuk mensubsidi biaya modal; jaminan pemerintah untuk mengatasi resiko kinerja yang berkaitan dengan pemerintah; fasilitas pengembangan proyek untuk membantu menyiapkan dokumentasi seperti

studi kelayakan; dan pembayaran ketersediaan layanan (*availability payments*) untuk meningkatkan kepastian arus kas dengan memberikan pembayaran berkala bagi layanan infrastruktur yang memenuhi kriteria yang sudah disepakati sebelumnya. Namun masalah mendasar seperti hak atas tanah dan bangunan yang belum teratasi (OECD, 2018).

Walaupun pemerintah telah memberikan payung hukum yang kuat tetapi adanya sengketa atas penguasaan tanah dan bangunan membuat riset ini menjadi tidak signifikan. Selain itu kecepatan hilangnya tutupan lahan telah melambat selama sepuluh terakhir. Pemerintah telah menerbitkan moratorium pemberian konsesi perkebunan serta penebangan hutan primer dan lahan gambut pada tahun 2011 tetapi belum sepenuhnya efektif. Kemudian pada bulan September 2018, Presiden Jokowi menandatangani peraturan yang mengatur moratorium pemberian izin usaha kelapa sawit selama 3 tahun. Tetapi hak atas tanah yang belum jelas dan penegakkan hukum belum lebih baik dalam membantu mengendalikan deforestasi. Memang telah digagas Prakasra Kebijakan Satu Peta pada tahun 2015 untuk membentuk suatu kadaster (pencatatan batas tanah) dan menyelesaikan konflik hak atas tanah dan bangunan tetapi akan difinalisasi pada tahun 2019 (OECD, 2018).

Hal ini didasarkan atas saat terjadi tindakan kriminal atau kejahatan seperti pembukaan hutan secara ilegal, pembalakan liar dan pertambangan ilegal, pemerintah belum sepenuhnya mendedikasikan sumber daya untuk penegakan hukum (OECD, 2016).

Memang sejak tahun 2013, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mengatasi dan mencegah kegiatan pembalakan liar dengan menerapkan sistem verifikasi legalitas kayu dalam manajemen hutan produksi di Indonesia. Sistem verifikasi legalitas kayu adalah sistem yang memastikan pengelolaan hutan secara lestari dan berkesinambungan, serta pelacakan kayu melalui sertifikasi pengelolaan hutan produksi lestasi dan sertifikat legalitas kayu dan deklarasi kesesuaian pemasok (OECD, 2016.)

Demi terselenggaranya keberlanjutan hutan produksi telah dilakukan negosiasi persetujuan verifikasi kayu dengan Uni Eropa yang telah memasuki tahap akhir tahun 2018. Sistem verifikasi legalitas juga telah diakui oleh Australia dan dapat memenuhi pemastian legalitas kayu dengan penegakan hukum terkait larangan pembalakan liar. Pelaksanaan sistem verifikasi legalitas kayu pada tahun 2013 telah berhasil menurunkan jumlah kasus pembalakan liar, tetapi masih diperlukan pemantauan lebih lanjut selama tahun-tahun mendatang.

6.4 Implikasi Teoritis dan Empiris Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam perkembangan ilmu ekonomi, maka penelitian ini sampai pada suatu temuan empiris sebagai berikut:

Pertama; Model struktural yang dibentuk pada sepuluh propinsi penghasil tambang di Indonesia yang terdiri atas investasi swasta, dana bagi hasil

sumber daya alam, dan demokrasi merupakan variabel eksogen (bebas); pembangunan berkelanjutan merupakan variabel endogen (terikat); variabel antara (mediasi) adalah ketimpangan pendapatan dan kriminalitas.

Berdasarkan hasil analisis (estimasi) didapatkan pengaruh langsung antara investasi swasta dan dana bagi hasil sumber daya alam yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan berkelanjutan. Sedangkan demokrasi tidak mempunyai pengaruh terhadap pembangunan berkelanjutan.

Dari keenam variabel yang diestimasi mewakili keberlanjutan dari dimensi ekonomi, sosial, politik dan lingkungan. Oleh karena itu selama periode pengamatan tahun 2009-2018 bahwa tujuan pembangunan berkelanjutan yang ketiga dan keempat yang telah dicapai oleh sepuluh propinsi penghasil tambang di Indonesia, yaitu tujuan kehidupan sehat dan sejahtera serta tujuan pendidikan berkualitas.

Kedua; Berdasarkan model yang terbentuk tersebut, maka untuk keberlanjutan pembangunan di sepuluh propinsi penghasil tambang di Indonesia secara keseluruhan propinsi yang ada di Indonesia dapat dilakukan dengan terus merangsang pertumbuhan investasi swasta dalam negeri agar dapat meningkatkan pembangunan keberlanjutan melalui penurunan ketimpangan pendapatan dan kriminalitas.

Ketiga, untuk mendorong keberlanjutan pembangunan di sepuluh propinsi penghasil tambang di Indonesia maupun di seluruh propinsi di Indonesia berdasarkan model yang terbentuk, maka perlu kestabilan penerimaan

dan transformasi sistem politik demokrasi. Perubahan radikal pada praktik ekonomi, sosial, dan lingkungan yang cenderung membutuhkan lebih banyak koordinasi dan keterlibatan antara pemerintah, masyarakat sipil, dan bisnis, yang menyiratkan bentuk politik demokrasi yang berbeda dan lebih luas.

Adanya kepastian dan payung hukum serta regulasi atas peraturan yang menjamin seluruh pelaku bisnis, investor, masyarakat juga pemerintah dalam mewujudkan tantangan pembangunan berkelanjutan.

Selain variabel investasi swasta, dana bagi hasil sumber daya alam dan demokrasi, terdapat variabel lain yang dapat mempengaruhi pembangunan berkelanjutan. Di antaranya adalah kebijakan desentralisasi fiskal, partisipasi gender dan penguatan masyarakat lokal, produktifitas sektoral, modal manusia, keuangan inklusif, perbankan dan lain-lain.

Hal ini sangat penting, oleh karena kondisi karakteristik tempat dan lokasi penelitian serta kelengkapan data yang membatasi sehingga variabel-variabel tersebut belum diakomodir dalam penelitian ini. Oleh sebab itu diharapkan bagi peneliti selanjutnya seyogyanya menggunakan variabel-variabel tersebut agar terdapat variasi lain dari model selanjutnya.

dana bagi hasil sumber daya alam antar daerah agar mendorong peningkatan pembangunan berkelanjutan melalui penurunan ketimpangan pendapatan dan kriminalitas.

Keempat; untuk mendorong keberlanjutan pembangunan di sepuluh propinsi penghasil tambang di Indonesia maupun seluruh propinsi di Indonesia berdasarkan model yang terbentuk, maka perlu diperluas konteks demokrasi yang transparan, akuntabel dan melibatkan partisipasi masyarakat agar mendorong reformasi dalam pembangunan melalui penurunan ketimpangan pendapatan dan kriminalitas.

6.5 Keterbatasan Penelitian

Selain model yang terbentuk, dalam rangka mendorong keberlanjutan pembangunan diperlukan peran serta seluruh masyarakat dan juga pemerintah. Campur tangan pemerintah berupa suatu kebijakan regulasi terhadap investasi dan alokasi penerimaan yang merata atas dana bagi hasil sumber daya alam. Regulasi dibutuhkan untuk memberi ruang bagi investasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga merangsang keterlibatan masyarakat untuk lebih diberdayakan. Dengan demikian ada ruang dan kesempatan bagi setiap individu untuk menawarkan jasa dalam perekonomian. Keseluruhan potensi yang dimiliki oleh setiap individu akan diserap pada produktifitas sektoral sehingga melahirkan sebuah keberlanjutan pembangunan nasional.

Sinergitas antara demokrasi dan pembangunan berkelanjutan tidak akan menerima perhatian dan implikasi yang cukup, jikalau tanpa adaptasi

BAB VII

PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah, hipotesa, model yang terbentuk, dan hasil estimasi maka dapat disimpulkan hal sebagai berikut:

1. Pada sepuluh propinsi penghasil tambang di Indonesia selama kurun waktu 2009-2018, secara langsung investasi swasta berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan berkelanjutan yang sesuai dengan hipotesis (H_1). Investasi swasta berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan berkelanjutan secara tidak langsung melalui ketimpangan pendapatan yang berbeda dengan hipotesis (H_{1a}). Investasi swasta tidak mempunyai pengaruh terhadap pembangunan berkelanjutan secara tidak langsung melalui kriminalitas yang berbeda dengan hipotesis (H_2a).
2. Pada sepuluh propinsi penghasil tambang di Indonesia selama kurun waktu 2009-2018, secara langsung dana bagi hasil sumber daya alam berpengaruh positif terhadap pembangunan berkelanjutan yang sesuai dengan hipotesis (H_2). Dana bagi hasil sumber daya alam terhadap pembangunan berkelanjutan secara tidak langsung melalui ketimpangan pendapatan berpengaruh positif dan signifikan yang berbeda dengan hipotesis (H_2a). Dana bagi hasil sumber daya alam terhadap pembangunan berkelanjutan secara tidak langsung melalui

- kriminalitas tidak mempunyai pengaruh yang berbeda dengan hipotesis (H_{2b}).
3. Pada sepuluh propinsi penghasil tambang di Indonesia selama kurun waktu 2009-2018, secara langsung demokrasi tidak berpengaruh terhadap pembangunan berkelanjutan yang berbeda dengan hipotesis (H₃). Demokrasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan berkelanjutan secara tidak langsung melalui ketimpangan pendapatan yang berbeda dengan hipotesis (H_{3a}). Demokrasi tidak mempunyai pengaruh terhadap pembangunan berkelanjutan secara tidak langsung melalui kriminalitas yang berbeda dengan hipotesis (H_{3b}).

7.2 Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan penelitian di atas, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Dalam implementasi investasi swasta terhadap pembangunan berkelanjutan melalui kriminalitas sebaiknya penyelewengan atas tindakan kriminalitas yang mempengaruhi pembangunan berkelanjutan dapat dikurangi agar calon investor swasta memiliki kepercayaan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi baik pada seluruh propinsi di Indonesia melalui keterlibatan pemerintah dalam mengambil kebijakan, aturan dan sanksi yang tegas.
2. Dalam implementasi dana bagi hasil sumber daya alam terhadap pembangunan berkelanjutan melalui kriminalitas sebaiknya praktek-

praktek atas dana transfer ke daerah lebih transparan, akuntabel serta tepat sasaran sehingga tidak mengundang tindakan kekerasan, perselisihan, persaingan dan kriminalitas antar daerah agar terjadi pemerataan pembangunan berkelanjutan.

3. Dalam implementasi demokrasi terhadap pembangunan berkelanjutan sebaiknya diterapkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam demokrasi seperti adanya transparansi, kebebasan yang terkendali, akuntabilitas dan melibatkan partisipasi masyarakat agar terwujud keberlanjutan pembangunan. Dan dalam implementasi demokrasi terhadap pembangunan berkelanjutan melalui kriminalitas sebaiknya pemerintah lebih peka dan cepat bertindak mengambil kebijakan apabila dikhawatirkan terjadinya tindak kejahatan dengan mengeluarkan peraturan dan payung hukum yang mengejawantahkan seluruh lapisan masyarakat agar terwujudnya pembangunan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abraham, M.F. 1991. *Modernisasi di Dunia Ketiga: Suatu Teori Umum Pembangunan*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- Abel, Jaison R. & Richard Deitzs, 2011, The Role of Colleges and Universities in Building Local Human Capital, *Current Issues in Economics & Finance Vol. 17 No. 6*.
- Ahmad, Ehtisham., 2017. *Public Investment for Sustainable Development*. Working Paper Commised by The G-24 as part of its Work Program on Financing for Development.
- Alesina, Alberto., & Dani Rodrik, 1994. Distributive Politics and Economic Growth. *The Quarterly Journal of Economics*, May 1994.
- Alqadrie, I.S., Budiarti T. Ngusmanto dan Erdi. 2002. *Decentralization policy of forestry sector and their impacts on sustainable forests and local livelihoods in District Kapuas Hulu, West Kalimantan*. CIFOR, Bogor dan Universitas Tanjung Pura, Pontianak, Kalimantan Barat.
- Ama, K.K. dan I. Santosa. 2005. Hukum Mandul, Hutan Pun Gundul. *Kompas, Fokus*, 5 Maret.
- Amekudzi, A., M. Khayesi and C. J. Khisty. 2015. Sustainable Development Footprint: A Framework for Assessing Sustainable Development Risk and Opportunities in Time and Space. *International Journal of Sustainable Development*, 18(1/2), 9-40.
- Angelsen, A., & T. K. Rudel. 2013. *Designing and Implementing Effective REDD+Policies: A Forest Transition Approach*. <http://reep.oxfordjournals.org>. Diakses 10 Januari 2018.
- Ardiwisastra, Yudha Bhakti. 2010. *Politik Hukum Lanjut: Course Material IV dalam Mata Kuliah Politik Hukum Lanjut pada Program Doktor Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung*.
- Aspinal, Edward & Marcus Mietzner, 2014. Indonesian Politic in 2014: Democracy's Close Call, *Bulletin of Indonesian Economic studies*, Vol. 50, No. 3: 347-69

- Azizi, Muhammad., 2018. Dampak Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Ketimpangan Produk Domestik Regional Bruto Di Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2006-2014. *Journal Economic and Business of Islam*, Vol. 2, No.1, Juni 2018
- Arrianie, Lely. 2015. Stigma Partal dan Presentasi Diri Para Politisi Pelaku Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Communicate*, Vol. 1, No.1, Juli-Desember.
- Barlow, R. 1978. *Land Resources Economic*. Edition 3 Prentice Hall, Inc., New Jersey: Engelwood Cliffs.
- Bartz, S. & D. L. Kelly. 2004. *Economic Growth and the Environment: Theory and Facts*. <http://www.hec.ca/cref/sem/documents/040325.pdf>. Diakses 16 Juli 2018
- Baum, E. 2001. *Unfinished Business: Why The Acid Rain Problem is not solved. a Clear the Air Report*. Boston. <http://www.cleartheair.org/pdf>. Diakses 16 Juli 2018
- Barbier, E. B., & J. S. Bugas. 2003. Explaining Agricultural Expansion, Resource Booms and Growth in Latin America. *Environment, Development and Sustainability* 5: 437-458.
- Bayley, David H. 1975. *The Police and Political Development in Europe*. In *The Formation of National States in Western Europe*, ed. C. Tilly, 328-379. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Beckman, L., 2008. Do Global Climate Change and The Interest of Future Generations Have Implications for Democracy? *Environmental Politics*, 17:4, 610-624.
- Becker, G. S. 1968. Crime and Punishment: An Economic Approach. *Journal of Political Economy*, 76 (2), 169-217.
- Becker, G. S. 1999. Economics and Crime in the States. *Economic Review - Federal Reserve Bank of Atlanta*, 84 (1), 38-56.
- Bandari, B., 2006. Essays on foreign direct investment and income inequality, and cross-price effects in the U.S. trade balance.

- Blaustin, Jarret., Nathan W Pino, Kate Fitz-Gibbon, and Rob White, 2017, Criminology and The UN Sustainable Development Goal: The Need for Support and Critique, *British Journal Criminology* diakses pada doi: 10.1093/bjc/azx061
- Blau JR, Blau PM. 1982. The Cost of Inequality: Metropolitan Structure and Violent Crime. *America Sociology Review* 47: 114-129.
- Bluhdom, I., 2012. Democracy and Sustainability: Opening The Discursive Arena Struggling for an Innovative Debate, Friedrich Ebert Stiftung.
- Bonger, W. A. 1977. *Pengantar tentang Kriminologi*, Diperbaharui oleh G. Th.Kempe, diterjemahkan oleh R. A. Koesnoen, Cet. IV, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Bosworth, R., Davies and G Saltmarsh, 1995. 'Definition and Classification of Economic Crime' in J Reuvid (ed), *The Regulation and Prevention of Economic Crime Internationally* (Kogan Page 1995), 5-50.
- Bourguignon, Farncois., 2000. Crime, Violence, and Inequitable Development, in *Annual World Bank Conference on Development 1999* (Borid Pleskovic & Joseph E. Stiglits eds
- Bottcher, H., K. Eisbrenner, S. Fritz, G. Kindermann, F. Kraxner, I. Mccallum & M. Obersteiner. 2009. An Assessment of Monitoring Requirements and Costs of Reduced Emissions from Deforestation and Degradation. *Carbon Balance and Management*, 4.
- BPS,. 2014. Statistik Kriminal 2014. Katalog BPS:4401002.
- Braithwaite, John., 1979. Inequality, Crime, and Public Policy
- Bratakusumah, D. S. 2002. Kompetensi Aparatur dalam Pelaksanaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 1, No. 1, 91-101.
- British Institute of International and Comparative Law (BIICL) and Hogan Lovells, 'Risk and Return: Foreign Direct Investment and the Rule of Law' (3 June 2015).

- Brown, D. K., Deardorff, A. V., Stern, R. M. 1993. Protection and Real Wages: Old and New Trade Theories and Their Empirical Counterparts. *Working Papers 331., Research Seminar in International Economics, University of Michigan.*
- Bruce, London., & Thomas D. Robinson. 1989. The Effect of International Dependence on Income Inequality and Political Violence. *American Sociological Review, Vol. 54, No. 2, 1989, pp. 305-308*
- Brueckner, J. K. 2011. *Lectures on Urban Economics.* Cambridge: The MIT Press.
- Brush, J., 2007. Does Income Inequality Lead to More Crime? A Comparison of Cross-Sectional and Time-Series Analyses of United States Countries. *Economics Letters 96: 264-268.*
- Budiardjo, Miriam. 1998. *Dasar-Dasar Ilmu Politik.* Jakarta: Gramedia.
- Budiarto, T. 2003. *Case Study on Illegal Logging, Livelihood Security and Conflict: The Case Study of West Kalimantan.* Adelphi Research.
- Burtraw, D., A. Krupnick, E. Mansur, D. Austin, & Farrell, D. 1997. *The Cost and Benefits of Reducing Acid Rain.* Washington: Resources for the Future.
- Cahyandito, Fani M. 2002. Sustainability Communication & Sustainability Reporting. *Jurnal Pembangunan Berkelanjutan, Ekonomi dan Ekologi.*
- Cantor, David and C. Land Kenneth. 1985. Unemployment and Crime Rates in the Post-World War II United States: A Theoretical and Empirical Analysis, *American Sociological Review, June 1985, p. 317-332.*
- Cater, J. & Jones, T. 1989, *Social Geography: An Introduction to Contemporary Issues,* Colset Private Ltd, Great Britain.
- Cartier, L. E., & M. Bürge. 2011. Agriculture and Artisanal Gold Mining in Sierra Leone: Alternatives or Complements? *Journal of International Development, 23(8), 1080–1099.*

- Cato, Molly Scott. 2009. *Green Economics: An Introduction to Theory, Policy and Practice*. Earthscan: UK and USA.
- Chaily, N. 2014. *Analisis deforestasi dan perekonomian Sumatera Barat*. Master Thesis. Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Tidak dipublikasikan.
- Chen, Yungkun, Chia-Yon Chen, dan Tsuifang Hsieh. 2011. *Exploration of Sustainable Development by Applying Green Economy Indicators*. *Environmental Monitoring Assessment*, 182:279-289.
- Cheong, Tsun Se & Yunrui Wu., 2013. Inequality and Crime Rates in China. *Discussion Paper The University of Western Australia* 13.11.
- Churchill Mining PLC and Planet Mining Pty Ltd v Republic of Indonesia, ICSID Case No ARB/12/14 and 12/40, Award (6 December 2016).
- Cinelli M, SR Coles, K. Kirwan. 2014. Analysis of The Potentials of Multicriteria Decision Analysis Methods to Conduct Sustainability Assessment. *Ecological Indicators*, Vol. 46, 138-148.
- Ciociu, C. N. 2011. Integrating Digital Economy and Green Economy: Opportunities for Sustainable Development. *Urban Management*, 6(1), 33.
- Clancy, J.S., O. Maduka & F. Lumampao. 2008. Sustainable Energy Systems and Urban Poor Livelihoods, in P. Droege (ed.), *Urban Energy Transition: from Fossil Fuels to Renewable Power*, pp. 533-562.
- Cozens, P. 2002, "Sustainable urban development and crime prevention through Environmental Design for the British City. Towards an effective environmentalism for the 21st century", *Cities*, Vol. 19, no2, Elsevier Science, Great Britain, pp.129-137
- Dahlstrom, Carl. et.al. 2012. The Merit of Meritocratization: Politics, Bureaucracy, and the Institutional Deterrents of Corruption. *Political Research Quarterly*. Vol. 65, No. 3, pp. 656-668.
- Danil, Elwi. 2011. *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*. Jakarta: Rajawali Pers

- Dariah, A.R. 2007. *Dampak pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan terhadap degradasi lingkungan di Jawa Barat*. Disertasi. Institut Pertanian Bogor. Tidak dipublikasikan.
- Deininger, K., & Squire L. 1996. A New Data Set Measuring Income Inequality. *World Bank Econ Rev* 10: 565-591.
- Dervis, Kemal. 2012. Convergence, Interdependence, and Divergence. *Finance and Development*, vol. 49, No. 3.
- Dijk, J.J.M van & T. Chanturia. 2012. The Remarkable Case of Georgia: Secondary Analysis of The 2010/2011. *Crime and Security Surveys in Georgia, Ministry of Justice Georgia*.
- Dijk., J.J.M. Van. 2014. Crime. In D. Rowe (ed). *Achieving Sustainability: Vision, Principles, and Practices*. Detroit: Macmillan References USA.
- Dimiyanti dan Mudjiono. 2009. *Belajar dan Pembelajaran*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Duchesne, L., R. Ouimet, & D. Houle. 2002. Basal Area Growth of Sugar Maple in Relation to Acid Deposition, Stand Health, and Soil Nutrient. *Journal Environment Quality*. 31, 1676-1683.
- Dwiprabowo, H., dan S. Ekawati. 2010. REDD+ dan Forest Governance. Bogor: Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan.
- Effendi, H. 2003. *Telaah Kualitas air: Bagi Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan Perairan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Ellison, G., 2007. Fostering a Dependency Culture: The Commidication of Community Policing in a Global Market Place in A. Goldsmith and J. Sheptycki, eds., *Crafting Transnational Policing*, 203-42.
- Entorf, H., & H. Spengler. 2000. Socioeconomic and Demographic Factors of Crime in Germany: Evidence from Panel Data of the German States. *International Review of Law and Economics*, 20(1), 75- 106.
- Ehrlich, Isaac. 1973. Participation in Illegitimate Activities: A Theoretical

and Empirical Investigation. *Journal of Political Economy*, Vol. 81, 521-565.

Erlinda, Novita. 2016. Kebijakan Pembangunan Wilayah Berkelanjutan di Provinsi Jambi melalui Pendekatan Model Flag. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, Vo. 7, No. 1 Jun.

Europe Cement Investment & Trade S.A. v Republic of Turkey, ICSID Case No ARB (AF)/07/ 2, Award (13 August 2009)

Faguet., J. 2014. Decentralization and Governance. *World Development*. Vol. 53(C).

FAO/WHO. 2002. *Guidelines for the Evaluation of Probiotics in Food*. Report of a Joint FAO/WHO Working Group on Drafting Guidelines for the Evaluation of Probiotics in Food Ontario, Canada.

Fajnzylber, Pablo., Daniel Lederman, and Norman Laoyza, 2002. Inequality and Violent Crime. *Journal of Law and Economics*, Vo. XLV (April 2002).

Fardiaz, S. 1992. *Polusi Air & Udara*. Yogyakarta: Kanisius.

Fauzi, A. 2004, *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Fauzi, A. 2007. *Economic of Natures Non-Convexity: Reorientasi Pembangunan Ekonomi Sumber Daya Alam dan Implikasinya bagi Indonesia*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.

Fauzi, A. dan A. Oxtavianus. 2014. The Measurement of Sustainable Development in Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 15(1), 68-83.

Fauzi, A. 2014. *Valuasi Ekonomi dan Penilaian Kerusakan Sumber daya Alam dan lingkungan*. Bogor: IPB press.

Feenstra, R. and Hanson, G., 1997. Foreign Direct Investment and Relative Wages: Evidence from Mexico's Maquiladoras. *Journal of International Economics*. 42(3). pp. 371-393.

Fernandez, Raquel., and Richard Rogerson, 1992. Human Capital

Ferwerda, H., Staring, R., de Vries Robbé, E., & van de Bunt, J. 2007. *Malicious Activities in The Real Estate Sector*. Amsterdam: B.V. Uitgeverij SWP.

Freedom House. 2005. *Freedom in the world 2005: Civic power and electoral politics*. New York: Freedom House.

Ganda, Fortune., Collins C. Ngwakwe and Cosmas Ambe. 2015. The Role of Corporate Green Investment Practices on Sustainable Development. *Environmental Economics*, 6(1), 33-44

Geason, S. & Wilson, P. 1989. *Designing Out Crime: Crime Prevention Trough Environmental Design*. Australian Institute of Criminology. Renwick pride Pty Ida, Albury, Australia.

Geist, H.J., & E. F. Lambin. 2002. Proximate Causes and Underlying Driving Forces of Tropical Deforestation. *Bio Science*. Vol.52, No.2.

Gestel, B. van, Kouwenberg, R. F., Verhoeven, M. A., & Verkuylen, M. W. 2008. *Real Estate & Error. An Analysis of Twelve Criminal Investigations into Illegal and Criminal Practices in The Housing Sector*. Meppel: Boom Juridische Uitgevers.

Ghozali, Imam. 2011. *Model Persamaan Struktural dan Aplikasi dengan Program Amos 21*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Godson., R. 2003. *Menace to Society: Political-Criminal Collaboration Around The World*. Transaction Publishers.

z, Fidel. 2012. Distributional Effects of Carbon Taxes: The Case of Mexico. *Energy Economics*, vol. 34, No. 6, pp. 2102-2115

n, E. 2014. 'Security Sector Reform, Local Ownership and Community Engagement'. *Stability*, 3: 1-18.

don, H. Hanson, 2005. Globalization, Labor Income, and Poverty in Mexico. *NBER Working Papers 11027*.

- Goldsmith, V. & Mcguire, P. 2000. *Analysing Crime Patterns: Frontiers of Practice*, Sage Publications, USA
- Green, D. D., & J. McCann. 2011. Benchmarking a Leadership Model for The Green Economy. *Benchmarking: An International Journal*, 18(3), 445-465.
- Grossman, G.M. & A.B. Krueger. 1993. "Environmental Impacts of a North American Free Trade Agreement" in P. Garber, ed., *The U.S.-Mexico Free Trade Agreement*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Gujarati, Damodar. 1999. *Ekonometrika Dasar*. Terjemahan Sumarno Zain. Erlangga. Jakarta.
- Harries, K. 2000. *Filters, Fears, and Photos: Speculations and Explorations in the geography of crime*, *Analyzing Crime Patterns: Frontiers of Practice*, Sage Publications, USA.
- Haryadi, Dedi. 2014. Mendongkrak Persepsi Korupsi. *Opini, Kompas*, Edisi 3 Januari.
- Hege, Elisabeth., and Laura Brimont. 2018. Integrating SDGs into National Budgetary Process. *Studies IDDRI 05.18*.
- Holzmann, R., Y. Pouget, M. Vodopivec, & M. Weber. 2011. Severance Pay Programs around The World: History, Rationale, Status, and Reforms. *IZA Discussion Paper, No. 5731, May*.
- Hornberger., K. J. Battat, & P. Kusek. 2011. Attractive FDI: How Much Does Investment Climate Matter? *Viewpoint: Public Policy for Private Sector*, Bank Dunia, Agustus.
- Howells, G. 1995. *Acid Rain and Acid Waters*. second edition. New York: Ellis Horwood Limited.
- Hindelang, S and Y Kryvoi, 2017, Consolidating the IIA network, UNCTAD Annual High-Level IIA Conference: Phase II of IIA Reform (10 October 2017).
- Rayati, Rahmi D. dkk. 2006. *Pemberantasan Illegal Logging dan Penyeludupan Kayu*. Banten: Wana Aksara.

- Hsieh, CC., and Pugh MD. 1993. Poverty, Income Inequality, and Violent Crime: A Meta-Analysis of Recent Aggregate Data Studies. *Crim Justice Rev* 18: 182-202.
- Hung, M.F. & D. Shaw. 2005. *Economic Growth and The Environmental Kuznets Curve in Taiwan: A Simultaneity Model Analysis*. <http://www.sinica.edu.tw/pdf>. Diakses 16 Juli 2018.
- Im, Hyejoo., & John McLaren., 2015, *Does Foreign Direct Investment Raise Income Inequality in Developing Countries? A New Instrumental Variables Approach*
- IMF, 2016. Indonesia: 2015 Article IV. *Country Report, No. 16/81*. Washington DC.
- Ishartono & Santoso T. R. 2016. Sustainable Deirvelopment Goals (SDG's) dan Pengentasan Kemiskinan. *Social Work Journal*. 6(2). Hal. 154- 272.
- Islam, Muhammad Muinul, Toward a Green Earth: An Islamic Perspective. *Asian Affairs*. Vol. 26 No. 4, October-December, 51
- Iskandar, U., & S. A. Siran. 2000. *Pola Pengelolaan Hutan Tropika, Alternatif Pengelolaan Hutan yang Selaras dengan Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Yogyakarta: PT. Bayu Indra Grafika.
- Jacobs., J.B.1999. *Gotham Unbound: How New York City was Liberated from The Grib of Organised Crime*. New York University Press.
- Jai, S. Mah., 2002. The Impact of Globalization on Income Distribution: The Korean Experience. *Applied Economics Letters*, 1466-4291, Volume 9, Issue 15, 1007-1009
- Jaya, Wihana Kirana. 2012. *Business Perceptions at the Regional Level in Indonesia Since 1999 to Present*. Materi presentasi Konggres ISEI (Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia). Yogyakarta.
- Jasperson, S. 2015. 'Development Engagement with Organized Crime: A Necessary Shift or Further Securitization', *Conflict, Security & Development*, 15: 23–50.
- Jones, D.W. 1989. Urbanization and Energy Use in Economic

- Development. *The Energy Journal*, Vol. 10, No. 4, 29-44.
- Jones, D.W. 2004. Urbanization and Energy. *Encyclopedia of Energy*, Vol.6, No. 1-6,329-335.
- Jorgenson, A. K., & T. J. Burns. 2007. Effects of Rural and Urban Population Dynamics and National Development on Deforestation in Less-Developed Countries 1990–2000. *Sociological Inquiry*, Vol. 77, No.3, August,460-482.
- Kahn, Matthew E. 2009. The Green Economy. *Foreign Policy* 172: 34-116.
- Kajian Pengeluaran Publik Indonesia. 2007. *Bab 7 Desentralisasi Fiskal dan Kesenjangan Daerah*
- Kansil, C. S. T. 1994. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kartono, K. 2009. *Patologi Sosial*. Jilid 1. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kasto, 2002. *Mobilitas Penduduk dan Dampaknya terhadap Pembangunan Daerah dalam Mobilitas Penduduk Indonesia: Tinjauan Lintas Disiplin*. Yogyakarta: PSKK UGM.
- Kates, R. W., T. M. Parris, A. A. Leiserowitz. 2005. What is Sustainable Development? Goals, Indicators, Values, and Practice. *Issue Environment Science and Policy for Sustainable Development*, 47 (3), 8-21.
- Kelly, Morgan, 2000. Inequality and Crime. *Rev Econ Stat* 82: 530-539.
- Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). 2014. *Status Lingkungan Hidup Indonesia*
- Kennedy, B.P., Kawachi I, Prothrow-Stith D, Lochner K, Gupta V. 1998. Social Capital, Income Inequality, and Rearm Violent Crime. *Soc Sci Med* 47: 7-17.
- Kennedy, I.R. 1992. *Acid Soil and Acid Rain (second edition)*. Somerset: Research Studies Press Limited.

- Kim, J. & Kaplan, R. 2004. "Physical and Psychological Factors in Sense of Community: New Urbanist Kentlands and Nearby Orchard Village", *Environment and Behavior*, Vol. 36, Issue 3, pp. 313-340.
- Kohl, M., Baldauf, T. D. Plugge & J. Krug. 2009. Reduced Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD): A Climate Change Mitigation Strategy on a Critical Track. *Carbon Balance and Management*, 4:10.
- Kuo, F. & Sullivan, W. 2001. Aggression and Violence In The Inner City. *Environment And Behavior*, SAGE, Vol. 33, No. 4, July, pp.543-571
- Krohn, MD., 1976. Inequality, Unemployment and Crime: A Cross-National Analysis. *The Sociological Quarterly* 17: 303-313.
- Kryvoi, Yarik. 2005. Economic Crimes in International Investment Law. *International and Comparative Law Quarterly* (<https://www.cambridge.org/core/terms>).
- LaFree, G. & A. Tseloni. 2006. Democracy and Crime: A Multilevel Analysis of Homicide Trends in Forty-Four Countries 1950-2000. *Annals of The American Academy of Political and Social Science.*, Vol. 605, May.
- Lafferty, W., 2012. The Impasse of Dysfunctional Democracy' in Meadowcroft J, Langhelle O and Ruud A (eds) (2012) *Governance, Democracy and Sustainable Development: Moving beyond the impasse*, Edward Elgar.
- Lalountas, Dionisios A. et.al. 2011. Corruption, Globalization and Development: How are these Three Phenomena Related? *Journal of Policy Modeling*, Vol. 33, 636-648.
- Leary, Mark R. & Ashley Batts Allen. 2011. Personality and Persona: Personality Processes in Self-Presentation. *Journal of Personality*. 79 No. 6, 889-916.
- Levinson, J. 2004. Understanding Why Crime Fell in The 1990s: Four Explanations that Do and Six that Do Not. *The Journal of Criminology and Criminal Justice*, 18 (1), 163-190.
- Levinson, J. 2006. The social impact of globalization in the

developing countries. Institute for the Study of Labor (IZA). *Discussion Paper. No.1925.*

- Lisna, Vera, Bonar M. Sinaga, Muhammad Firdaus, dan Slamet Sutomo., 2014. Dampak Peningkatan Bagi Hasil Pajak dan Belanja Sektor Riil terhadap Penurunan Kemiskinan Pertanian di Indonesia. *Jurnal Agro Ekonomi, Vol. 32, No. 1, Mei 2014, Hal.13-34*
- Liu, J. 2006. Modernization and Crime Patterns in China. *Journal of Criminal Justice, 34.*
- Lochner, L. 2004. Education, Work, and Crime: A Human Capital Approach. *International Economic Review 45, 811-43.*
- Lynch, M., Long, M., Barrett, K. and Stretesky, P. 2013. Is It a Crime to Produce Ecological Disorganization? Why Green Criminology and Political Economy Matter in the Analysis of Global Ecological Harms. *British Journal of Criminology, 53: 997-1016.*
- Lochner, L., and E. Moretti. 2004. The Effect of Education on Crime: Evidence from Prison Inmates, Arrests, and Self-Reports. *American Economic Review 94, 155-89.*
- Machin, S., & Meghir C. 2004. Crime and Economic Incentives. *Journal Human Resources 39: 958-979.*
- Marlier, M., R. DeFries, A. Voulgarakis, P. Kinney, J. Randerson, D. Shindell, Y. Chen, & G. Falugevi. 2013. El Nino and Health Risk from Landscape Fire Emissions in Southeast Asia. *Nature Climate Change, No. 3.*
- Martin, Mathew & Walker., 2016. Tracking Government Spending on The MDGs: Lesson for The SDGs. *Development Finance International Report 18 July 2016.*
- Martono, Nanang. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif : Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Madlener, R., & Y. Sunak. 2011. Impacts of Urbanization on Urban Structures and Energy Demand: What Can We Learn for Urban Energy Planning and Urbanization Management? *Sustainable Cities and Society, Vol. 1, No. 1, 45-53.*

- Mangkoesoebroto, Ginanjar, 2011. *Ekonomi Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Malthus, T. R. 1798. *An Essay on The Principle of Population*. London, UK. (reprinted in 1998 by Electronic Scholarly Publishing Project).
- Mather, A. S. 1992. The Forest Transition. *Area*, 24, 367-379.
- Mathur, VK., 1978. Economics of Crime: An Investigation of the Deterrent Hypothesis for Urban Areas. *Rev Econ Stat* 60: 469-466.
- McElligott, Anthony., 1994. Authority, Control, and Class Justice: The Role of the Sondergerichte In The Transition from Weimar Germany to the Third Reich. *Criminal Justice History: An International Annual* 15:209-33.
- Meadows, D. H., Meadows, D. L., Randers, J., and Behrens III, W. W. 1972. *The Limit to Growth*. New York: Universe Book.
- Meadowcroft J, Langhelle O and Ruud A (eds). 2012. *Governance, Democracy and Sustainable Development: Moving beyond the impasse*. Edward Elgar.
- Melamud, Claire. 2012. *After 2015: Contexts, Politics and Processes for a Post-2015 Global Agreement on Development*. London: Overseas Development Institute. 4 January.
- Melick, Matthew D. 2003. The Relationship between Crime and Unemployment. *The Park Place Economist: Vol.11*.
- Messner, SF., Raffalovich LE & Shrock P. 2002. Reassessing the Cross-National Relationship between Income Inequality and Homicide Rates: Implications of Data Quality Control in the Measurement of Income Distribution. *Journal Quantitative Criminology* 18: 377-395.
- Marcus. 2012. Ideology, Money and Dynastic Leadership: The Indonesian Democratic Party of Struggle, 1998–2012. *South East Asia Research* 20 (4): 511–31.
- Novak, Svilena. 2015. Foreign Direct Investment and Income Inequality in Central and Eastern Europe. *Theoretical and Applied Economics*. Vol. XXII, No. 2 (603), p. 23-42

Milanovic, B., 2002, Can We Discern the Effect of Globalization on Income Distribution? Evidence from Household Budget Surveys, World Bank Policy Research, Working Paper, No. 2876.

Milanovic, B., 2003, The Two Faces of Globalization; Against Globalization as We Know It. *World Development*, 31(4), p. 667-683.

Moeljatno, 1992. *Kriminologi*. PT. Bina Aksara; Jakarta

Morris, dan Leiser. 1979. *The PQLI: Measuring Progress in Meeting Basics Needs*. New York: Communique, No. 32. USA.

Munasinghe, Mohan. 2000. *Towards Sustainomics: A Trans-Disciplinary Metaframework for Making Development More Sustainable*.

Munslow, Barry & François Ekanga Ekoko., 1995. Is Democracy Necessary for Sustainable Development? *Democratization*, 2:2, pp.158-178.

Muthohar, Sofa. 2013. Antisipasi Degradasi Moral di Era Global. *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 7, No. 2, Oktober.

Murwanto, B. 2014. Perilaku Pencegahan HIV/AIDS Pada Kelompok Wanita Pekerja Seks dan Waria. *Jurnal Kesehatan*. 5(1). Hal. 23-33.

Naiman, R.J., (Ed). 1992. *Watershed Management Balancing Sustainability and Environmental Change*. USA: Springer.

Nelen, H., ter Luun, B., & de Bruin, A. 2007. *The Environment of the Government Buildings Agency; Integrity Risks When Buying and Renting Real Estate*. Maastricht University & Vrije Universiteit Amsterdam.

... 1999. *Environmental Security and Sustainability in Natural Resource Management*, in S Lonergan (ed.), *Environmental Management: Adaptation and Security*.

... k Ayu., dan Surya Dewi Rustariyuni. 2018. Pengaruh Gini Rasio, Pengeluaran Non Makanan dan Belanja Modal terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Bali. *JIEP*, Vol. 18, No.2,

November 2018.

- Nugroho, Florentinus. 2009. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kriminalitas di Indonesia Dari Pendekatan Ekonomi. *Jurnal Universitas Katolik Parahyangan*, Vol. 3, No. 2.
- Nurmardiansyah, Eko. 2007. *Penerapan Green Constitution dan Green Legistation dalam rangka Ecodemocracy*.
journal.unpar.ac.id/index.php/ Diakses 16 Juli 2018.
- Nasution, Adnan Buyung. Dkk. 1999., *Menyingkap Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Indonesia*. Yogyakarta: Badan Pengkajian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- OECD, 2013. *Fiscal Federalism 2014 Making Decentralization Work*, OECD Publishig
- OECD, 2016. *Survei Ekonomi OECD Indonesia*.
- OECD, 2018. *Survei Ekonomi OECD Indonesia*.
- Orellana, Marcos., 2011. Investment Agreement & Sustainable Development: The Non-Discrimination Standars. *Sustainable Development Law & Policy* 11, No. 3
- Orlando., L. 2001. *Fighting The Mafia and Renewing Sicilian Culture*. San Fransisco: Encounter Books.
- Panji, Indra. 2001. *An Analysis Towards Urban Poverty Alleviation Program in Indonesia*. Philosophy Doctor Dissertation. Faculty of the School Policy, Planning, and Development. University of Southern California.
- Parcerisas, L., J. Marull, J. Pino, E. Tello, F. Coll, & C. Basnou. 2012. Land Use Changes, Landscape Ecology and Their Socioeconomic Driving Forces in the Spanish Mediterranean Coast (El Maresme County, 1850–2005). *Environmental sciences & policy* 23, 120-132
- Payne, Dinah M, and A. Raiborn Cecilia. 2001. Sustainable Development: The Ethics Support. *The Economics Journal of Business Ethics*. 2001: 157-168

- Pearson, Torsten., & Guido Tabellini, 1991. Is Inequality Harmful for Growth? Theory and Evidence. *Unpublished paper, May 1991.*
- Pemberton, H., and D. Ulph. 2000. Measuring income and measuring sustainability. *Scandinavian Journal of Economics, Vol. 103, No. 1 (March), pp. 25-40.*
- Perez-Llorente, I., J. Paneque-Galveza, A.C Luzb, M.J Maciac, M. Guezeb, J.A Dominguez-Gomez, V. Reyes-Garciae. 2013. Changing Indigenous Cultures, Economies and Landscapes: The Case of the Tsimane', Bolivian Amazon. *Landscape and Urban Planning 120, 147- 157.*
- Perotti, Roberto., 1992. Income Distribution, Politics, and Growth. *American Economic Review Papers and Proceedings, LXXXII (May 1992), 311-16*
- Piketty, Thomas & Emmanuel Saez, 2003, Income Inequality in United States: 1913-1998, *Quarterly Journal of Economics, 118, 1-39.*
- Pickering, S. 2007. Transnational Crime and Refugee Protection. *Social Justice, 34: 47- 61.*
- Phillips, L., H. L. Votey & D. Maxwell, D. 1972. Crime, Youth, and The Labor Market. *Journal of Political Economy, 80 (3), 491-504.*
- Plama Consortium Limited v Republic of Bulgaria, ICSID Case No ARB/03/24, Award (27 August 2008).
- Poveda, C. A. and M. G. Lipsett. 2011. A Review of Sustainability Assessment and Sustainability Environmental Rating Systems and Credit Weighting Tools. *Journal Sustainable Development, 4(6), 36-52.*
- Pratowo, N. I. 2013. Analisis Faktor- Faktor Yang Berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *Jurnal Studi Ekonomi Indonesia. Vol. 1, No. 1. Hal. 15-31.*
- Preacher, K. J. & Leonardelli, G. J. 2001. Calculation for The Sobel Test: An interactive Calculation Tool for Mediation Tests. <http://people.ku.edu/~preacher/sobel/sobel.htm>

- Prillaman, William C. 2000. *The Judiciary and Democratic Decay in Latin America: Declining Confidence in the Rule of Law*. Westport, CT: Praeger.
- Pujiyono. 2007. *Kumpulan Tulisan Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Putra, M. & Ulupui A. 2015. Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, untuk Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. 11(3). Hal. 863- 877.
- Quiborax S.A., Non Metallic Minerals S.A. and Allan Fosk Kaplún v Plurinational State of Bolivia, ICSID Case No ARB/06/2, Decision on Provisional Measures (26 February 2010) para 122.
- Qurbani, Indah Dwi., 2014. Prinsip Hukum Perimbangan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi. *Yuridika*, Vol. 29, No. 1, Januari-April.
- Rahardja, P dan Mandala Manurung. 2008. *Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikroekonomi & Makroekonomi)*. Edisi Ketiga. Jakarta: FEUI.
- Rahardjo, Satjipto. 2006. *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas.
- Rais, Amin. 2006. Komitmen Bersama Melawan Korupsi, *Jurnal INOVASI* No. 1
- Ranis, Gustav, Frances Stewart & Emma Samman. 2006. Human Development: Beyond the Human Development Index. *Journal of Human Development Index*, Vol. 7, No. 3.
- Reinjtjes, Coen., Bertus Hayerkort & Bayer Ann Water. 1999. *Pertanian Masa Depan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Resosudarmo., I. N. Oka, Mardiah, & N. Utomo. 2014. Governing Fragile Ecologies: A Perspective on Forest and Land-based Development in The Region. *Regional Dynamics in a Decentralised Indonesia*, Institute of Southeast Asian Studies, Singapura.
- Rinawati, M.R Yantu, & Rustam Abd. Rauf. 2014. Pengaruh Pendapatan terhadap Konsumsi Masyarakat Tani Padi Sawah di Desa Karawana Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi. *Jurnal Agrotekbis*. 2

(6) Desember, 652-659.

- Rescia, A.J., B.A Willaartsc, M.F Schmitza, P.A Aguilera. 2010. Changes in Land Uses and Management in Two Nature Reserves in Spain: Evaluating The Social Ecological Resilience of Cultural Landscapes. *Landscape and Urban Planning* 98, 26–35
- Rodrigues, Corinne Davis. 2006. Civil Democracy, Perceived Risk, and Insecurity in Brazil: An Extension of the Systemic Social Control Model. *Annals of the American Academy of Political and Social Science* 605:242-63
- Rudel, T. K., L. Schneider & M. Uriarte. 2010. Forest Transitions: An Introduction. *Land Use Policy*, 27, 95-97.
- Ruggiero, V. and South, N. 2013a, Toxic State–Corporate Crimes, Neo-liberalism and Green Criminology: The Hazards and Legacies of the Oil, Chemical and Mineral Industries. *International Journal for Crime, Justice and Social Democracy*, 2: 12–26.
- Ruggiero, V. and South, N. 2013b. Green Criminology and Crimes of the Economy: Theory, Research and Practice. *Critical Criminology*, 21: 359–73.
- Rustariyuni, S. D. 2014. Pengaruh Gini Rasio, Pengeluaran Non Makanan per kapita, Belanja Daerah dan Laju Pertumbuhan Ekonomi pada terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Periode 2004-2012. *PIRAMIDA UNUD*. 10(1). Hal. 45-55.
- Rukmana, N. 2004. *Megawati Blames 'Greedy' Neighbors for Illegal Logging*. Jakarta Post, 10 May.
- Saint-Paul, Gilles., and Thierry Verdier. 1992. Education, Democracy and Growth. *CEPR Discussion Paper, No. 613, February 1992*.
- Salim, Emil. 1990. *Konsep Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta: Gramedia.
- Salinas-Jiménez, M. M., & J. Salinas-Jiménez. 2007. Corruption, Efficiency and Productivity in OECD countries. *Journal of Policy Modeling*, Vol. 29.

- Sanggolongan, S., Vekie R., & Hanly S. 2015. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. 15(2). Hal. 1- 11.
- Santana, P., Santos, R. e Nogueira, H. 2009. The Link between Local Environment and Obesity: A Multilevel Analysis in the Lisbon Metropolitan Area, Portugal. *Soc. Sci. Medicine*.
- Santosa, B., 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Pengeluaran non makanan daerah terhadap Pertumbuhan, Pengangguran dan Kemiskinan 33 Provinsi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. 5(2).
- Satterthwaite, D. 2009. Implications of Population Growth and Urbanization for Climate Change. *Environment and Urbanization*, Vol. 21, No. 2, 545-567.
- Selamat, Muhammad Banda., 2002. *Modul Praktikum Sistem Informasi Geografis, Jurusan Ilmu Kelautan, FKIP, Universitas Hasanuddin*.
- Setiono, B. 2004. *Impacts of The Decentralization Policy on Timber Industry Performances*. CIFOR Working Paper.
- Schneider, HJ. 1987. 'Economic Crime and Economic Criminal Law in the Federal Republic of Germany' in Hideo Utsuro (ed), *Report for 1986 and Resource Series No. 31: The United Nations Asia and Far East Institute, UNAFEI (April 1987) 128-58*
- Shelley, Louise., 1994. Sources of Soviet policing. *Police Studies* 17:49-65.
- Shidiq, Akhmad Rizal. 2003. Decentralization and Rent-Seeking in Indonesia. *Ekonomi dan Keuangan Indonesia*, Vol. 512.
- Simpson, I. A, A.J Dugmore, A. Thomson, O. Ve'steinnsson. 2001. Crossing The Thresholds: Human Ecology and Historical Patterns of Landscape Degradation. *Catena*, 42, 175-192.
- Siswono, 2010. *Penelitian Pendidikan Matematika*. Surabaya: Unesa University Press.

- Smykla, John Ortiz., 1989. Placing Uruguayan Corrections in Context, 1973-1984: A Note on The Visiting Criminologist's Role. *Journal of Criminal Justice* 17:25-37.
- Soderbaum, Peter., 2012. Democracy and Sustainability Development: Implication for Science and Economics. *Real World Economics Review Issue No. 60*.
- Solomon, Peter H., & Todd S. Foglesong. 2000. *Courts and Transition in Russia: The Challenge of Judicial Reform*. Boulder, CO: Westview.
- Solow, R. M. 1974. *Intergenerational Equity and Exhaustible Resources*. Review of Economic Studies, Symposium on the Economics of Exhaustible Resources. Scotland: Edinburgh.
- Simanjuntak, B. 1981. *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*. ed. ke-2. Bandung: Tarsito
- Sri, Muhammad. 2003. Pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Angka Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Magister Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang*.
- Stack, S., 1984. Income Inequality and Property Crime. *Criminology* 22: 229-256.
- Stern, D.I. 2004. The rise and fall of the environmental Kuznets Curve. *World Development*, 32 (8), 1419-1439.
- Stiglitz, J. E. 1974. *Growth with exhaustible resources, efficient and optimal growth paths*. Review of Economic Studies, Symposium on the Economics of Exhaustible Resources. Scotland: Edinburgh.
- Stole, F & T. Tomoch. 1999. The 1997-98 Fire Event in Indonesia. *Nature & Resources*, Vol. 35, No. 3, Juli-September.
- Sukimo, Sadono. 1985. *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan*. Jakarta: LP FEUI.
- Sullivan, Arthur O. 2003. *Urban Economics*. 5th edition. New York: Mcgraw-Hill. United Nation

- Sunaryo, Prasetyo. 2003. *Indonesia Di tengah Percaturan Global : Memahami Medan Persoalan*, Rangkuman Makalah Pada Seminar Pencerahan Menuju Indonesia dan Tatanan Dunia Baru, ITB, 6 September.
- Sunderlin, W. D, I. A. P. Resosudarmo & O. Ndoye. 2001. *Economic Crises, Small Farmers and Forest Cover in Cameroon and Indonesia*. In Palo, M., Uusivuori, J. & Mery, G. (eds.) *World Forests, Markets and Policies*. Dordrecht. Netherlands: Kluwer Academic Publishers.
- Suparlan, Parsudi. 2000. *Kemiskinan Perkotaan dan Alternatif Penanganannya*. Ditunjukkan dalam Seminar Forum Perkotaan. Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah. Jakarta
- Susandi, A. 2004. *The Impact of International Greenhouse Gas Emissions Reduction on Indonesia*. Hamburg: Reports on Earth System Science.
- Susetiawan, 1997. *Harmoni, Stabilitas Politik, dan Kritik Sosial; Kritik Sosial Dalam Wacana Pembangunan*. Yogyakarta: UII Press.
- Sutikno, Bambang dan Abdul Hakim. 2016. Analisa Peran Koperasi Susu terhadap Pembangunan Ekonomi Hijau di Kabupaten Pasuruan. *Jurnal Sketsa Bisnis, Vol. 4, No. 2, Desember*.
- Taylor, K., & N. Driffield. 2005. Wage Inequality and the Role of Multinationals: Evidence from UK Panel Data. *Labour Economics, 12, 223-49*
- Tauchen, H., A. Dryden Witte & H. Griesinger. 1994. Criminal Deterrence: Revisiting The Issue with A Birth Cohort. *Review of Economics and Statistic, 76(3), 399-412*.
- te Lintelo, Dolf, and others. 2013. *The Hunger and Nutrition Commitment Index: Measuring The Political Commitment to Reduce Hunger and Undernutrition in Developing Countries*. Brighton, United Kingdom: Institute of Development Studies. April.
- Todaro, M.P dan Stephen C. Smith. 2004. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

The Rompetrol Group N.V. v Romania, ICSID Case No ARB/06/3, Final Award (6 May 2013) para 46; Dawood Rawar v the Republic of Mauritius, UNCITRAL, Notice of Arbitration and Statement of Claim (9 November 2015) paras 59–60; Hydro S.r.l and others v Republic of Albania, ICSID Case No ARB/15/28, Order on Provisional Measures (3 March 2016) para 1.4.

Thomas, Vinod, et.al. 2000. *The Quality of Growth*. World Bank.

Trevaskes, Susan., 2004. Propaganda Work in Chinese Courts: Public Trials and Sentencing Rallies as Sites of Expressive Punishment and Public Education in the People's Republic of China. *Punishment & Society* 6:5-21.

Tukahirwa, J.M.B. 2002. Policies, People and Land Use Change in Uganda A Case Study in Ntungamo, Lake Mburo and Sango Bay Sites. The Environmental Conservation Trust of Uganda. *Working Paper Series Number 17*.

Unger, B., 2007. *The Scale and Impacts of Money Laundering*. Edward Elgar. Cheltenham UK.

Ulbrich, H. H. 2003. *Public Finance in Theory and Practice*. Ohio: South-Western.

Ulrich, R. 1984. View Through a Window may Influence Recovery from Surgery", *Science*, Vol. 224, pp. 42-421.

Ungar, Mark. 2002. *Exclusive Reform: Democracy and the Rule of Law in Latin America*. Boulder, CO: Lynne Rienner.

UNDP, BPS & Bappeda, 2002. *Laporan Pembangunan Manusia 2001: Menuju Konsensus Baru Demokrasi dan Pembangunan di Indonesia*. Jakarta:BPS

UNDP, 2004. Annual Report 2004. www.undp.org/undp_in_action_2004.html Diakses 17 Juli 2018.

United Nation, 2015. Result of The List of Indicators Reviewed at The Second IAEG-SDG Second Meeting. Second Meeting of The IAEG-SDGs; Bangkok.

- Upadhyay, T. P., B. Solberg & P. L. Sankhayan. 2006. Use of Models to Analyze Land Use Changes, Forest/Soil Degradation and Carbon Sequestration with Special Reference to Himalayan Region: A Review and Analyses. *Forest Policy and Economics*, 9, 349-371.
- Vanclay, J. K. 2005. Deforestation: Correlations, Possible Causes and Some Implications. *International Forestry Review*, 7, 278-293.
- Verburg, P. H. & A. Veldkamp. 2001. The Role of Spatially Explicit Models in Land Use Change Research: A Case Study for Cropping Patterns in China. *Agriculture, Ecosystems and Environment*, 85, 177-190.
- Vogenauer, S and J Kleinheisterkamp, 2009. Commentary on the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts (PICC) (Oxford University Press 2009) 884.
- Von Amsberg, J. 1994. Economic Parameters of Deforestation. *Policy Research Working Paper 1350. The World Bank*
- Von Ciriacy & S. Wantrup. 1952. *Resource Conservation, Economics and Policies*. University of California Press.
- Vos, M.F. 1992. *The Corporate Image Concept, A Strategic Approach*. Netherland: Utrech Lemma.
- Wachter, David. 2005. *Sustainability Assessment in Switzerland: From Theory to Practice*, EASY-ECO 2005-2007, 1st Conference, Manchester (UK), 15-17 June.
- Westall, Andrea., 2015. The Relationship between Democracy and Sustainable Development. *Briefing Foundation for Democracy and Sustainable Development (FDSD)*.
- Wibowo, I, & F. Wahono. 2003. *Neoliberalisme*. Yogyakarta: Cindelas Pustaka Rakyat Cerdas.
- Widhiarso, Wahyu, 2012. *Menghitung Signifikansi Peranan Tidak langsung*. Buku Ajar Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada.

- Wilhelm, V., & Fiestas, I. 2005. *Exploring the Link Between Public Spending and Poverty Reduction: Lessons from the 90s*. Washington DC.
- Wilson, M., & Daly, M. 1997. Life Expectancy, Economic Inequality, Homicide, and Reproductive Timing in Chicago Neighbourhoods. *BMJ* 314: 1271-1274.
- World Bank, 2011. *World Development Report: Conflict, Security, and Development*. Washington DC.
- World Bank, 2013. *Georgia Overview*. Washington DC.
- World Bank, 2015. Reforming and Uncertainty. *Indonesia Economic Quarterly, December*.
- World Commission on Sustainable Development (WCED). 1987. *Our Common Future*. New York: Oxford University Press.
- WRI (World Resource Institute). 2000. *Strategi Keanekaragaman Hayati Global: Panduan bagi Tindakan untuk Menyelamatkan, Mempelajari, dan Memanfaatkan Kekayaan Biotik Bumi secara Berkelanjutan dan Seimbang*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Yackulic, C. B., et all. 2011. Biophysical and Socioeconomic Factors Associated with Forest Transitions at Multiple Spatial and Temporal Scales. *Ecology and Society*, 16.
- Yasa, O. A. & Sudarsana A., 2015. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Disparitas Pendapatan Antardaerah terhadap Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Bali. *Journal Ekonomi Kuantitatif Terapan*. 8(1). Hal. 63-71.
- Yearwood, D. L., & G. Koinis. 2011. Revisiting Property Crime and Economic Conditions: An Exploratory Study to Identify Predictive Indicators beyond Unemployment Rates. *The Social Science Journal*, 48 (1), 145-158.
- Yukos Universal Limited (Isle of Man) v The Russian Federation, UNCITRAL, PCA, Interim Award on Jurisdiction and Admissibility (30 November 2009) para 509.

- Yunardhani, Rakei. 2012. *Kondisi Pencegahan Kejahatan Berbasis Masyarakat (Community Crime Prevention) di Wilayah Perbatasan Indonesia-Malaysia (Pulau Nunukan dan Pulau Sebatik Provinsi Kalimantan Timur)*. Tesis FISIP Universitas Indonesia. Tidak Dipublikasi
- Yusuf, Arief Anshory, and Arief Ramayandi. 2008. Reducing Fuel Subsidy or Taxing Carbon: Comparing The Two Instruments from The Economy, Environment, and Equity Perspective for Indonesia. *Working Paper in Economics and Development Studies, Padjadjaran University, Bandung, Indonesia*.
- Zaini, Ahmad. 2017. Pengaruh Kekayaan Sumber Daya Alam Batubara terhadap Ketimpangan Pendapatan di Propinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Borneo Administrator, Vol. 13. No.2*
- Zakaria, Fareed. 2003. *The Future of Democracy at Home and Abroad*. New York: Norton.
- Zalman, Marvin., 2000. Criminal Justice and The Future of Civil Liberties. *Criminal Justice Review 25:181-206*.
- Zhang, Y. 2000. *Deforestation and forest transition: theory and evidence in China*. In: M. Palo & H. Vanhanen (eds). *World Forests from deforestation to transition*. Dordrecht: Kluwer Academic Press.
- Zhang, Xiaobo & Kevin H. Zhang. 2003. How Does Globalization Affect Regional Inequality within A Developing Country? Evidence from China. *Journal of Development Studies, 39*.

**HASIL ESTIMASI PENGARUH INVESTASI SWASTA,
DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM, DEMOKRASI
TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN**

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Ketimpangan Pendapatan	38.0970	3.44508	100
Investasi swasta	27.8115	2.55967	100
DBH SDA	18.5660	1.89261	100
Demokrasi	70.7671	6.57942	100

Correlations

		Ketimpangan Pendapatan	Investasi swasta	DBH SDA	Demokrasi
Pearson Correlation	Ketimpangan Pendapatan	1.000	-.101	-.125	-.178
	Investasi swasta	.101	1.000	-.248	-.215
	DBH SDA	-.125	-.248	1.000	.385
	Demokrasi	-.178	-.215	-.285	1.000
Sig. (1-tailed)	Ketimpangan Pendapatan	.	.012	.018	.021
	Investasi swasta	.012	.	.000	.000
	DBH SDA	.018	.000	.	.000
	Demokrasi	.021	.000	.000	.
N	Ketimpangan Pendapatan	100	100	100	100
	Investasi swasta	100	100	100	100
	DBH SDA	100	100	100	100
	Demokrasi	100	100	100	100

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.833 ^a	.854	.825	.40238	.854	1.834	3	96	.046

a. Predictors: (Constant), Demokrasi, DBH SDA, Investasi swasta

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	63.675	3	21.225	1.834	.046 ^b
	Residual	1111.314	96	11.576		
	Total	1174.989	99			

a. Dependent Variable: Ketimpangan Pendapatan

b. Predictors: (Constant), Demokrasi, DBH SDA, Investasi swasta

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	39.652	4.612		8.598	.000
	Investasi swasta	-.305	.156	-.227	-2.953	.043
	DBH SDA	-.342	.208	-.188	-2.643	.032
	Demokrasi	-.052	.059	-.100	-3.884	.020

a. Dependent Variable: Ketimpangan Pendapatan

LAMPIRAN 2

HASIL ESTIMASI PENGARUH INVESTASI SWASTA,
DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM, DEMOKRASI
TERHADAP KRIMINALITAS

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Kriminalitas	91.8525	6.56178	100
Investasi swasta	27.8115	2.55967	100
DBH SDA	18.5660	1.89261	100
Demokrasi	70.7671	6.57942	100

Correlations

		Kriminalitas	Investasi swasta	DBH SDA	Demokrasi
Pearson Correlation	Kriminalitas	1.000	-.205	-.125	-.102
	Investasi swasta	-.205	1.000	-.148	-.215
	DBH SDA	-.125	-.148	1.000	-.185
	Demokrasi	-.102	-.215	-.185	1.000
Sig. (1-tailed)	Kriminalitas	.	.020	.007	.043
	Investasi swasta	.020	.	.000	.000
	DBH SDA	.007	.000	.	.000
	Demokrasi	.043	.000	.000	.
N	Kriminalitas	100	100	100	100
	Investasi swasta	100	100	100	100
	DBH SDA	100	100	100	100
	Demokrasi	100	100	100	100

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.835*	.855	.825	.47764	.855	1.863	3	96	.041

a. Predictors: (Constant), Demokrasi, DBH SDA, Investasi swasta

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	234.501	3	78.167	1.863	.041 ^b
	Residual	4028.140	96	41.960		
	Total	4262.640	99			

a. Dependent Variable: Kriminalitas

b. Predictors: (Constant), Demokrasi, DBH SDA, Investasi swasta

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	79.903	8.780		9.100	.000
	Investasi swasta	-.272	.098	-.123	-2.923	.047
	DBH SDA	-.251	.097	-.172	-2.932	.045
	Demokrasi	-.122	.112	-.022	-0.087	.778

a. Dependent Variable: Kriminalitas

LAMPIRAN 3**HASIL ESTIMASI PENGARUH INVESTASI SWASTA,
DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM, DEMOKRASI
TERHADAP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN****Descriptive Statistics**

	Mean	Std. Deviation	N
Pembangunan Berkelanjutan	80.7482	7.73544	100
Investasi swasta	27.8115	2.55967	100
DBH SDA	18.5660	1.89261	100
Demokrasi	70.7671	6.57942	100
Ketimpangan Pendapatan	38.0970	3.44508	100
Kriminalitas	91.8525	6.56178	100

Correlations

		Pembangunan Berkelanjutan	Investasi swasta	DBH SDA	Demokrasi	Ketimpangan Pendapatan	Kriminalitas	
Person relation	Pembangunan Berkelanjutan	1.000	.257	.118	.067	-.093	-.032	
	Investasi swasta	.257	1.000	.448	.415	.101	.205	
	DBH SDA	.118	.448	1.000	.385	-.125	.125	
	Demokrasi	.067	.415	.385	1.000	-.078	-.002	
	Ketimpangan Pendapatan	-.093	.101	-.125	-.078	1.000	.300	
	Kriminalitas	-.032	.205	.125	-.002	.300	1.000	
	. (1-tailed)	Pembangunan Berkelanjutan		.005	.022	.044	.029	.027
		Investasi swasta	.005		.000	.000	.048	.020
DBH SDA		.022	.000		.000	.038	.047	
Demokrasi		.044	.000	.000		.021	.044	
Ketimpangan Pendapatan		.029	.048	.038	.021		.001	
Kriminalitas		.027	.020	.047	.044	.001		
		Pembangunan Berkelanjutan	100	100	100	100	100	100
		Investasi swasta	100	100	100	100	100	100
	DBH SDA	100	100	100	100	100	100	
	Demokrasi	100	100	100	100	100	100	
	Ketimpangan Pendapatan	100	100	100	100	100	100	
	Kriminalitas	100	100	100	100	100	100	

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.896 ^a	.887	.839	.58354	.887	1.801	5	94	.020

Predictors: (Constant), Kriminalitas, Demokrasi, Ketimpangan Pendapatan, DBH SDA, Investasi swasta

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	517.911	5	103.582	1.801	.020 ^b
	Residual	5405.948	94	57.510		
	Total	5923.859	99			

a. Dependent Variable: Pembangunan Berkelanjutan

b. Predictors: (Constant), Kriminalitas, Demokrasi, Ketimpangan Pendapatan, DBH SDA, Investasi swasta

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	76.788	15.467		4.965	.000
	Investasi swasta	.639	.359	.311	2.616	.019
	DBH SDA	.001	.474	.244	2.402	.015
	Demokrasi	-.083	.132	-.071	-.627	.532
	Ketimpangan Pendapatan	-.250	.238	-.111	-2.649	.011
	Kriminalitas	-.073	.125	-.062	-.588	.558

a. Dependent Variable: Pembangunan Berkelanjutan

LAMPIRAN 4.

ASPEK, VARIABEL DAN IDIKATOR INDEKS DEMOKRASI INDONESIA

A. KEBEBASAN SIPIL (CIVIL LIBERTIES)

I. Kebebasan Berkumpul Dan Berserikat

1. Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yg menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat.
2. Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yg menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat.

II. Kebebasan Berpendapat

3. Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yg menghambat kebebasan berpendapat.
4. Jumlah Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yg menghambat kebebasan berpendapat.

III. Kebebasan Berkeyakinan

5. Aturan tertulis yg membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat menjalankan agamanya.
6. Tindakan atau pernyataan pejabat Pemerintah yg membatasi kebebasan atau mengharuskan masy menjalankan ajaran agamanya
7. Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan dari satu kelompok masyarakat.

IV. Kebebasan dari Diskriminasi

8. Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, atau terhadap kelompok rentan lainnya.
9. Tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah daerah yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau kelompok rentan lainnya.
10. Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat karenan alasan gender, etnis atau kelompok rentan lainnya.

B. HAK-HAK POLITIK (POLITICAL RIGHTS)

V. Hak Memilih dan Dipilih

11. Kejadian dimana hak memilih dan dipilih masyarakat terhambat
12. Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih
13. Kualitas daftar pemilih tetap (DPT)

14. Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam Pemilu (voters turnout)
15. Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD provinsi.

VI. Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan

16. Persentase demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan terhadap total demonstrasi/mogok.
17. Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan.

C. LEMBAGA DEMOKRASI (DEMOCRATIC INSTITUTION)

VII. Pemilu yang Bebas dan Adil

18. Kejadian yang menunjukkan keberpihakam KPUD dalam penyelenggaraan Pemilu.
19. Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara.

VIII. Peran DPRD

20. Besaran alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan dalam APBD.
21. Persentase jumlah Perda yang berasal dari hak inisiatif DPRD terhadap jumlah total Perda yang dihasilkan.
22. Jumlah rekomendasi DPRD kepada eksekutif.

IX. Peran Partai Politik

23. Jumlah kegiatan kaderisasi yang dilakukan parpol peserta pemilu.
24. Persentase perempuan dalam kepengurusan parpol tingkat provinsi.

X. Peran Birokrasi

25. Penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintah daerah yang merugikan masyarakat.
26. Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah.

XI. Peran Pengadilan yang Independen

27. Keputusan hakim yang kontroversial.
28. Jumlah penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi

LAMPIRAN 5

REKAPITULASI DATA SAMPEL PENELITIAN

NO	PROVINSI	TAHUN	INVESTASI SWASTA (X1) (DALAM RUPIAH)	INVESTASI SWASTA (LN X1) (DALAM %)	DBH SDA (X2) (DALAM TRILYUN)	DBH SDA (LN X2) (DALAM %)	DEMOKRASI (X3) (DALAM %)	KETIMPANGAN PENDAPATAN (Y1) (DALAM %)	KRIMINALITAS (Y2) (DALAM %)	IPB (Y3) (DALAM %)
1	KALTIM	2009	822,000,000	20.53	2,523,474,916	21.85	72.31	37.90	88.98	78.80
		2010	7,881,300,000,000	29.70	3,620,846,163	22.81	73.04	36.80	86.61	78.15
		2011	6,569,100,000,000	29.51	3,116,597,570	21.66	66.37	32.30	94.27	85.02
		2012	5,889,300,000,000	29.40	5,268,684,084	22.39	71.23	36.30	83.12	87.78
		2013	16,034,600,000,000	30.41	4,446,313,563	22.22	68.13	36.80	90.76	86.00
		2014	12,859,000,000,000	30.19	3,532,243,333	21.99	77.77	36.10	93.25	80.72
		2015	9,611,310,000,000	29.89	3,166,218,336	21.88	81.40	31.50	90.38	83.79
		2016	6,885,100,000,000	29.56	2,154,070,925	21.49	73.64	32.80	90.25	81.45
		2017	10,980,200,000,000	30.03	1,545,912,582	21.16	73.73	33.30	96.91	81.54
		2018	11,760,200,000,000	30.32	1,233,211,322	21.34	74.23	34.60	90.32	81.28
2	KALTENG	2009	1,464,200,000,000	28.01	45,741,426	17.64	77.63	35.30	86.61	70.99
		2010	3,507,700,000,000	28.89	51,961,488	17.77	71.10	30.40	93.59	72.74
		2011	3,376,000,000,000	28.85	49,900,000	17.73	76.28	33.40	98.04	81.49
		2012	4,529,600,000,000	29.14	131,068,852	18.69	65.78	33.20	97.68	87.69
		2013	1,835,300,000,000	28.24	146,986,818	18.81	64.15	35.80	96.96	87.46
		2014	980,400,000,000	27.61	198,245,696	19.11	79.00	36.50	81.43	81.94
		2015	1,270,120,000,000	27.87	202,946,136	19.13	73.46	30.00	98.21	84.02
		2016	8,179,100,000,000	29.73	12,581,089	16.35	74.77	34.70	99.36	86.43
		2017	3,037,800,000,000	28.74	163,537,809	18.91	75.31	32.70	99.75	88.04
		2018	10,775,300,000,000	30.02	254,445,331	19.66	75.56	34.60	98.66	87.94
3	BABEL	2009	249,300,000	19.33	60,310,388	17.92	67.01	40.80	96.05	70.82
		2010	400,000,000	19.81	48,516,961	17.70	65.94	41.60	99.12	74.89
		2011	514,400,000,000	26.97	53,220,453	17.79	67.13	42.00	94.03	77.03
		2012	533,500,000,000	27.00	98,684,932	18.41	69.37	41.10	99.85	75.26
		2013	608,200,000,000	27.13	85,902,968	18.27	68.79	40.70	86.68	73.23
		2014	615,500,000,000	27.15	122,110,799	18.62	75.32	40.50	82.96	71.63

NO	PROVINSI	TAHUN	INVESTASI SWASTA (X1) (DALAM RUPIAH)	INVESTASI SWASTA (LN X1) (DALAM %)	DBH SDA (X2) (DALAM TRILYUN)	DBH SDA (LN X2) (DALAM %)	DEMOKRASI (X3) (DALAM %)	KETIMPANGAN PENDAPATAN (Y1) (DALAM %)	KRIMINALITAS (Y2) (DALAM %)	IPB (Y3) (DALAM %)
		2015	1,023,740,000,000	27.65	140,696,182	18.76	72.31	37.50	85.34	75.99
		2016	2,202,000,000,000	28.42	92,608,512	13.34	83.00	36.80	84.94	74.87
		2017	1,734,700,000,000	28.18	12,020,027	15.30	85.77	37.60	91.80	75.81
		2018	6,664,200,000,000	30.24	122,544,211	19.44	85.66	36.70	92.33	75.80
4	KALSEL	2009	870,900,000,000	27.49	361,576,568	19.71	66.63	39.60	99.00	68.05
		2010	20,150,000,000,000	30.63	309,529,316	19.55	70.94	40.60	95.45	72.41
		2011	2,118,300,000,000	28.38	374,000,000	19.74	66.47	41.30	95.45	76.75
		2012	3,509,600,000,000	28.89	646,336,615	20.29	61.13	40.40	95.45	76.93
		2013	8,299,200,000,000	29.75	584,114,343	20.19	63.71	39.60	99.82	75.70
		2014	2,616,500,000,000	28.59	596,622,189	20.21	70.84	39.60	99.64	74.65
		2015	2,060,360,000,000	28.35	804,921,470	20.51	74.76	39.40	99.36	74.66
		2016	6,163,000,000,000	29.45	835,291,936	20.54	73.43	40.10	99.82	75.61
		2017	2,581,900,000,000	28.72	16,741,832	16.63	73.79	41.70	99.09	80.22
		2018	10,336,800,000,000	29.34	766,447,221	20.44	73.55	40.70	98.07	81.26
5	KALBAR	2009	517,100,000,000	26.97	12,296,934	16.32	72.38	42.10	99.89	76.54
		2010	1,171,700,000,000	27.79	7,915,306	15.88	69.32	37.00	89.50	78.20
		2011	1,404,000,000,000	27.97	10,640,356	16.18	74.86	39.00	98.00	81.94
		2012	2,811,000,000,000	28.66	28,104,240	17.15	65.38	39.50	99.44	85.07
		2013	2,522,100,000,000	28.56	31,378,670	17.26	67.52	38.40	99.78	80.18
		2014	4,320,800,000,000	29.09	51,092,301	17.75	80.58	40.20	99.44	74.47
		2015	6,143,530,000,000	29.45	45,457,841	17.63	76.40	40.00	88.33	77.46
		2016	9,015,500,000,000	29.83	25,728,625	17.06	75.28	39.10	91.67	80.55
		2017	12,380,900,000,000	30.15	71,324,874	18.08	76.17	39.90	97.15	81.68
		2018	12,335,600,000,000	30.32	145,447,666	20.56	76.55	40.60	98.32	83.60
6	SULTRA	2009	0	23.67	5,645,752	15.55	64.29	38.90	91.07	72.61
		2010	19,200,000,000	23.68	7,106,547	15.78	54.79	39.10	99.45	76.24
		2011	59,000,000,000	24.80	3,904,000	15.18	57.56	38.90	99.15	75.18

NO	PROVINSI	TAHUN	INVESTASI SWASTA (X1) (DALAM RUPIAH)	INVESTASI SWASTA (LN X1) (DALAM %)	DBH SDA (X2) (DALAM TRILYUN)	DBH SDA (LN X2) (DALAM %)	DEMOKRASI (X3) (DALAM %)	KETIMPANGAN PENDAPATAN (Y1) (DALAM %)	KRIMINALITAS (Y2) (DALAM %)	IPB (Y3) (DALAM %)
		2012	907,300,000,000	27.53	45,493,192	17.63	57.26	39.30	99.85	88.83
		2013	1,261,600,000,000	27.86	59,378,675	17.90	52.61	39.10	90.03	88.11
		2014	1,249,900,000,000	27.85	61,153,215	17.93	70.13	39.90	85.50	86.22
		2015	2,015,400,000,000	28.33	73,568,737	18.11	69.44	38.10	86.87	90.35
		2016	1,794,200,000,000	28.22	37,088,482	17.43	71.13	38.80	81.53	90.74
		2017	3,148,700,000,000	28.78	38,199,558	17.46	73.83	40.40	90.97	93.36
		2018	6,778,600,000,000	30.33	123,544,332	20.78	73.22	39.40	89.32	96.30
7	SUMSEL	2009	580,300,000,000	27.09	502,680,051	20.04	72.52	33.30	81.20	76.89
		2010	1,738,400,000,000	28.18	862,163,718	20.57	73.65	36.00	99.15	80.15
		2011	1,068,900,000,000	27.70	847,399,318	20.56	67.92	40.10	97.00	84.00
		2012	2,930,600,000,000	28.71	1,127,002,330	20.84	73.17	42.70	93.60	79.90
		2013	3,396,000,000,000	28.85	1,180,856,653	20.89	67.12	41.50	88.80	78.39
		2014	7,042,800,000,000	29.58	1,385,670,591	21.05	74.82	42.10	96.00	73.53
		2015	1,094,409,000,000	27.72	749,983,666	20.44	79.81	40.40	93.60	77.13
		2016	8,534,100,000,000	29.78	631,146,676	20.26	80.95	41.20	93.60	77.65
		2017	8,200,200,000,000	29.74	1,031,578,078	20.75	82.05	38.50	91.32	79.74
		2018	10,778,600,000,000	30.32	1,322,447,809	20.97	82.33	39.70	91.34	82.27
8	MALUT	2009	0	23.80	20,533,886	16.84	67.21	32.70	71.11	75.97
		2010	0	23.67	30,000,369	17.22	59.92	33.60	93.64	79.06
		2011	13,500,000,000	23.33	13,917,081	16.45	59.17	34.60	85.96	77.93
		2012	320,500,000,000	26.49	50,620,895	17.74	66.83	30.60	83.94	81.56
		2013	1,114,900,000,000	27.74	47,582,504	17.68	64.06	32.00	84.55	78.93
		2014	156,300,000,000	25.78	64,198,612	17.98	67.90	32.20	81.01	74.18
		2015	48,230,000,000	24.60	57,983,593	17.88	61.52	38.60	85.86	75.14
		2016	8,800,000,000	22.90	27,346,253	17.12	73.27	30.90	84.85	74.06
		2017	1,150,600,000,000	27.77	51,567,258	17.76	75.41	33.00	86.02	76.90
		2018	6,775,600,000,000	29.44	122,322,114	20.55	75.98	34.90	85.45	79.96

NO	PROVINSI	TAHUN	INVESTASI SWASTA (X1) (DALAM RUPIAH)	INVESTASI SWASTA (LN X1) (DALAM %)	DBH SDA (X2) (DALAM TRILYUN)	DBH SDA (LN X2) (DALAM %)	DEMOKRASI (X3) (DALAM %)	KETIMPANGAN PENDAPATAN (Y1) (DALAM %)	KRIMINALITAS (Y2) (DALAM %)	IPB (Y3) (DALAM %)
9	SULTENG	2009	0	19.00	5,645,752	15.55	66.02	33.80	81.46	78.92
		2010	192,000,000	19.07	7,106,547	15.78	66.63	38.60	92.71	81.95
		2011	59,000,000,000	24.80	3,904,000	15.18	64.00	38.80	83.75	79.66
		2012	907,300,000,000	27.53	45,493,192	17.63	64.97	38.70	81.46	68.06
		2013	1,261,600,000,000	27.86	59,378,675	17.90	64.50	39.10	88.01	93.34
		2014	1,249,900,000,000	27.85	61,153,215	17.93	74.36	39.20	87.00	81.63
		2015	2,015,400,000,000	28.33	73,568,737	18.11	76.67	39.00	84.30	93.34
		2016	1,794,200,000,000	28.22	37,088,482	17.43	72.20	37.70	86.13	103.61
		2017	3,148,700,000,000	28.78	38,199,559	17.46	73.03	38.50	94.26	110.54
		2018	6,877,200,000,000	30.32	98,677,900	20.31	75.67	38.50	93.04	116.23
10	SULSEL	2009	1,137,800,000,000	27.76	9,076,750	16.02	61.48	39.40	94.69	71.51
		2010	3,212,300,000,000	28.80	7,003,880	15.76	56.67	42.40	87.19	75.88
		2011	3,986,300,000,000	29.01	15,120,114	16.53	65.31	43.70	92.37	68.96
		2012	2,318,900,000,000	28.47	9,797,960	16.10	68.55	41.80	90.17	77.24
		2013	921,000,000,000	27.55	11,317,880	16.24	65.20	43.20	92.82	75.23
		2014	4,949,600,000,000	29.23	30,681,746	17.24	75.30	44.80	98.70	78.12
		2015	9,215,330,000,000	29.85	17,687,427	16.68	67.90	43.40	93.79	80.93
		2016	3,334,600,000,000	28.84	82,539,898	18.23	68.53	41.90	93.79	81.52
		2017	1,969,400,000,000	28.31	49,195,927	17.71	70.42	42.90	99.09	81.01
		2018	6,344,500,000,000	30.43	97,990,099	20.44	74.55	41.70	97.87	81.53